

# CITRA SUMATERA SELATAN DALAM ARSIP





**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, DESEMBER 2008**

Penerbitan Naskah Sumber Arsip,  
Seri Citra Daerah: Nomor 27

Edisi Pertama  
Cetakan Pertama, 2009

# CITRA SUMATERA SELATAN DALAM ARSIP

Hak Cipta @ 2009 pada Arsip Nasional Republik Indonesia  
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak  
atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit.

ISBN:



**Arsip Nasional Republik Indonesia**

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Jakarta 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: [info@anri.go.id](mailto:info@anri.go.id)



## LAMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

2008



IR. H. ALEX NURDIN, SH.  
Gubernur Sumatera Selatan  
Periode 2008 – 2013



H. EDDY YUSUF, SH., MM.  
Wakil Gubernur Sumatera Selatan  
Periode 2008 – 2013



DRS. H. ZAMZAMI ACHMAD  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Sumatera Selatan  
Periode 2004 – 2009



DRS. H. MUSYRIF SUWARDI HANAFIAH  
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Periode 2008 – 2013



## MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Inspektur Jenderal Polisi  
Drs. Ito Sumardi  
Kapolda Sumatera Selatan  
2008 – Sekarang



Mayor Jenderal M. Sohib  
Panglima Daerah Militer II/Sriwijaya  
2008 – Sekarang



H Djuharia Anwar, SH., MH.  
Kepala Kejaksaan Tinggi  
Sumatera Selatan  
2008 – Sekarang



Rusman Dany Achmad, SH.  
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang,  
2008 – Sekarang

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERIODE 1945 – 2008



DR.A.K. Gani  
1945 – 1946



Dr. Mohammad Isa  
1946 – 1952



Winarno  
1952 – 1957



Mochtar P.M. Negara  
1957 – 1958



H.M. Hoesin  
1958 – 1959



H.A. Bastari  
1959 – 1964



H.A.Y. Bustomi  
1964 – 1965



H.M. Ali Amin, SH.  
1965 – 1968



H. Asnawi M. Alam  
1968 – 1978



H. Sainan Sagiman  
1978 – 1988



H. Ramli Hasan B.  
1988 – 1998



H. Rosihan Arsyad  
1998 – 2003



H. Syahrrial Oesman  
2003 – 2008

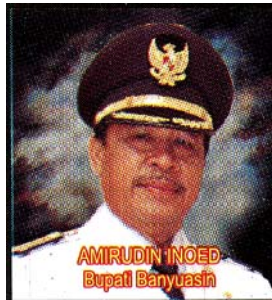


H. Mahyuddin, N.S.  
2008



H. Alex Nurdin  
2008 – 2013

## BUPATI/WALIKOTA DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



Amirudin Inoed  
Bupati Banyuasin



H. Harunata  
Bupati Lahat



H. Budi A. AlJufri  
Bupati Empat Lawang



Kalamudin D.  
Bupati Muara Enim



H. Pahri Azhari,  
Bupati  
Musi Banyuasin



H. Mawardi Yahya  
Bupati Ogan Ilir



Yulius Nawawi  
Bupati  
Ogan Komering Ulu



H. Ishak Mekky  
Bupati  
Ogan Komering Ilir



Muhtadin Sera'i  
Bupati Ogan  
Komering Ulu Selatan



H. Herman Deru  
Bupati Ogan  
Komering Ulu Timur



Ridwan Mukti  
Bupati Musi Rawas



H. Djazuli Kuris  
Walikota Pagar Alam



Eddy Santana Putra  
Walikota Palembang



Ridwan Effendi  
Walikota Lubuk Linggau



Rachmat Djilili  
Walikota Prabumulih

LAMBANG-LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI LINGKUNGAN SUMATERA SELATAN



Kabupaten Banyuasin



Kabupaten  
Lahat



Kabupaten  
Muara Enim



Kabupaten  
Musi Banyuasin



Kabupaten Ogan Ilir



Kabupaten  
Ogan Komering Ilir



Kabupaten Ogan  
Komering Ulu Selatan



Kabupaten Ogan  
Komering Ulu Timur



Kabupaten Musi Rawas



Kota Pagar Alam



Kota Palembang



Kota Lubuk Linggau



Kota Prabumulih

# Sambutan Kepala Arsip Nasional RI



## SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia, bukan saja daerah ini memiliki potensi Sumber Daya Alam yang bernilai ekonomis melainkan karena kekayaan budayanya menjadi objek wisata unggulan Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga menjadi salah satu provinsi yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai oleh berbagai dinamika baik sosial, ekonomi maupun politik. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Melalui khasanah arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maka disusunlah suatu program, yang disebut dengan Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa dan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Melalui khasanah arsip tersebut dapat diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah berasal dari arsip baik dalam bentuk teks, peta, dan foto sebagai satu kesatuan informasi yang menggambarkan sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia, yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama sebagai memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menjadi bukti akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan nasional yang merupakan gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara dan sekaligus merupakan bahan bukti pertanggungjawaban nasional bagi generasi mendatang.

Mencermati tumbuhnya semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman akan makna pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif bagi kelangsungan kehidupan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya daerah yang pada gilirannya menjadi proses dinamika nasional.

Adanya keterbatasan penyajian materi sekiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penyempurnaan penyusunan Citra Daerah selanjutnya. Akhirnya dengan kehadiran Citra Daerah ini, diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.  
Terima Kasih.

Jakarta, Desember 2008  
Kepala,

Djoko Utomo

#

## DAFTAR ISI

Lambang Provinsi Sumatera Selatan _____	ii
Gubernur Sumatera Selatan _____	iii
Wakil Gubernur Sumatera Selatan _____	iv
Ketua DPRD Sumatera Selatan _____	v
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan _____	vi
Musyawarah Pimpinan Daerah _____	vii
Gubernur Sumatera Selatan 1945 – 2008 _____	viii
Bupati/Walikota di Sumatera Selatan _____	ix
Lambang Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan _____	x
Sambutan Kepala ANRI _____	xi
Daftar Isi _____	xiv
Pendahuluan _____	1
A. Latar Belakang _____	2
B. Letak Geografis _____	3
C. Arti Lambang Provinsi Sumatera Selatan _____	4
D. Perkembangan Sejarah Sumatera Selatan _____	5
1. Masa Kerajaan _____	5
2. Masa Kolonialisme Bangsa Eropa _____	9
3. Masa Pergerakan Nasional _____	14
4. Masa Pendudukan Jepang _____	15
5. Periode Republik Indonesia _____	16
E. Sumatera Selatan dalam Khasanah Arsip _____	20
F. Daftar Pustaka _____	22
Citra Sumatera Selatan Dalam Arsip _____	23
A. Geografis _____	24
B. Keagamaan _____	81
C. Politik dan Pemerintahan _____	34
D. Pendidikan _____	89
E. Kebudayaan dan Pariwisata _____	98
F. Perekonomian dan Perdagangan _____	117
G. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan _____	128
H. Infrastruktur _____	139
Daftar Arsip _____	162
Penutup _____	186



# PENDAHULUAN

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangunkan pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), kebangsaan (*nasionalitas*) dan rasa kebangsaan (*nasionalisme*). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan mencerminkan keberhasilan dalam membanun sebuah bangsa.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah ini pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu kepada Daerah perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang Daerah masing-masing agar Daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program Citra Daerah, yaitu penyerahan hasil alihmedia dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu Provinsi yang menerima Citra Daerah pada tahun 2008 ini adalah Provinsi Sumatera Selatan. Namun tidak semua arsip Sumatera Selatan yang ada dalam buku Citra Daerah ini dapat menggambarkan profil Sumatera

Selatan secara keseluruhan, baik kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan khasanah arsipnya. Ada satu bagian wilayah Sumatera Selatan yang sama sekali tidak diketemukan arsipnya, sementara bagian wilayah lain dapat ditemukan arsipnya dengan cukup lengkap.

Arsip Sumatera Selatan yang ada dalam buku Citra Daerah ini mencakup kurun waktu mulai awal abad-17 sampai dengan abad-20, yaitu sejak masa *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan berisi informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan pada periode tersebut. Citra Daerah Sumatera Selatan Dalam Arsip ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI bagi masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tujuan lain dari program ini adalah sebagai upaya perluasan khasanah Arsip Statis Provinsi Sumatera Selatan.

## B. LETAK GEOGRAFIS

Menurut perhitungan geografis letak Provinsi Sumatera Selatan berada pada  $1^{\circ}$ –  $4^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $102^{\circ}$ –  $103^{\circ}$  Bujur Timur. Wilayah Sumatera Selatan bagian utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, di sebelah barat dengan Propinsi Bengkulu dan sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Bangka Belitung.

Ibukota provinsi Sumatera Selatan adalah Palembang. Provinsi ini mempunyai daratan seluas 113.339,07 km<sup>2</sup> dan secara administratif sampai akhir tahun 2008 mencakup 11 Kabupaten dan 4 Kotamadya, yaitu:

1. Kabupaten Banyuasin ibukota Pangkalan Barat,
2. Kabupaten Lahat ibukota Lahat,
3. Kabupaten Empat Lawang ibukota Empat Lawang,
4. Kabupaten Muara Enim ibukota Muara Enim,
5. Kabupaten Musi Banyuasin ibukota Sekayu,
6. Kabupaten Ogan Ilir ibukota Indralaya,
7. Kabupaten Ogan Komering Ulu ibukota Batu Raja,

8. Kabupaten Ogan Komering Ilir ibukota Kayu Agung,
9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ibukota Muara Dua,
10. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ibukota Martapura,
11. Kabupaten Musi Rawas ibukota Muara Beliti,
12. Kota Pagar Alam ibukota Pagar Alam,
13. Kota Palembang ibukota Palembang,
14. Kota Lubuk Linggau ibukota Lubuk Linggau, dan
15. Kota Prabumulih ibukota Prabumulih.

### C. ARTI LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Lambang pemerintah provinsi Sumatera Selatan terdiri

**Atap Rumah Sumatera Selatan** berujung 17, dengan delapan baris dan empat puluh lima buah genteng, bunga teratai, batang hari sembilan, adalah lambang hari kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

**Bunga Teratai**, adalah lambang keadilan berdasarkan Pancasila. **Batang Hari Sembilan**, nama lain Sumatera Selatan adalah lambang kemakmuran.

**Jembatan Ampera**, adalah lambang kemajuan dan ciri khas kota Palembang.

**Gunung**, adalah lambang keperkasaan.

## D. PERKEMBANGAN SEJARAH SUMATERA SELATAN

Sumatera Selatan termasuk daerah yang memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Para ahli arkeologi membuktikan bahwa daerah Sumatera Selatan telah dihuni oleh manusia sejak zaman paleolitik. Hal ini berdasarkan penemuan benda-benda yang digunakan pada masa paleolitikum di desa Bengamas, Lahat, Sumatera Selatan.

### 1. MASA KERAJAAN

Berdasarkan catatan sejarah, Daerah Sumatera Selatan merupakan wilayah yang strategis dan kaya akan hasil alam, sehingga banyak dikunjungi oleh pedagang dari seluruh wilayah Nusantara. Situasi ini sangat menguntungkan penduduk setempat bukan hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi sosial budaya. Masyarakat setempat diperkenalkan kepada berbagai hal yang dibawa oleh para pendatang terutama para pedagang. Mulai dari cara berkomunikasi, pengenalan teknologi dan bahkan sampai pada pengenalan pada budaya dan keagamaan.

Perkembangan yang terjadi inilah yang kemudian menuntun masyarakat setempat untuk segera mengatur masyarakat dan kekayaan alam yang dimiliki agar serasi dengan perkembangan yang terjadi terutama di pesisir pantai tempat terjadinya transaksi perdagangan. Hal ini pula yang kemudian menuntun munculnya sebuah kerajaan bernama Sriwijaya di sekitar Sumatera Selatan pada abad ke-7 M. Kerajaan ini berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan besar, yang menguasai bagian barat Nusantara.

Salah satu faktor yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar dan dapat menguasai wilayah barat Indonesia adalah runtuhnya kerajaan Fu-nan di wilayah Cina. Sebelumnya, Kerajaan Fu-nan adalah satu-satunya pemegang kendali wilayah perairan di Selat Malaka. Selain itu, faktor lainnya adalah kekuatan armada laut Sriwijaya yang kuat sehingga mampu menguasai jalur lalu lintas perdagangan antara India dan Cina. Dengan kekuatan armada yang besar, Sriwijaya kemudian melakukan ekspansi wilayah hingga ke pulau Jawa.

Dalam sumber lain dikatakan bahwa, kekuasaan Sriwijaya sampai ke Brunei di pulau Kalimantan bagian utara.

Dari prasasti **Kota Kapur** yang ditemukan J.K. van der Meulen di Pulau Bangka pada bulan Desember 1892 M, diperoleh petunjuk mengenai Kerajaan Sriwijaya yang sedang berusaha menaklukkan Bhumi Jawa. Meskipun tidak dijelaskan wilayah mana yang dimaksud dengan Bhumi Jawa dalam prasasti itu, beberapa arkeolog meyakini, yang dimaksud Bhumi Jawa itu adalah Kerajaan Tarumanegara di Pantai Utara Jawa Barat. Selain dari isi prasasti, wilayah kekuasaan Sriwijaya juga bisa diketahui dari persebaran lokasi prasasti-prasasti peninggalan Sriwijaya tersebut.

Di daerah Lampung ditemukan prasasti **Palas Pasemah**, di Jambi ditemukan prasasti **Karang Berahi**, dan di Riau ditemukan prasasti **Muara Takus**. Semua ini menunjukkan bahwa, daerah-daerah tersebut pernah dikuasai Sriwijaya. Sumber lain menyatakan bahwa, kekuasaan Sriwijaya sebenarnya mencapai Philipina. Hal ini merupakan bukti bahwa, Sriwijaya pernah menguasai sebagian besar wilayah Nusantara.

Menurut **George Coedes** dalam bukunya yang berjudul *Le Royaume de Crivijaya* (1918) ibukota Sriwijaya adalah Palembang, dengan bersumber pada anggapan **Groeneveldt** dalam bukunya, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca, Compiled Chinese Source*, yang menyatakan bahwa, *San-fo-ts'i* adalah Palembang. Sumber lain, yaitu **Beal** mengemukakan pendapatnya pada tahun 1886 bahwa, **Shih-li-fo-shih** merupakan suatu daerah yang terletak di tepi Sungai Musi, dekat kota Palembang sekarang.

Sumber lain yang mendukung keberadaan Palembang sebagai pusat kerajaan adalah prasasti **Telaga Batu**. Prasasti yang berupa batu menyerupai lempeng segilima ini biasanya digunakan untuk upacara sumpah setia dan pelantikan pejabat dan biasanya terletak di pusat kerajaan. Selain bukti di atas juga bukti temuan barang-barang keramik dan tembikar di situs Talang Kikim, Tanjung Rawa, Bukit Siguntang dan Kambang Unglen, semuanya di daerah Palembang, yang mengisyaratkan bahwa sebelumnya terdapat pemukiman kuno di sekitar Palembang.

Untuk memperluas pengaruh kerajaan, Sriwijaya juga melakukan politik perkawinan dengan kerajaan lain. Seperti, **Dapunta Hyang** yang berkuasa sejak 664 M, melakukan pernikahan dengan **Sobakancana**, putri kedua raja Kerajaan Tarumanegara, **Linggawarman**. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi raja Sriwijaya berikutnya, yaitu **Dharma Setu**. Dharma Setu kemudian memiliki putri yang bernama **Dewi Tara**. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan **Samaratungga**, raja Kerajaan Mataram Kuno dari Dinasti Syailendra. Dari pernikahan Dewi Tara Samaratungga, kemudian lahir **Balaputradewa** yang menjadi raja di Sriwijaya dari 833 hingga 856 M. Pada masa pemerintahan Balaputradewa inilah, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya.

Pada puncak kejayaan, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional dan pusat pengajaran agama Budha di Asia Tenggara. Menurut berita Cina yang ditulis **I-Tsing** - seorang peziarah Budha yang telah mengunjungi Sriwijaya pertama kali tahun 671 M dan sempat bermukim di Sriwijaya-disebutkan bahwa saat itu terdapat lebih dari seribu orang pendeta Budha di Sriwijaya. Aturan dan upacara para pendeta Budha tersebut sama dengan aturan dan upacara yang dilakukan oleh para pendeta Budha di India. Sedangkan menurut **Mas'udi**, seorang sejarawan Arab klasik menulis catatan tentang Sriwijaya pada tahun 955 M, digambarkan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar, dengan tentara yang sangat banyak. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana, pala, gambir dan beberapa hasil bumi lainnya.

Pada abad ke-11 M, Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Pada tahun 1006 M, Sriwijaya diserang oleh **Dharmawangsa** dari Jawa Timur. Serangan ini berhasil dipukul mundur, bahkan Sriwijaya mampu melakukan serangan balasan dan berhasil menghancurkan kerajaan Dharmawangsa. Pada tahun 1025 M, Sriwijaya mendapat serangan yang melumpuhkan dari kerajaan Cola, India. Walaupun demikian, serangan tersebut belum mampu menyingkapkan Sriwijaya dari muka bumi. Hingga awal abad ke-13 M, Sriwijaya masih tetap berdiri, walaupun kekuatan dan pengaruhnya sudah sangat jauh berkurang.

Keadaan tersebut berlangsung hingga datangnya serangan-serangan dari Kerajaan Siam pada tahun 1292, dan Kerajaan Singosari yang telah menguasai Kerajaan Melayu-Jambi pada tahun 1275. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, hampir tidak ada kerajaan lain yang menggantikannya di wilayah ini, tertutup oleh kebesaran Kerajaan Majapahit, yang berdiri pada Abad XIII. Namun kegiatan perdagangan antar pedagang di wilayah Sumatera Selatan dan wilayah lain, terutama di Jawa tetap berjalan. Bahkan, kota ini pernah menjadi *enclave* (daerah kantong) China selama kurang lebih 200 tahun. Saat itu China menempatkan **Liang Tau Ming** sebagai pemimpin Palembang. Sayangnya, pada masa kekuasaan China, Palembang pernah menjadi sarang para bajak laut China yang menyebabkan permasalahan di kota ini.

Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, Palembang pernah pula dijadikan sebagai pangkalan oleh Demak sebelum menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1512.

Pada abad ke-15 berdirilah Kerajaan Palembang yang didirikan oleh Ario Damar yang merupakan Wakil dari Kerajaan Majapahit di Palembang Lamo (atau nantinya disebut Kerajaan Palembang), dengan gelar **Adipati Ario Damar** yang berkuasa antara tahun 1455 hingga tahun 1486. Ketika ia datang ke Palembang, rakyat dan penduduk di daerah ini sebenarnya sudah masuk Islam. Diperkirakan, ia akhirnya ikut memeluk Islam dengan mengubah namanya menjadi **Ario Abdillah** atau **Ario Dillah** (dalam bahasa Jawa, dillah berarti lampu). Ario Dillah kemudian menikah dengan **Puteri Champa**, hingga lahirlah seseorang putra bernama **Raden Patah**. Setelah Ario Dillah wafat, kekuasaan Kerajaan Palembang sempat kosong hingga tahun 1486. Hal itu terjadi karena Palembang termasuk dalam kekuasaan Majapahit. Banyak keturunan Ario Dillah, termasuk Raden Fatah yang kemudian hijrah ke Demak. Ketika Kerajaan Pajang menyerang Demak, terdapat sekitar 24 orang keturunan Pangeran Trenggono (atau juga keturunan Raden Fatah) berhijrah ke Palembang yang dipimpin oleh **Ki Gede Sedo ing Lautan**. Pada tahun 1547, Ki Gede Sedo Ing Lautan menempati posisi Kerajaan Palembang yang telah lama vakum sebagai raja ke-2. Ia berkuasa hingga tahun 1552. Salah seorang suro (perwira) Kerajaan Demak bernama Ki Gede Ing



Suro yang juga ikut dalam rombongan Ki Gede Sedo Ing Lautan kemudian menjadi raja ke-3 di Kerajaan Palembang (1552-1573). Meski sudah hijrah ke luar Jawa, ia dan para keturunannya masih memiliki ikatan ideologis dengan pusat keraton di Jawa hingga zaman Mataram.

Pangeran Mataram merupakan keturunan dari Raden Fatah dan Raden Trenggono. Adanya pertalian darah inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan yang baik antara Kerajaan Palembang dan Kerajaan Mataram pada saat itu. Hubungan tersebut masih terjalin erat hingga masa kekuasaan **Raja Amangkurat I** (raja ke-4). Di samping itu, hubungan kedua kerajaan tersebut juga dalam bentuk kerjasama. Hingga akhir tahun 1677, Kerajaan Palembang masih setia kepada Kerajaan Mataram yang dianggap sebagai pelindungnya, terutama dari serangan Kerajaan Banten yang telah dilakukan sejak tahun 1596.

## 2. MASA KOLONIALISME BANGSA EROPA

Bangsa Eropa pertama yang mengadakan kontak dengan Sumatera Selatan adalah Belanda. Pada tahun 1610, Kerajaan Palembang pernah melakukan kontak perdagangan dengan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Awalnya, VOC enggan berhubungan dengan Kerajaan Palembang dengan berbagai alasan. Tapi Belanda akhirnya memutuskan untuk mengadakan perjanjian dengan Kerajaan Palembang bahkan, semasa pemerintahan **Pangeran Sideng Kenayan**, VOC telah membuka Kantor Perwakilannya di Palembang, melalui perantara Gubernur Jendral Jacob Specx (1629-1632).

Kerajaan Palembang pamornya mulai surut apalagi setelah campur tangan VOC dalam pemerintahan kerajaan. Pada tahun 1659, Keraton **Kuta Gawang** sebagai pusat Pemerintahan Kerajaan Palembang beserta benteng-bentengnya hancur akibat diserbu oleh VOC. Kehancuran Keraton Kuta Gawang tersebut sebagai pertanda berakhirnya eksistensi Kerajaan Palembang.

Pada tahun 1659, di Palembang juga berdiri sebuah kesultanan yang memiliki corak tersendiri dan berbeda dengan Kerajaan Palembang sebelumnya, yaitu **Kesultanan**

**Palembang Darussalam.** Perbedaannya adalah, Kesultanan ini lebih bercorak Islam karena menerapkan syariat Islam serta menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai konstitusi pemerintahan. Pendiri kesultanan ini adalah **Sultan Jamaluddin** atau dikenal dengan sebutan **Sultan Ratu Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Iman**, yang pada masa akhir hayatnya bergelar **Sunan Cinde Walang**. Pada masa pemerintahannya ia berhasil meluaskan pengaruh ke luar Palembang, seperti Bangka, Belitung, sebagian Jambi (Muara Tembesi), Bengkulu (Kepahiang/Rejang), dan Lampung (Tulang Bawang/Mesuji).

Setelah Sunan Cinde Walang meninggal pada tahun 1706, tahta kekuasaan kesultanan kemudian dipegang oleh putranya yang bernama **Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago** (1706-1714). Setelah itu berturut-turut Kesultanan dipegang oleh **Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno** (1714-1724), **Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo** (1724-1758), **Sultan Ahmad Najamuddin** (1758-1776), **Sultan Muhammad Bahauddin** (1776-1804). Pada masa kekuasaan **Sultan Muhammad Bahauddin**, Kesultanan Palembang Darussalam mencapai kemajuan yang sangat pesat dalam bidang perekonomian, termasuk berdagang dengan VOC terutama timah. Bahkan, VOC merasa kesal dengan monopoli perdagangan Sultan Bahauddin yang menyebabkan kontrak-kontrak mereka sering ditolak. Ternyata, Sultan Bahauddin lebih suka berdagang dengan Inggris, China, dan orang-orang Melayu di Riau. Dampak dari kebijakan seperti ini justru menghasilkan kekayaan yang sangat besar bagi keuangan kesultanan. Sehingga, kemakmuran Kesultanan Palembang Darussalam meningkat tajam.

Pada tahun 1780, Sultan Bahauddin membangun **Keraton Kuto Besak** yang dianggap sebagai keraton terbesar dan terindah di Nusantara. Bentuk kemakmuran kesultanan juga berupa berkembangnya bidang kesenian dan kesusasteraan pada saat itu. Dalam kurun waktu 1750-1800, Kesultanan Palembang Darussalam juga pernah menjadi pusat sastra Melayu setelah Kesultanan Aceh yang menjadi pusat kesusasteraan sebelumnya mengalami masa kemunduran.

Pada tahun 1804, **Sultan Mahmud Badaruddin II** menggantikan ayahnya Sultan Bahauddin. Masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II dikenal sebagai masa perjuangan melawan kolonialisme Inggris dan Belanda. Pada tahun 1811, Sultan Badaruddin II berperang dengan Belanda-Perancis yang dikenal dengan **Peristiwa Loji Sungai Aur**. Konflik bermula saat **Daendels** tidak bersedia melunasi tunggakan pembayaran timah, sikap ini dibalas oleh Sultan dengan menghentikan pengiriman timah pada tahun berikutnya. Akibatnya Daendels mengancam akan menyerang Kesultanan Palembang. Hal ini membuat Sultan Palembang mengerahkan rakyatnya untuk siaga. Hingga kekuasaan Daendels berakhir pada tahun 1811, ancaman tersebut tidak pernah terjadi. Sultan Mahmud Badaruddin II kemudian mengadakan kesepakatan dengan Gubernur Jenderal **Raffles** di Bengkulu. Dalam kesepakatan tersebut tercapai bahwa Sultan Palembang memberi dukungan kepada Raffles yang berniat menyerang Batavia serta mengusir orang Belanda dari Palembang. Rencana tersebut kemudian berkembang menjadi tindakan penghancuran terhadap loji Belanda di Sungai Aur dan kedudukan Belanda lainnya di wilayah Sumatera Selatan.

Pada tahun 1812, Sultan Mahmud Badaruddin II menghadapi serbuan armada Inggris atas perintah Raffles setelah naik pangkat menjadi Letnan Gubernur Jenderal di Batavia. Serangan didasarkan pada rumor bahwa terjadi pembunuhan terhadap tawanan Belanda yang dikirim kembali ke Batavia dari Palembang dengan menenggelamkan kapalnya. Hal inilah yang menimbulkan ketegangan antara Inggris dan Palembang, sehingga terjadilah pertempuran. Selain itu, Sultan Mahmud Badaruddin II juga berperan dalam peperangan lain, seperti **Perang Palembang** 1819 Babak I dan II serta Perang Palembang 1821.

Sultan **Ahmad Najamudin II** atau **Sunan Husin Dhiauddin** kemudian meneruskan tahta kesultanan berikutnya (1813-1817). Ia merupakan saudara dari Sultan Mahmud Badaruddin II. Secara berselingan, mereka berdua bergantian dalam memimpin kesultanan. Hal itu terjadi karena Sultan Mahmud Badaruddin II dipecat oleh Inggris dan Belanda sehingga ia hijrah ke Muara Rawas, dalam kurun waktu antara

tahun 1813 hingga tahun 1818. Meski demikian, posisi dirinya sebagai sultan yang sah masih tetap eksis hingga tahun 1821.

Sultan yang ke-9 di Kesultanan Palembang Darussalam adalah **Sultan Ahmad Najamuddin III** atau yang lebih dikenal dengan nama **Pangeran Ratu** (1819-1821). Ia merupakan putra dari Sultan Mahmud Badaruddin II, yang dilantik pada tahun 1819. Ia memimpin secara bergantian dengan ayahnya hingga tahun 1821 ketika Sultan Mahmud Badaruddin II ditangkap dan diasingkan ke Ternate oleh pemerintah Belanda.

Setelah Sultan Mahmud Badaruddin II tidak lagi memimpin karena berada di pengasingan, tahta kesultanan kemudian dipegang oleh **Sultan Ahmad Najamuddin IV** atau yang lebih dikenal sebagai **Prabu Anom** (1821-1823). Pada masa kepemimpinan Prabu Anom, Kesultanan Palembang Darussalam berada di bawah kontrol kekuasaan Belanda. Pada tahun 1823, ia melakukan pemberontakan kepada Belanda karena kontrak yang dibuat pihak kolonial sangat merugikan kedudukannya sebagai sultan. Pada tahun 1825 Sultan Prabu Anom ditangkap dan dibuang ke Manado.

Pada tahun 1825 Pemerintah Belanda membubarkan Kesultanan Palembang Darussalam. Sejak saat itu wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang berada di bawah seorang Residen yang diangkat oleh Belanda. Begitu pula dengan sistem dan struktur pemerintahannya, semuanya diatur oleh Belanda yang menguasai hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Dalam *Regeering Almanak* yang diterbitkan Belanda pada tahun 1870, Karesidenan Palembang terdiri dari sembilan *afdeling*, yaitu:

1. Palembang
2. Tebing Tinggi
3. Lematang Ulu dan Lematang Ilir
4. Komering Ulu, Ogan Ulu dan Enim
5. Rawas
6. Musi Ilir
7. Ogan Ilir dan Belida
8. Komering Ilir
9. Iliran dan Banyuasin

Pembagian *afdeling* ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1872 terjadi pengelompokan ulang dari sembilan menjadi tujuh *afdeling*, dan pada tahun 1878 menjadi enam *afdeling*.

Sejak tidak ada lagi kerajaan/kesultanan besar yang dapat mengganggu eksistensi Belanda pada saat itu pula Belanda dengan leluasa mengeksploitasi hasil bumi Sumatera Selatan, terlebih saat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengeluarkan kebijakan **Tanam Paksa**, Belanda mewajibkan penduduk menanam kopi dan lada. Eksploitasi kekayaan alam semakin menjadi ketika Belanda menemukan tambang minyak di Sungai Gerong-Palembang, batubara di Muara Enim, dan timah di pulau Bangka. Untuk mengangkut hasil bumi dan kekayaan alam dari daerah ini Belanda membangun jalur kereta api antara Lubuk Linggau-Lampung dan selanjutnya dikumpulkan di Batavia,.

Walaupun kesultanan Palembang telah dibubarkan oleh Belanda, namun perlawanan demi perlawanan tetap terjadi di berbagai daerah di Sumatera Selatan, antara lain perlawanan rakyat di Rawas tahun 1906, perlawanan di Muara Tulung Selatan tahun 1916, **Perang Kelambit** di Rawas tahun 1916, perlawanan di komering Ulu tahun 1916, dan perlawanan di Dusun Karta Mulia tahun 1918.

Berdasarkan **Staatblad** 1918 nomor 612, terjadi lagi pengelompokan ulang *afdeling* menjadi empat *afdeling* yaitu *Hofdsplaats* Palembang dan Sekitarnya, *Palembangsche Boevenlanden*, Komering Ulu dan Ogan Ulu, dan *Palembangsche Benedenlanden*. Selanjutnya, setelah Staatblad 1921 no. 465, dan Staatblad 1930 no. 352, Keresidenan ini ditetapkan menjadi tiga *afdeling* saja, yaitu *Afdeling Palembang* (Palembang Hilir) di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Palembang, *Afdeeling Palembang* (Palembang Hulu) di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Lahat, dan *Afdeeling Ogan dan Komering Ulu* di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Baturaja. Struktur pemerintah seperti ini terus berlangsung hingga Jepang menduduki Wilayah Nusantara.

### 3. MASA PERGERAKAN NASIONAL

Seiring dengan adanya politik etis yang diajukan oleh para pemikir Belanda, di Sumatera Selatan tumbuh organisasi-organisasi modern, tercatat organisasi modern pertama yang masuk di Sumatera Selatan yaitu **Sarekat Islam** yang didirikan oleh **Tirtoadisuyo** dan **Raden Gunawan** pada tahun 1911. Pada saat itu Sarekat Islam mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, tidak hanya masyarakat terdidik tapi juga masyarakat biasa, dan pemimpin tradisional, sehingga pada tahun 1914-1920 telah menyebar ke berbagai pelosok wilayah seperti Musi Ilir, Komering Ilir serta Rawas. Sarekat Islam pun saat itu mempunyai organisasi binaannya, yaitu **Partai Kaum Tani (PKT)**. Ternyata perkembangan Sarekat Islam tersebut telah pula disusupi oleh golongan kiri, sehingga terjadi berbagai aksi radikal. Puncaknya, Sarekat Islam terseret dalam perlawanan terbuka dengan Belanda pada tahun 1919-1920. Hal ini mengakibatkan Sarekat Islam menjadi organisasi terlarang sejak tahun 1920.

Selain Sarekat Islam, organisasi lain juga berusaha masuk ke wilayah Sumatera Selatan, seperti **Partai Komunis Indonesia (PKI)** pada tahun 1926, **Partai Nasional Indoensia (PNI)** pada tahun 1927, **Partindo** pada tahun 1931, **PNI Baru** dan **Partai Islam Indoensia (PII)** pada tahun 1932. Pada tahun yang sama, Sarekat Islam juga kembali berusaha bangkit kembali, yaitu dengan pembentukan cabang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) di Mendayun oleh H.O.S Cokroaminoto. Berikutnya adalah **Parindra** dan **Partai Arab Indonesia (PAI)** pada tahun 1936, dan **Gerindo** pada tahun 1937.

Pada tahun 1937, pemerintah Belanda juga melaksanakan salah satu amanat politik etis yaitu transmigrasi, saat itu penduduk dari pulau Jawa ditempatkan ke Belitang, Ogan Komering Ulu dan Tugu Mulyo di Musi Rawas untuk membuka sawah dan perkebunan.

#### 4. MASA PENDUDUKAN JEPANG

Pada tahun 1942, Pasukan Jepang yang tergabung dalam Datasemen Sakaguci yang dipimpin **Mayor Jenderal Sakaguci Shizuo**, ditugaskan untuk menduduki daerah Palembang dan sekitarnya. Dengan dukungan kekuatan artileri dan udara Jepang membordir kota Palembang yang diduduki Belanda dan berusaha menduduki objek vital seperti Plaju, Sungai Gerong sampai daerah penghasil timah di Bangka-Belitung.

Serangan tersebut membuat pasukan Belanda mundur sambil melakukan politik bumi hangus pabrik-pabrik dan jembatan untuk menghambat maju pasukan Jepang. Pada tanggal 14 Februari 1942 pasukan Jepang berhasil menduduki Palembang. Kemudian pasukan ini terus melaju ke arah Karang Endah dan menggempur Prabumulih dengan peralatan rampasan dari Belanda. Sejak saat itu Sumatera Selatan berada di bawah pasukan pendudukan Jepang.

Berbagai kehidupan ekonomi yang selama ini tertata pun hancur. Namun, beberapa instalasi pertambangan minyak yang telah dibumihanguskan oleh Belanda difungsikan kembali seperti di Sungai Gerong karena dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan perang melawan Sekutu. Berbagai perkebunan dan pertambangan diusahakan Jepang, semuanya menggunakan tenaga kerja paksa yang dikenal dengan **romusha**. Sedangkan di bidang politik, akibat sikap keras Jepang, banyak organisasi politik yang selama ini berkembang di Sumatera mendapat tekanan berat bahkan dilarang. Namun, dalam menghadapi perang melawan sekutu, Jepang mulai memobilisasi massa untuk ikut membantu mereka dengan membentuk serangkaian organisasi seperti, **Seinendan, Seinentai, Gakuto-Tai, Heiho, Keibondan,** dan **Fujinkai**. Dari organisasi tersebut biarpun tujuannya untuk kepentingan Jepang tetapi ada manfaatnya terutama kesempatan untuk berorganisasi secara bebas, di Sumatera Selatan tokoh-tokoh seperti **Haji Raden Tjek Yan** dan **Dr. A.K Gani** menjadi sponsor dari organisasi yang bernama **Syu-Syangikai** sebagai jalan untuk menentukan nasib sendiri.

Pada masa pendudukan Jepang ini, wilayah administratif Sumatera Selatan dibagi menjadi 13 berdasarkan *Bun Syu* yang meliputi :

1. Palembang,
2. Talang Betutu,
3. Komering Ilir (Kayu Agung),
4. Ogan Ilir (Tanjung Raja),
5. Musi Ilir (Sekayu),
6. Rawas (Saralangun),
7. Lematang Ilir (Muara Enim),
8. Lematang Ulu (Lahat),
9. Tanah Pasang (Pagar Alam),
10. Tebing Tinggi,
11. Komering Ulu (Baturaja),
12. Musi Ulu (Lubuk Linggau), dan
13. Muara Dua.

Pemerintah penududukan Jepang saat itu tidak banyak mengubah susunan pemerintahan di Sumatera Selatan, kecuali istilah-istilah dan sistem pemerintahan yang lebih militeristik.

Untuk mendapat simpati masyarakat, Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun janji yang diingkari oleh Jepang telah menjadi pendorong bagi para pemuda untuk bergabung melakukan penolakan terhadap pendudukan Jepang. Hal ini memberikan semangat pejuang, pemuda dan rakyat di daerah termasuk Sumatera mengobarkan perlawanan kepada Jepang. Jepang semakin bertindak kejam kepada rakyat akibat semakin memburuknya posisi mereka, sampai akhirnya terjadi Bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, yang menyebabkan kaisar Hirohito mengumumkan penghentian Perang Asia Timur Raya pada tanggal 15 Agustus 1945.

## **5. MASA REPUBLIK INDONESIA**

Pengeboman terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945, telah memaksa Jepang berhenti berperang dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Sekutu, termasuk bala tentara Jepang di daerah Pendudukan di Indonesia. Pada saat inilah Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik



Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Wilayah Republik Indonesia yang diproklamasikan meliputi seluruh wilayah bekas pendudukan Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan pula susunan departemen dan provinsi di Indonesia. Saat itu ditetapkan bahwa Indonesia memiliki 8 propinsi, yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi), Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil. Pada saat itu Palembang merupakan salah satu Karesidenan dibawah Provinsi Sumatera. Kemudian disusul dengan penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI serta UUD 1945 sebagai dasar negara.

Berita tentang proklamasi kemerdekaan RI baru sampai di Sumatera Selatan pada 22 Agustus 1945 dari operator Radio bernama **Maelan**. Selanjutnya berita ini disebarluaskan oleh Dr. AK. Gani ke seluruh pelosok Sumatera Selatan. Untuk menjaga keteriban di Sumatera Selatan dibentuklah **Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR)** beranggotakan 30 orang dipimpin pertama kali oleh Kolonel **Hasan Kasim**. Pelopor BKR di Sumatera Selatan antara lain: **Zainal Abidin Ning, Hasan Kasim, Dani Effendi**, dan **Muhammad Nuh**. Selain BKR laskar-laskar lain bergerak secara sendiri-sendiri dan salah satu yang paling berpengaruh dengan anggota yang sangat besar pada waktu itu adalah: Hizbullah. Seketika itu Dr. AK. Gani dengan cepat bertindak mengumpulkan para pemimpin laskar-laskar dan meminta kesedian untuk menjadikan BPKR sebagai komando utama.

Pada tanggal 24 Agustus, wakil-wakil pulau Sumatera di PPKI tiba di Palembang untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil sejak proklamasi. Satu hari kemudian, datanglah telegram dari Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa A.K.Gani diangkat menjadi Residen Sumatera Selatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada tanggal inilah pemerintah RI berdiri di wilayah Sumatera Selatan. Oleh sebab itu tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai **Hari Sriwijaya**. Selanjutnya tanggal 3 September 1945 dibentuk **Komite Nasional Indonesia Palembang**, yang diketuai oleh AK Gani. Pada tanggal 4 Oktober 1945, AK Gani resmi dilantik sebagai Residen Palembang.

Keresidenan Palembang dihadapkan pada kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu. Jepang yang pada waktu itu sudah takluk pada Sekutu masih merasa berkuasa dan masih memiliki kekuatan pasukan yang cukup kuat, sehingga penyusunan administrasi pemerintahan belum berjalan dengan baik. Sebelum para tokoh pergerakan di Sumatera Selatan membentuk pemerintahan, tentara Sekutu dari Australia di bawah pimpinan **Letnan Kolonel Molinger** mendarat di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945. Seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, kedatangan pasukan Sekutu tersebut diikuti ***Netherlands Indies Civil Administration (NICA)*** yang ingin menanamkan kembali kekuasaan penjajah Belanda di Indonesia. Tindakan NICA tersebut terbukti ketika Sekutu sedang melucuti pasukan Jepang, NICA pun sibuk menyusun pemerintahan kolonialnya dan memperkuat kedudukannya dengan mendatangkan Brigade Y yang terdiri dari Pasukan Gajah Merah KNIL dan Pasukan Divisi VII KL. Tujuannya adalah untuk menunjang berdirinya pemerintahan sipil NICA yang dikepalai oleh **M.J. Wijmolen**.

Untuk mengantisipasi aksi tersebut, pemerintah segera mengangkat **Kolonel Simbolon** sebagai Komandan sub Komandemen Sumatera Selatan dan memindahkan markasnya dari Muara Enim ke kota Palembang. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda mencapai puncaknya tanggal 1 Januari 1947. Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran lima hari. Setelah gagal mengalahkan pejuang-pejuang Indonesia, Belanda melancarkan serangan kembali melalui Agresi Militer I pada 21 Juli 1947. Hal ini menyebabkan Residen **Abdul Rozak** pindah dari Palembang ke Lahat. Gubernur Muda **Mohammad Isa** dan Wakil Residen **dr. Slamet** tetap berjaga di Palembang untuk memberi semangat pada para pejuang.

Dalam rangka memecah belah kekuatan pendukung NKRI, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, **Dr. H.J. van Mook** kemudian mengadakan Konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 15-25 Juli 1946. Konferensi ini berhasil memecah belah kekuatan Indonesia dengan keputusan untuk membentuk Negara Indonesia Serikat, yang antara lain terdiri dari Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur (NIT). Sementara itu di wilayah Sumatera Selatan dibentuk

**Negara Sumatera Selatan** berdasarkan *Staatsblad 1948 Nomor 95* dan mengangkat Wali Negara **Abdul Malik**.

Situasi yang sulit juga dihadapi pemerintah RI di pusat, di satu sisi harus berunding dengan Sekutu, di pihak lain harus menghadapi NICA yang terus melebarkan pengaruhnya untuk mendirikan kembali pemerintah kolonialnya di wilayah RI. Sementara itu, Perundingan Linggarjati antara Perdana Menteri RI **Sutan Syahrir** dengan Wakil Belanda **Prof. Schermerhon** mencapai kesepakatan pada tanggal 15 November 1946. Perjanjian Linggarjati tersebut antara lain, pengakuan kedaulatan RI secara de facto di atas wilayah Sumatra, Jawa dan Madura serta RI hanya menjadi salah satu bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS). Pada dasarnya Perjanjian Linggarjati ini berakibat memecah belah bangsa Indonesia dengan mempersempit wilayah RI dan membentuk NIS.

Setelah tercapai kesepakatan pada Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag 27 Desember 1949 serta untuk menampung tuntutan masyarakat yang menghendaki kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Sumatera Selatan dibubarkan dan menjadi bagian dari NKRI. Pemerintahan Sumatera Selatan diserahkan kepada Mohammad Isa sebagai Gubernur Sumatera Selatan.

Pemerintah RIS menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Dari Wilayah RIS. Undang-undang tersebut menghendaki digabungkannya wilayah RIS dengan RI. Sebagai langkah persiapan pemerintah RIS menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang membagi wilayah RI dalam 10 propinsi, yaitu:

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Kalimantan
5. Sulawesi
6. Maluku
7. Nusa Tenggara
8. Sumatera Utara
9. Sumatera Tengah
10. Sumatera Selatan

Peraturan Pemerintah ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan dengan wilayahnya yang meliputi Karesidenan Palembang, Bengkulu, Bangka-Belitung, dan Lampung atau sama ketika Sumatera Selatan menjadi sub provinsi dari Provinsi Sumatera. Peraturan pemerintah ini kemudian ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 16 tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959.

Memasuki tahun 1960-an, administrasi pemerintahan di Sumatera Selatan kembali mengalami perubahan, yaitu dengan dimekarkannya Karesidenan Lampung menjadi provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1964, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964. Tak lama kemudian, menyusul wilayah Karesidenan Bengkulu yang dimekarkan menjadi propinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967. Pada era reformasi ini, Propinsi Sumatera Selatan kembali mengalami penyusutan wilayah, Karesidenan Bangka-Belitung dimekarkan menjadi provinsi baru, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000.

## E. SUMATERA SELATAN DALAM KHASANAH ARSIP

Sebagaimana diuraikan pada bagian awal bahwa arsip yang akan diserahkan melalui program *Citra Daerah* ini adalah khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI tentang berbagai aktifitas dan interaksi di Sumatera Selatan. Arsip yang diserahkan berupa arsip tekstual, peta-peta dan foto-foto yang menggambarkan berbagai aktifitas di wilayah Propinsi Sumatera Selatan abad 17 sampai dengan abad 20.

Dalam Citra Daerah Sumatera Selatan ini pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai *Geografi dan keadaan alam Sumatera Selatan*. Penjelasan geografi ini digambarkan melalui arsip peta *Platte grond van de stad Palembang* yang menampakkan kraton lama dan kraton baru dipinggir sungai Musi, Peta peta tentang residensi Palembang, dan peta perbatasan antara Palembang dan Bengkulu.

**Kegiatan pemerintahan** meliputi arsip-arsip kontrak antara raja-raja di Palembang dengan Pemerintah Kolonial Belanda, arsip tekstual dan foto tentang pengangkatan gubernur Sumatera Selatan, pembentukan daerah otonom kota kecil dan kota besar serta pelantikan anggota DPRD di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

**Kegiatan politik dan sosial** antara lain pawai dan rapat raksasa mendukung kembalinya ke UUD 1945, arsip tentang bencana banjir dan kunjungan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Pejabat Presiden Satono dan kunjungan negara sahabat.

**Kegiatan keagamaan** menampilkan masjid-masjid di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

**Kegiatan Pendidikan** menampilkan foto kunjungan Presiden Sukarno dalam rangka meresmikan Universitas Sriwijaya, peluncuran roket Pramuka Sriwijaya I.

**Kegiatan Kesehatan** menampilkan arsip tekstual dan foto tentang pendirian rumah sakit di Palembang.

**Kegiatan Pemuda dan Olah Raga** menampilkan turnamen tenis se Sumatera Selatan di Palembang.

**Kegiatan Kebudayaan** menampilkan foto-foto tentang pakaian adat, tarian Gending Sriwijaya dan perkawinan adat Sumatera Selatan.

**Pemukiman** menampilkan rumah-rumah penduduk Sumatera Selatan di sekitar Sungai Musi.

**Perdagangan dan Perindustrian** menampilkan kesepakatan Palembang dengan mengumpulkan timah dan lada pada tahun 1802, warung dan toko di sekitar Sungai Musi, pemancangan dasar pabrik pupuk di Palembang dan peraturan-peraturan pemerintah tentang pengangkatan direksi sementara PN Tambang Timah Bukit Asam.

**Perhubungan** menampilkan arsip tekstual dan foto tentang pembangunan Jembatan Ampera.

**Transportasi** menampilkan foto-foto tentang angkutan kapal motor di Sungai Musi dan Jembatan Ampera.

**Perkebunan** menampilkan arsip cultures tahun 1816-1920, laporan Residen Palembang tentang perkebunan dan peraturan-peraturan pemerintah tentang pendirian perusahaan kehutanan dan pertanian.

**Peternakan** menampilkan pengesahan perda tentang penghitungan ternak besar dan kecil dan unggas serta pemungutan pajak anjing.

**Bangunan** menampilkan tentang foto-foto Bengteng Kuto Besak, dan Museum Sultan Badaruddin.

## DAFTAR PUSTAKA

A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid II. Bandung: Angkasa, 1978.

D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional.

Djohan Hanafiah, *Kesultanan Pelambang Darussalam*, Palembang: Humas Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang, 1991).

Marwati D. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Regeering Almanak 1870

Slamet Muljana, *Sriwijaya*, Yogyakarta: LkiS

Sriwijaya Post, 13 Juni 2002.

Staatblad 1918 no. 612

Staatblad 1921 no. 465

Staatblad 1930 no. 352

Staatsblad 1948 No. 95

[www.forum.sumsel.com](http://www.forum.sumsel.com)

[www.melayuonline.com](http://www.melayuonline.com)

[www.sultanpalembang.com](http://www.sultanpalembang.com).

[www.sumsel.go.id](http://www.sumsel.go.id)

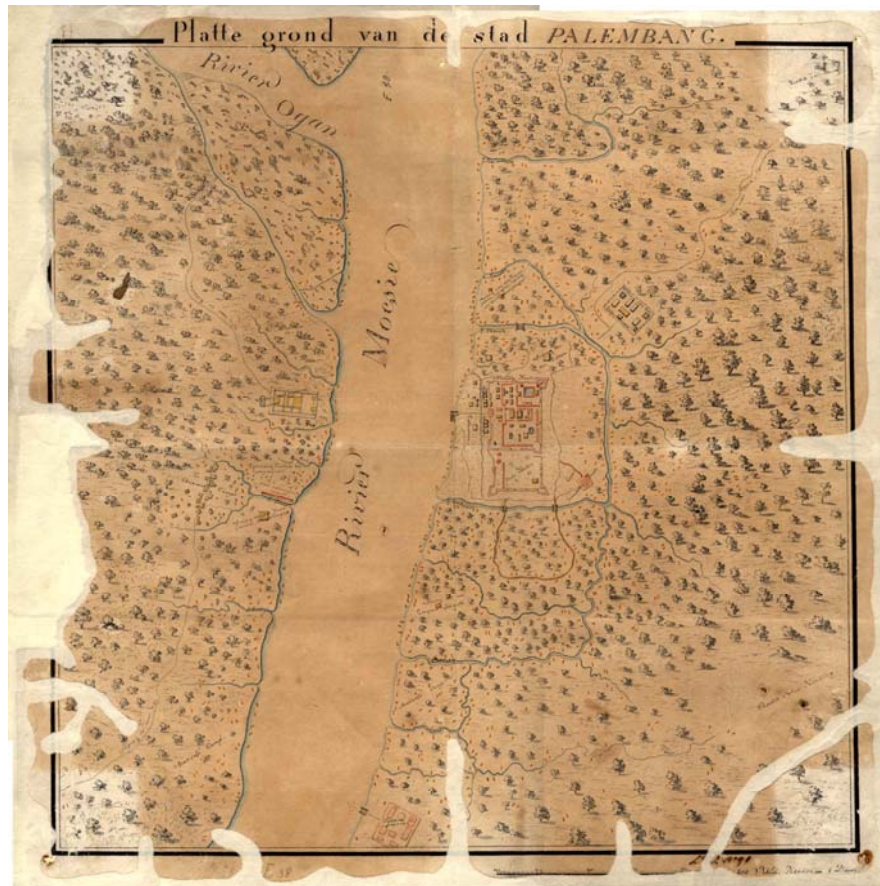
[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. *Profil Provinsi Republik Indonesia : Sumatera Selatan*, 1992.

# CITRA SUMATERA SELATAN DALAM ARSIP

# Geografi

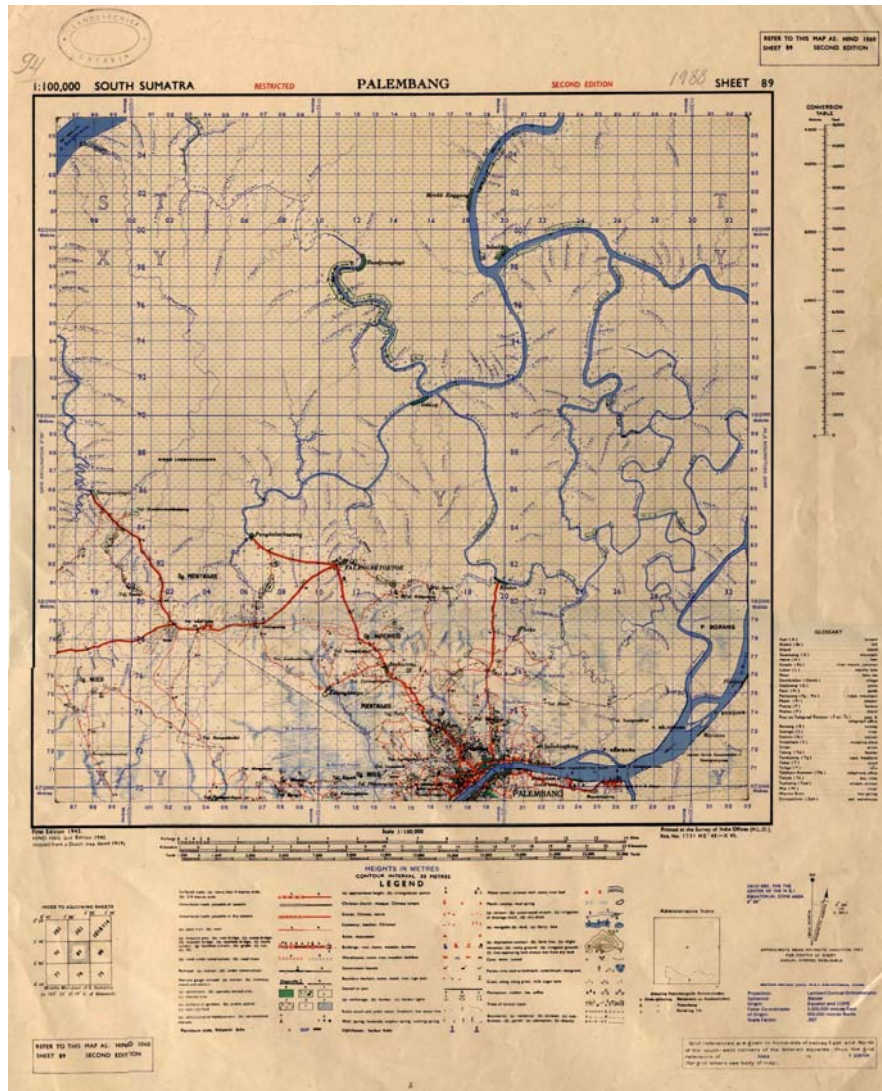




Denah Pemerintahan Kota Palembang.  
1819  
ANRI: De Haan E 38

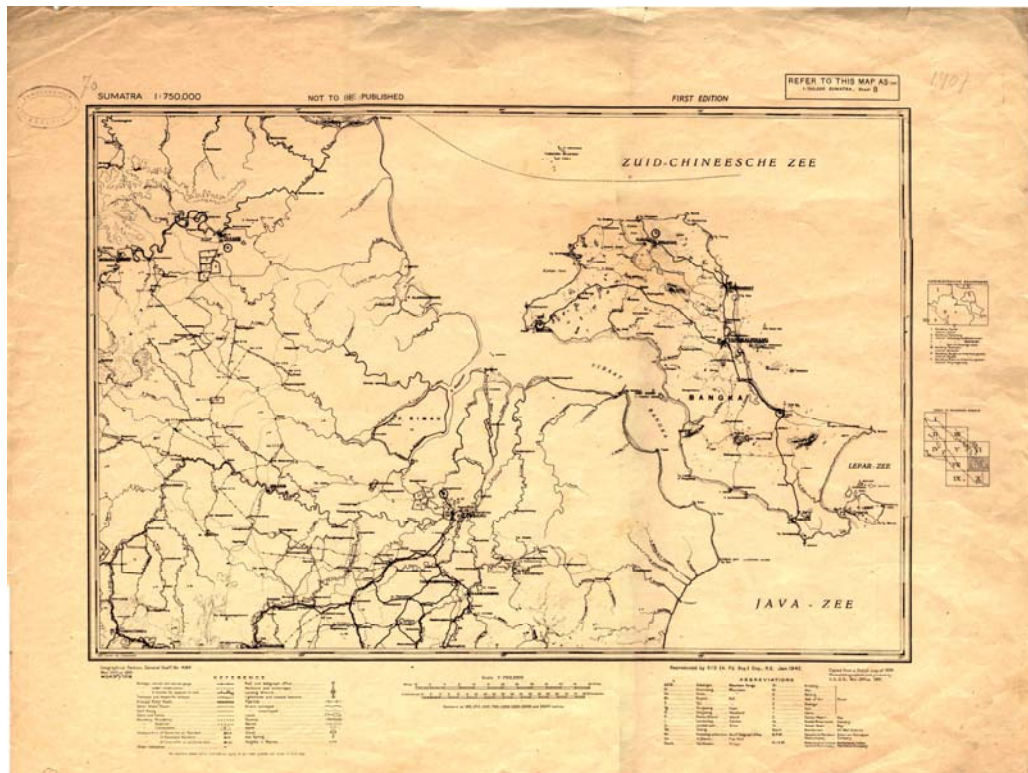


Residensi Palembang, 1922.  
ANRI: Dinas Topografi 1436/81



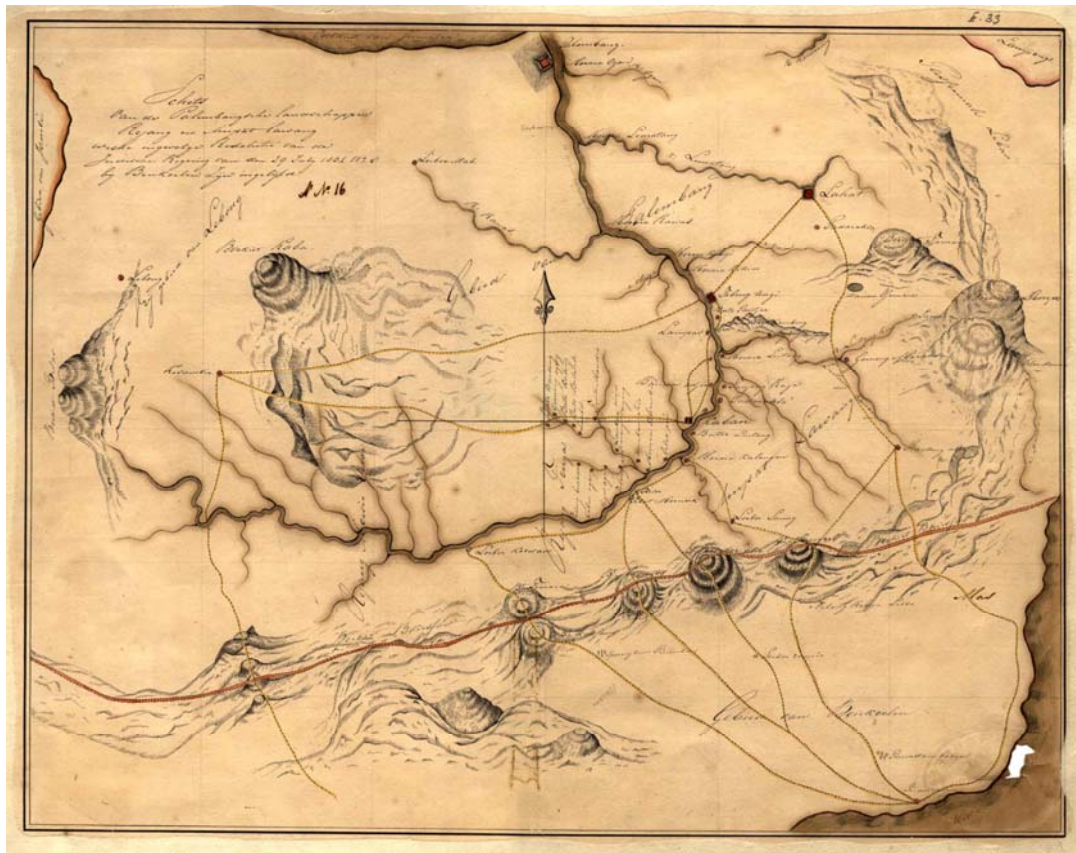
Palembang dengan sungai Musi, Talang Betutu, 1945.

ANRI: Dinas Topografi 1988/89/94



Palembang, Sekayu, Muara Enim, Perbatasan Riau, Jambi  
dan Bangka, 1941

ANRI: Dinas Topografi 1407/Top Dienst



Sketsa perbatasan Palembang Rejang dan Empat Lawang Bengkulu yang merupakan lampiran dari Resolusi Nomor 8, tanggal 29 Juli 1832.  
ANRI: De Haan E. 33



Sketsa Bengkulu dan Palembang.  
1930  
ANRI: De Haan L 44



Alang-alang di daratan Tebing Tinggi, Palembang.

[± 1930]

ANRI: KIT 974/3



Pemandangan kampung ditepi Sungai Musi di Palembang,  
Sumatera Selatan.

18 Desember 1953

ANRI: Kempen K 531218 DD 1





Pemandangan di sekitar Danau Ranau, Kota Baru Palembang.  
[± 1930]

ANRI: KIT 953/17

# **POLITIK dan PEMERINTAHAN**

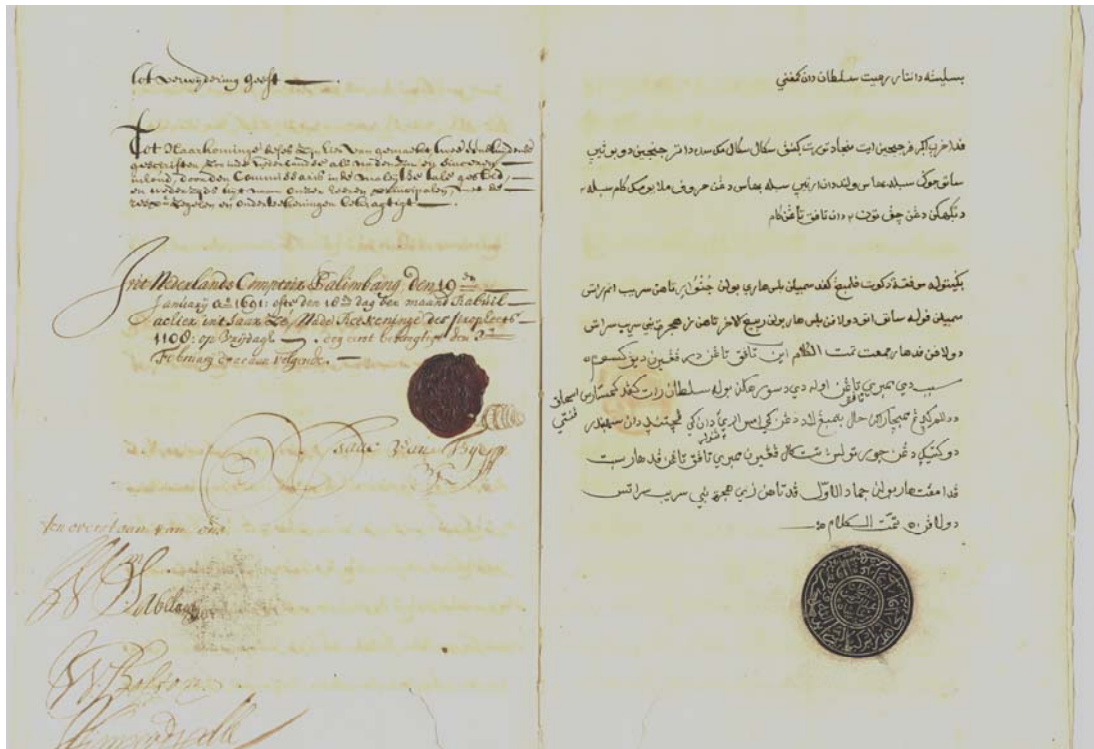
Over Inkomme ofte Verkoop  
van de Sultans van Palembang ter Eere  
van den Heer Co. Thoe Gouverneur  
Generaal Rijkloff van Gois, ende  
van alle Heeren Raden van India  
ter andere zijde. gesloten door weder  
zijde gesommiteerd, namentlyk  
Den Sultan Agon van Palembang  
van wege den Coning van Palembang  
noe den Commissaris Six de  
Haas representeerende baar Wilgem  
Co. end op Batavia

Over den Verkoop van  
de Negocie Cerfelyk dat in Negocie voortaan in Palembang  
Sal geleverd werden met vier Spaedse daer toe  
aangestelde kooplieden door den Sultan, ende tot  
tot Lasten van den Sultan, waerom hij ook  
in Effecte daer voor sal moeten Responderen  
dog gem. kooplieden en sullen op haer liggen  
Paise niet Vermogen v' constanten offte  
Coopmanschap

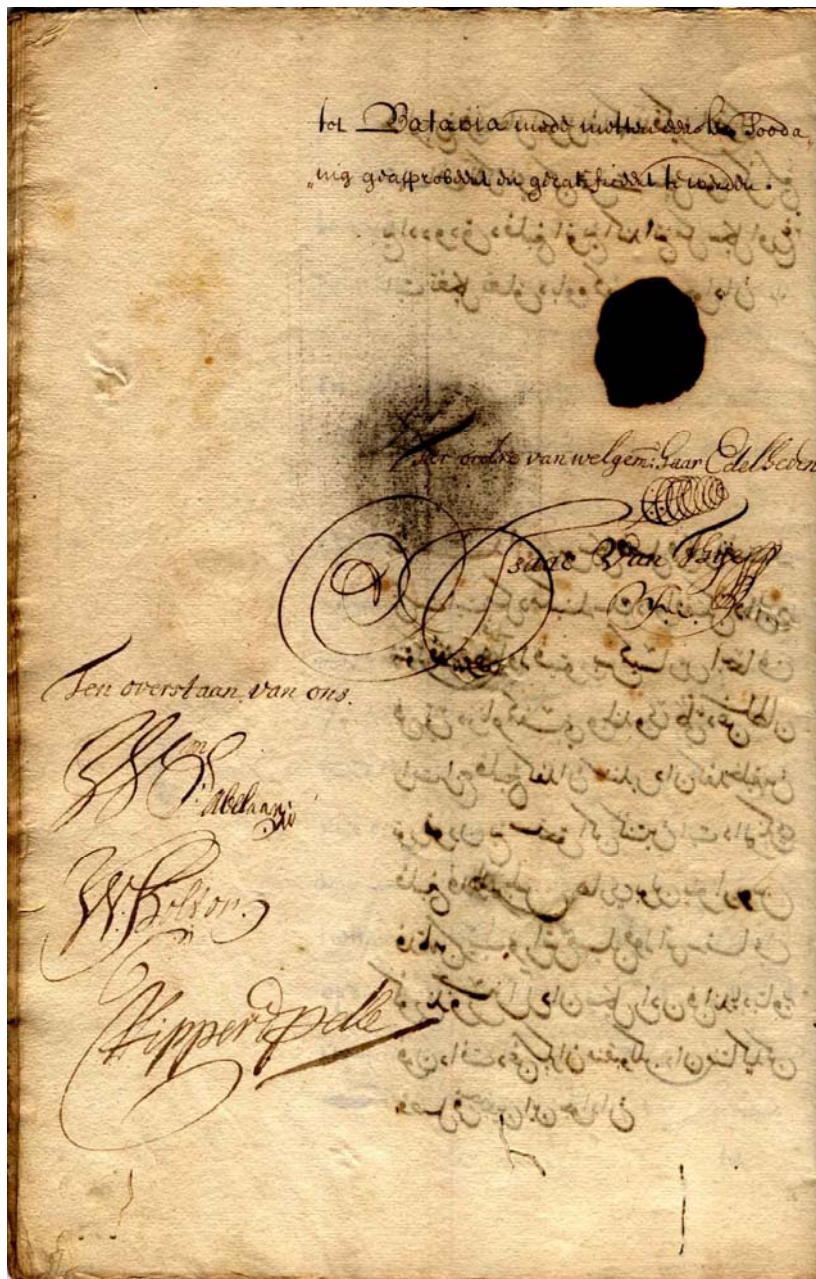
Bagian awal dari kontrak perdagangan antara Raja Palembang  
Sultan Ratu Abdul Jamal dengan Gubernur Jenderal Rijkloft.

20 April 1678

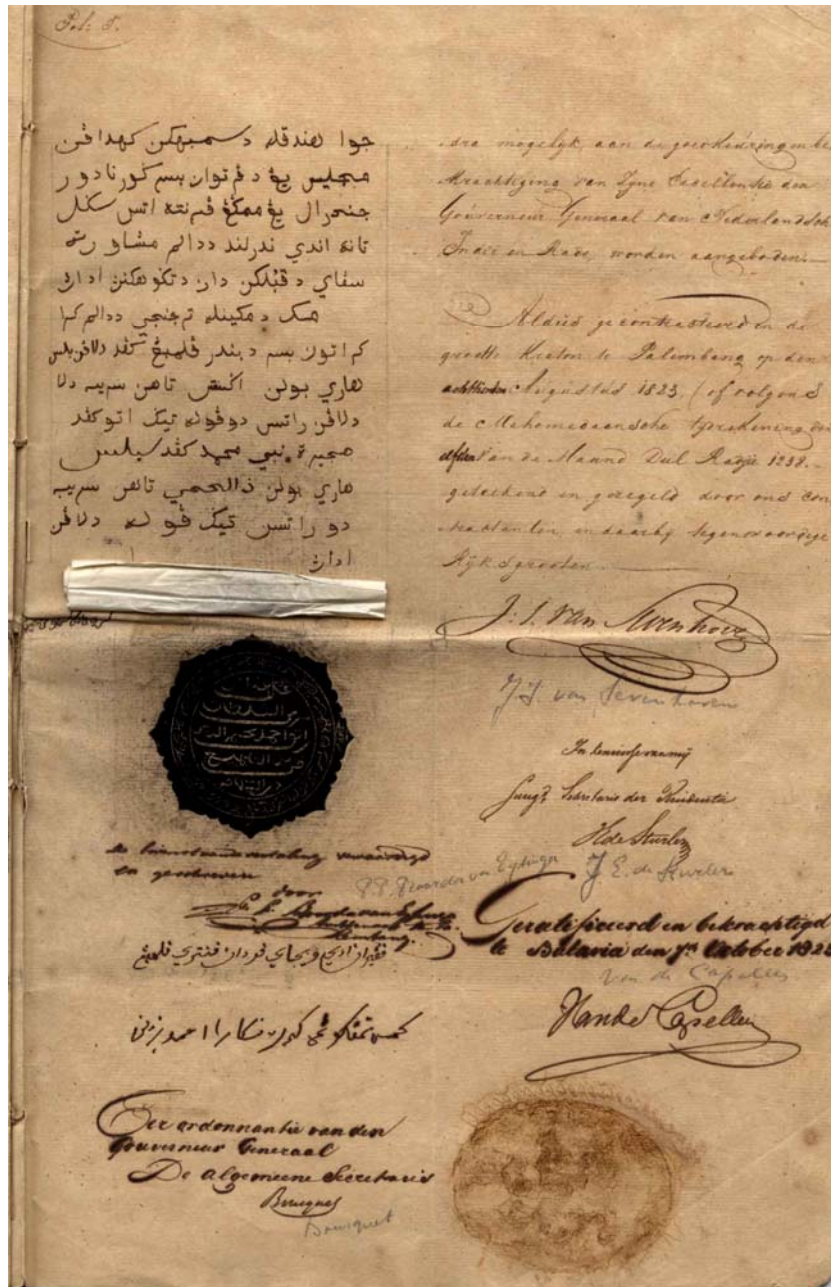
ANRI: Palembang 41/5



Bagian akhir dari Pembaharuan kontrak perdagangan tahun 1662, 1678, 1679 dan 1681 antara Raja Palembang Sultan Ratu Abdul Jamal dengan Komisariss Issac van Thieje, 19 Januari 1691  
 ANRI: Palembang 41/6

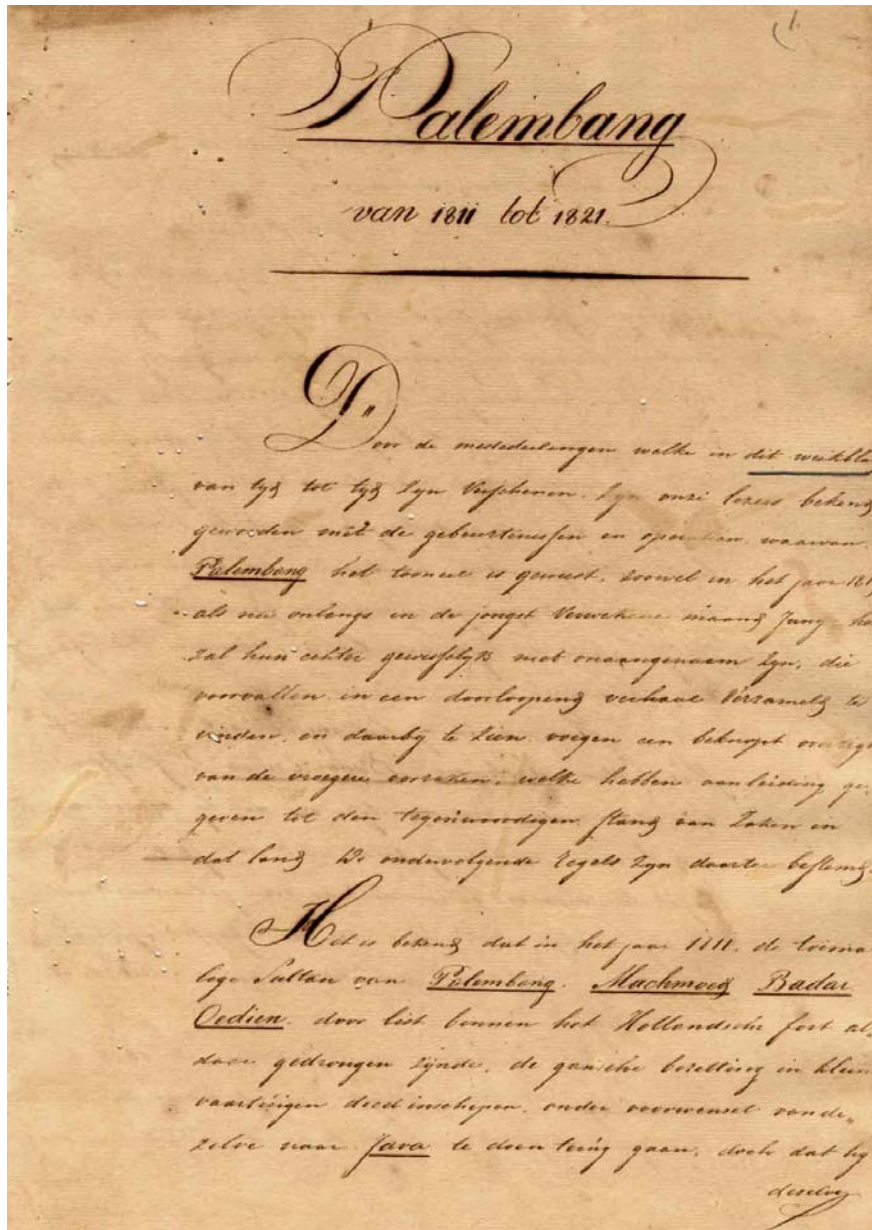


Bagian awal Perpanjangan kontrak antara Raja Palembang Sultan Ratu dengan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC),  
6 Agustus 1723  
ANRI: Palembang 41/7



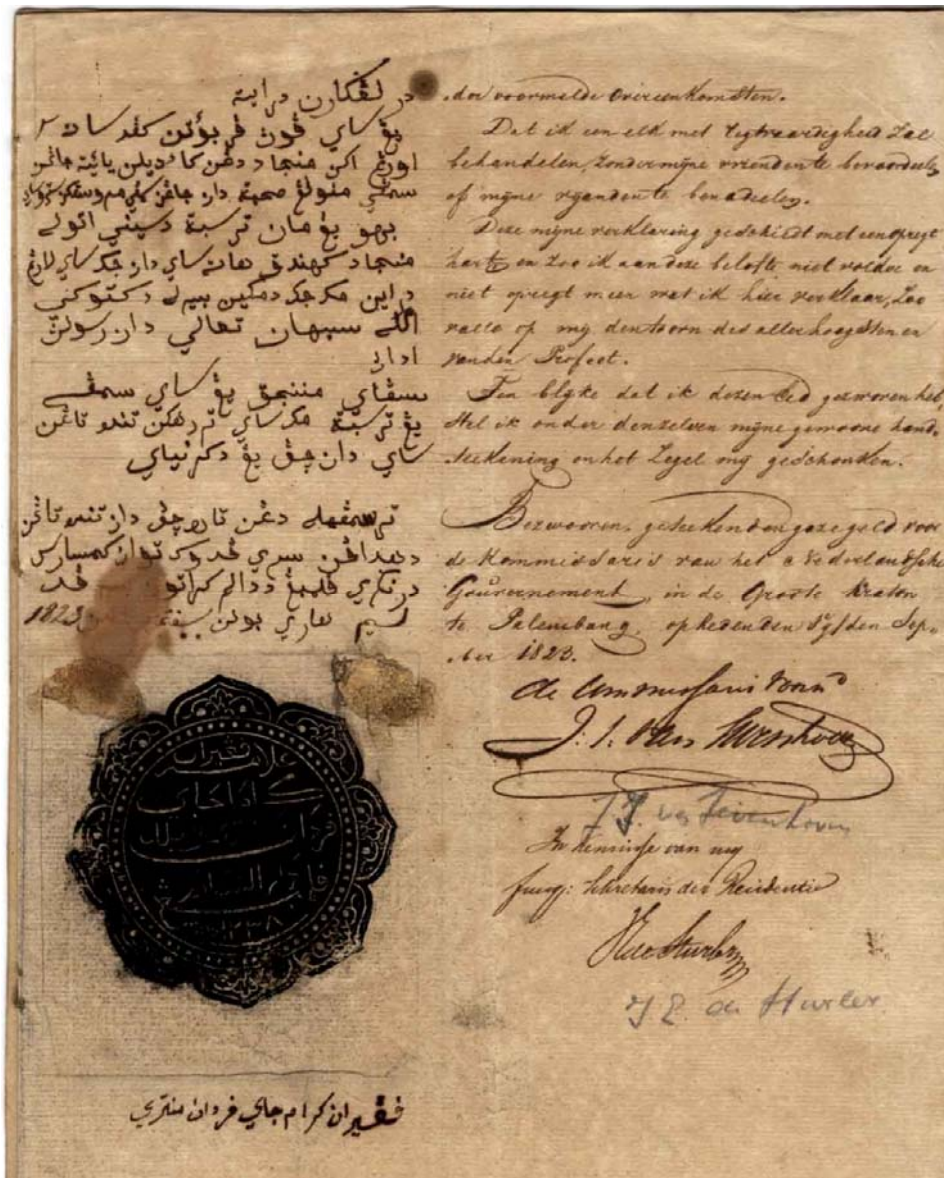
Bagian akhir akte perjanjian antara Jan Isaac van Savenhoven, Komisariss Hindia Belanda di Palembang dengan Raja Palembang Sultan Ratoe Ahmad Najamuddin, 18 Agustus 1823.

ANRI: Palembang 15 DV-16



Bagian awal dari catatan laporan Residen Palembang tentang keadaan Palembang tahun 1811 sampai dengan 1821, 1821

ANRI: Palembang 5/1



Sumpah Pelantikan Pangeran Krama Jaja,  
 Perdana Menteri dari Palembang.  
 5 September 1823.  
 ANRI: Palembang 15 DV II – 18





Surat dari Raja Palembang, Sultan Ahmad Najamuddin kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen mengenai keadaan dan kedudukan keluarganya,  
26 November 1823 (22 Rabiul Awal 1239 H)  
ANRI: Surat Emas No. 7 (Palembang 69)



Surat Sultan Mohamad Badaruddin dari Palembang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai keadaannya yang diasingkan ke Ternate, 23 Desember 1823 (12 Safar 1239 H)  
 ANRI: Surat Emas No.22 (Palembang 80)

Batavia den 15. Maart 1830

aan Glags

By resolutie van den 15. Januarij 1830, behaagde het zijner Excellentie den Luitenant Gouverneur Generaal, den aan onze bevestiging te onderwerpen, de edelste een gescheiden bij aanhangige zaak, betrekkelijk de of niet inlyven van eenige Palembangse Distrieten by Bantoeen. Dit dat einde zijn ons onderscheiden stukken toe hand gesteld, welke ons alle ons de zaak in kwestie hand.

Opzichien wij met den aard deite gelykzaam bekend zijn, ter is het onrecht niet onderstantig voorzigtome een inder Excellentie een betrekpt ons zegt van de zaak te geven, en daans tussens de redenen te verzamelen, die door de respectieve amptouden, te wel voor als tegen de inlyving d bedoelde Palembangse, distrieten in het inceden zijn gebaat, zult

aan  
Gouverneur Generaal  
Nederlandsch Indes

worden beschouwd, en zaaarhet de legt met den moegelykheden zwa kunnen getraan worden. Dit by het die in overaenstemming met den heer van Seu, als wenschelyk beschouwd, om voor de nog aan ondersaapelyke inlyving geen gevolg te geven.

Opzichieden van ons hies een ongedeelde guesdien, het ny ons uit kunnen vracenzen d Excellentie in overaanging te geven de ondersaapelyke stuk te laten en later ges in dien tonywoly de plaatselyke autoriteiten van Palembang in Bantoeen sautje van, om gezamenlyk een nader oort over het of niet inlyve der bedoelde Palembangse Distrieten by Bantoeen, van het Gouvernement into dienen, en saaby speciaal in overaanging te nemen, het in dese uytgebrag guesdien van den Kolonel de Seu. Wij hebben de over de in onze handen gestelde st

aan

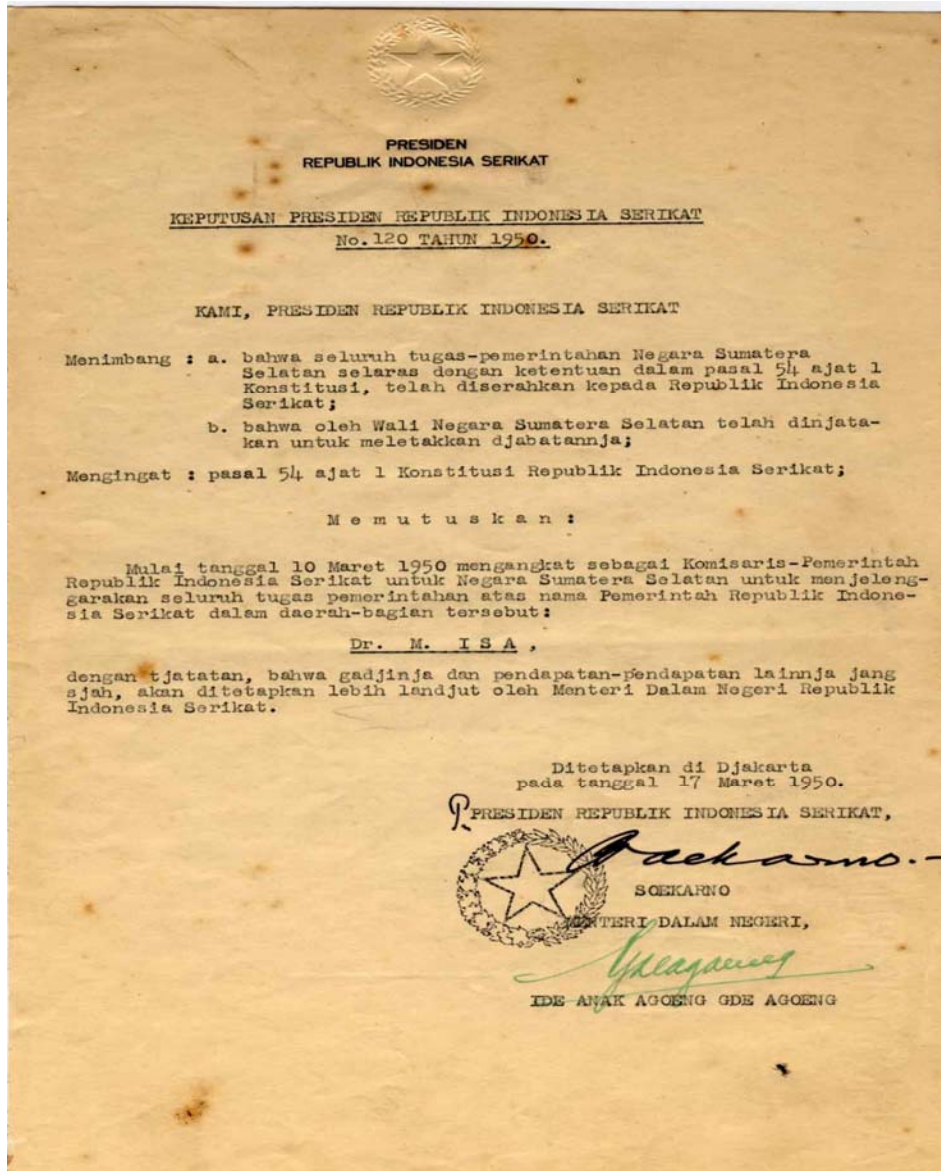
Surat dari Komisi Resolusi 15 Januari 1830 kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang penggabungan Bengkulu dengan Palembang,  
15 Maret 1830  
ANRI: Palembang 70-5



Bagian awal dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 5 tanggal 21 Mei 1855 tentang penentuan pemisahan batas wilayah Paksi Ampat antara Palembang dan Bengkulu,  
21 Mei 1855

ANRI: Besluit No. 5 tanggal 21 Mei 1855






Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 120 tahun 1950 tentang pengangkatan Dr. M. Isa sebagai Komisaris Pemerintah RIS untuk Negara Sumatera Selatan.

17 Maret 1950

ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres RIS No. 107

  
**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT**  
**No. 121 TAHUN 1950.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Mengingat : Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan instruksi untuk Komisaris-Pemerintah di daerah Negara Sumatera Selatan sebagai berikut:

**Pasal 1.**

- 1) Komisaris-Pemerintah berdiri dibawah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat.
- 2) Komisaris-Pemerintah bertugas mempersiapkan dengan segera segala sesuatu yang perlu untuk menentukan setcepat-tcepatnya status Negara Sumatera Selatan sesuai dengan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950, pasal 7 ayat 3 dan pasal 10 sub c.
- 3) Dalam daerahnya beliau memegang pemerintahan sipil yang tertinggi dan memikul tanggung-djawab penuh tentang politik pemerintahan.

**Pasal 2.**

- 1) Mengenai soal kemiliteran beliau wadajib memberikan bantuan kepada Pembesar-pembesar Militer di daerah itu.
- 2) Untuk kepentingan penjelenggaraan kewadibannya Komisaris-Pemerintah dapat minta bantuan seperlunya dari pada Pembesar-pembesar yang dimaksud dalam ayat 1.

**Pasal 3.**

Untuk menjelenggarakan tugas-pemerintahan Republik Indonesia Serikat dalam daerahnya Komisaris-Pemerintah berkewadajiban:

- a. mengadakan segala tindakan-tindakan terhadap penduduk umum dalam hal pemerintahan maupun hal politik, untuk menjelenggarakan keamanan dan kesedjahteraan umum di daerah itu;
- b. berusaha agar supaya pedjabatan-pedjabatan dan pegawai-pegawai sipil dari Republik Indonesia Serikat maupun dari daerah-daerah-bagian yang ada dalam daerah Negara tersebut berdjalan menurut peraturan-peraturan yang telah atau akan ditetapkan;

c. berusaha

Bagian awal dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 121 tahun 1950 tentang Instruksi untuk Komisaris Pemerintah di daerah Negara Sumatera Selatan.

17 Maret 1950

ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres RIS No. 121

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 155 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang, bahwa dengan keputusan Kami tanggal 24 Maret 1950 No.126 Negara Sumatera Selatan telah dibubarkan, serta wilajahnja digabungkan dengan Republik Indonesia;


Mengingat keputusan Kami tanggal 17 Maret 1950 No.120;  
Mengingat pula fatsal 2 dari Undang-undang Darurat No.14 tahun 1950.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: terhitung mulai tanggal 24 Maret 1950 di-  
bebaskan dari tugas kewajibannja sebagai Komisaris Pemerintah  
Republik Indonesia Serikat untuk Negara Sumatera Selatan

Dr. M o h. I s a.

Ditetapkan di Djakarta pada  
tanggal 19 April 1950.

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT



*Soekarno*  
(SOEKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI R.I.S.

*Ide Anak Agoeng*  
(Ide Anak Agoeng Gde Agoeng).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 155  
Tahun 1950 tentang Pembebasan Tugas Dr Mohammad Isa  
sebagai Komisaris Pemerintah RIS Negara Sumatera Selatan,  
19 April 1950  
ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres No. 141





Presiden Soekarno ketika tiba di Palembang dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Palembang, Plaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan.

8 September 1950

[ANRI: Kempen 501085](#)



Presiden Soekarno berjiarah ke makam pahlawan di Palembang,  
dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Palembang, Plaju  
dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan.

8 September 1950

[ANRI: Kempen 501081](#)

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No.63 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 6 Februari 1951 No.U.P.30/14/53 dan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal 15 Maret 1951 No.P./VV/1013;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Selatan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai termaksud dalam Undang-undang No.22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan djabatan dan gaji Dr. Mohamad Isa, Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom tersebut;
- Mengingat pula :
- Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950;
  - P.G.P. 1948 jo Peraturan Pemerintah No.16 jo No.23 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 September 1950

Dr. MOHAMAD ISA

diangkat pada djabatan dalam ruang 8 dan kepadanya diberikan gaji serta penghasilan lain yang sah yang bersangkutan dengan djabatannya sebagaimana termaktub dalam ruang 11 daftar terlampir;

dengan tjetatan, bahwa djika dikomudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini, surat Keputusan ini akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- Semua Kementerian,
  - Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
  - Kabinet Perdana Menteri,
  - Dewan Menteri,
  - Djabatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
  - Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Palembang dan Djakarta,
  - Kantor Urusan Perdjalan Dinas di Djakarta,
  - Kantor Penetapan Pajak,
  - Kantor Gubernur Sumatera Selatan di Palembang,
  - Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan
- PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 April 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO

Keputusan Presiden RI Nomor 63 tahun 1951 tentang  
pengangkatan Dr. Mohammad Isa sebagai Gubernur/  
Kepala Daerah Otonom Sumatera Selatan.

25 April 1951

ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres No. 289



Kunjungan kerja Presiden Soekarno ke Pagar Alam,  
Sumatera Selatan. Nampak Presiden Soekarno sedang  
berbincang dengan seorang penduduk.

14 November 1952

[ANRI: Kempen 521114 DD 1-4](#)



Masyarakat Pagar Alam, Sumatera Selatan memenuhi rapat raksasa yang dihadiri oleh Presiden Soekarno.

14 November 1952

[ANRI: Kempen K. 521114 DD 1-14](#)



Presiden Soekarno menerima sajian kesenian  
dalam kunjungan di Pagar Alam, Sumatera Selatan.  
16 November 1952

[ANRI: Kempen 521117 DD 31](#)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 107 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Desember 1951 No. DPRSS/4/1951 dan keputusan perubahannya tanggal 27 Februari 1953 No. DPRSS/1/1953 tentang Pedoman Bekerja untuk Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : pasal 15 dari Undang-undang No.22 tahun 1948 serta pasal 85 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Desember 1951 No. DPRSS/4/1951 setelah diubah dengan keputusannya tanggal 27 Februari 1953 No. DPRSS/1/1953 tentang Pedoman Bekerja untuk Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk dimaklumi kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan,
3. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan,
4. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 16 Djuni 1953.

*Sukarno*  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

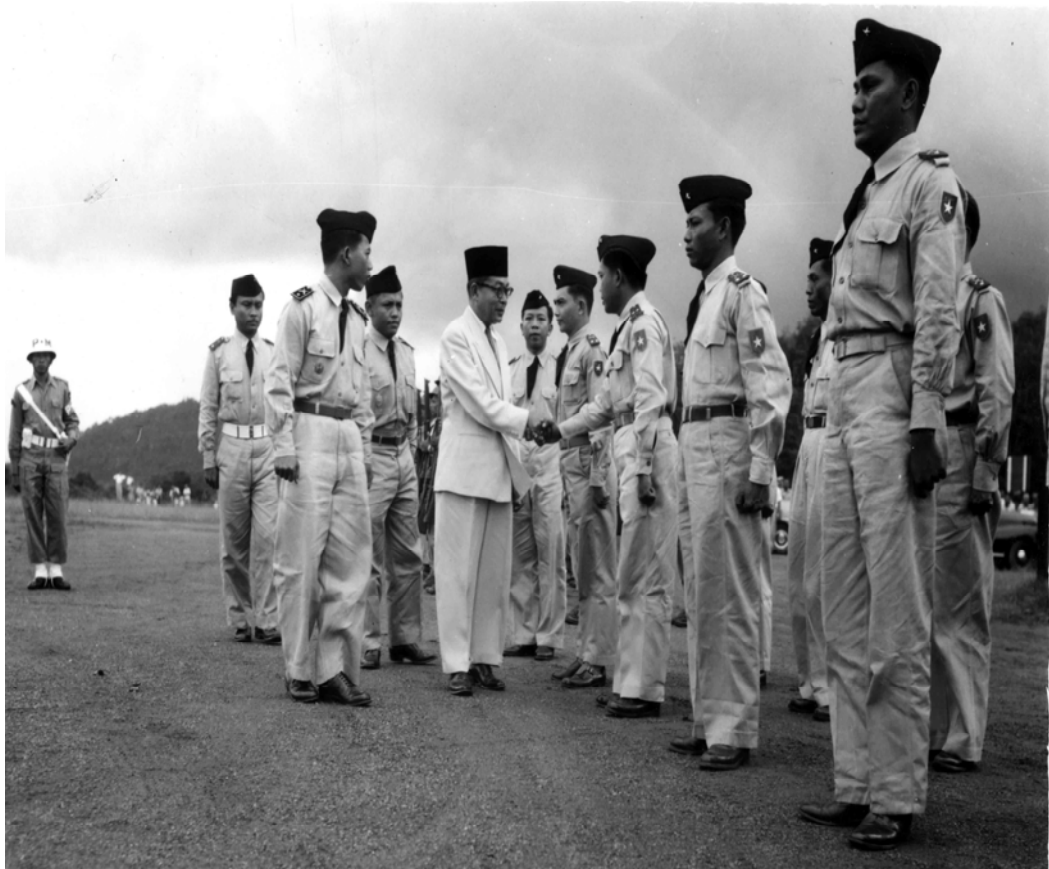
*Mohammad Roem*  
MOHAMMAD ROEM.



Keputusan Presiden RI Nomor 107 tahun 1953 tentang pedoman bekerja untuk Dewan Pemerintah Daerah Sementara Provinsi Sumatera Selatan.

16 Juni 1953

ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres No. 790



Wakil Presiden Mohammad Hatta meninggalkan bandar udara  
Talang Betutu, Palembang, Sumatera Selatan.

14 Juli 1954

[ANRI: Kempen 540714 DD22](#)





Presiden Soekarno disambut oleh Gubernur Sumatera Selatan, Winarno, Ketua Dewan Pemerintah Daerah (DPD), Ali Gatnier dan Panglima Teritorial II, Kolonel Bambang Utoyo ketika tiba di bandar udara Talang Betutu.

9 Nopember 1954

[ANRI: Kempen 541109 DD 2](#)



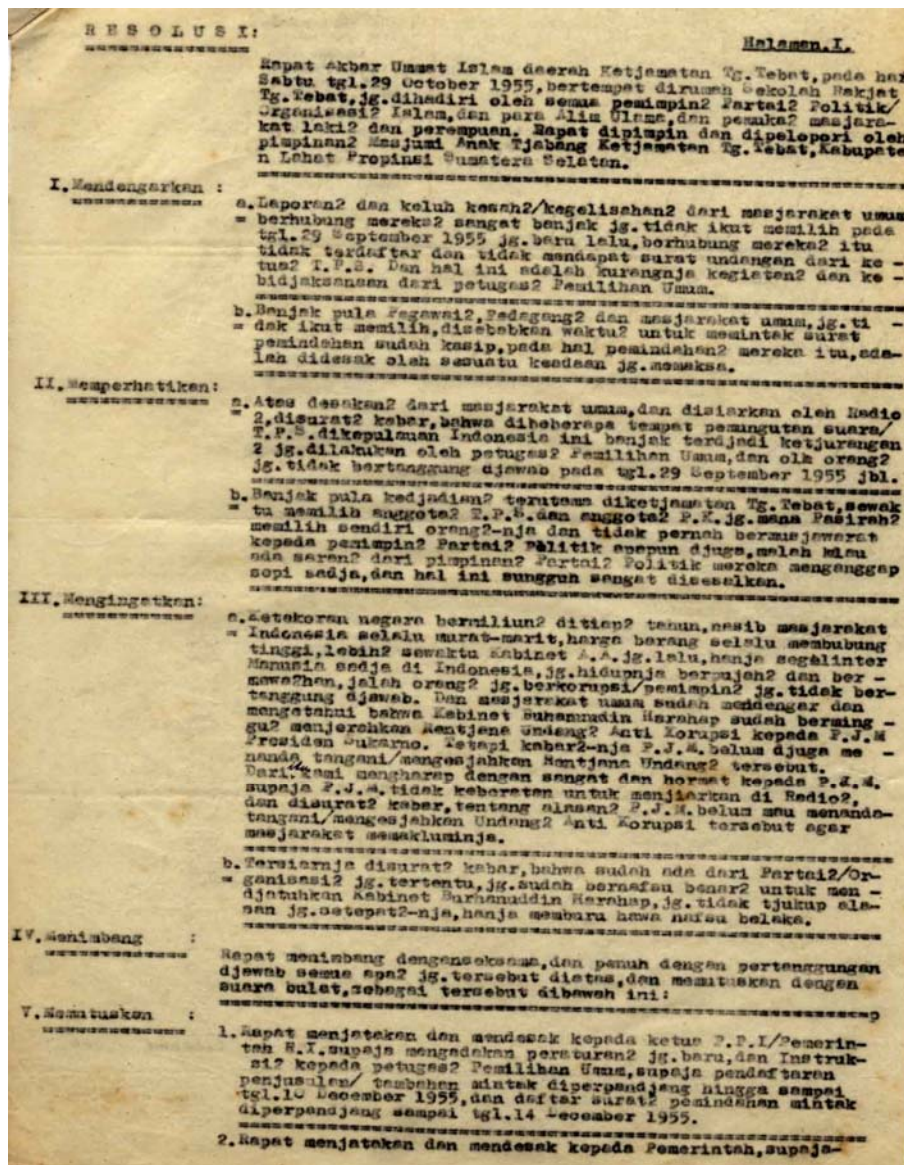
Gubernur Sumatera Selatan Winarno memberikan tanda mata kepada tamu Negara Wakil Perdana Menteri Mesir Gamal Salem.

29 Agustus 1955

[ANRI: Kempen 550829 DD 5](#)



Gubernur Sumatera Selatan Winarno beserta Nyonya dengan  
Perdana Menteri Inggris, David Marschaal dalam kunjungan  
misi persahabatan ke Sumatera Selatan,  
13 September 1955  
[ANRI: Kempen 550913 DD 10](#)



Bagian awal dari Resolusi Partai Politik Islam Masyumi Daerah Kecamatan Tanjung Tebet Palembang tentang permintaan kepada Pemerintah untuk memperpanjang pendaftaran Pemilihan Umum (pemilu) dan menertibkan kecurangan-kecurangan dalam pemilu tahun 1955.

29 Oktober 1955

ANRI: Kabinet Presiden No. 997



Timbang terima Residen Palembang, kiri Residen Palembang yang baru H.M. Hosen, kanan residen Palembang yang lama Abdul Rozak.

1 Februari 1956

[ANRI: Kempen 560201/2](#)



Presiden Soekarno berbincang di atas kapal waktu menyebrang  
Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan.

10 April 1956

ANRI: Kempen 560410 DD 11



Presiden Soekarno tiba di resepsi muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang, disambut oleh barisan pandu.

23 Juli 1956

ANRI: Kempen 560723 DD 7



Ketua Umum Muhammadiyah Abdul Rasyid St. Mansur berpidato  
pada Muktamar ke-33 Muhammadiyah tentang perjuangan  
Muhammadiyah di Palembang, Sumatera Selatan  
23 Juli 1956

[ANRI: Kempen 560723 DD 17](#)

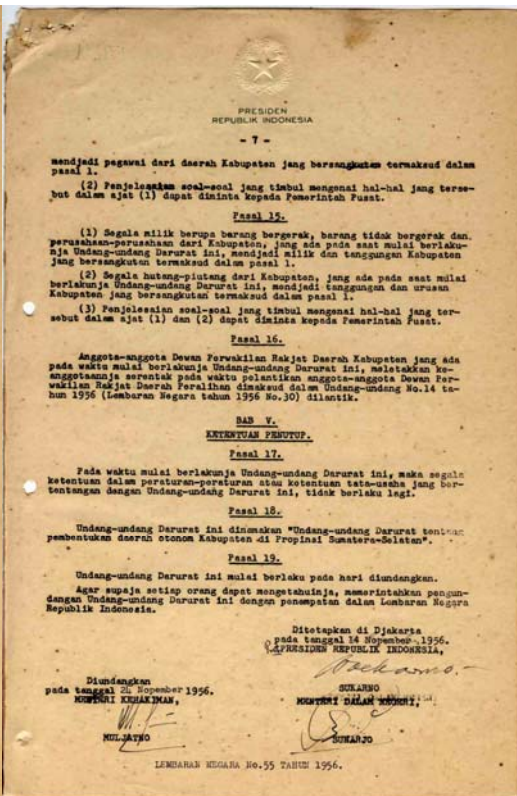
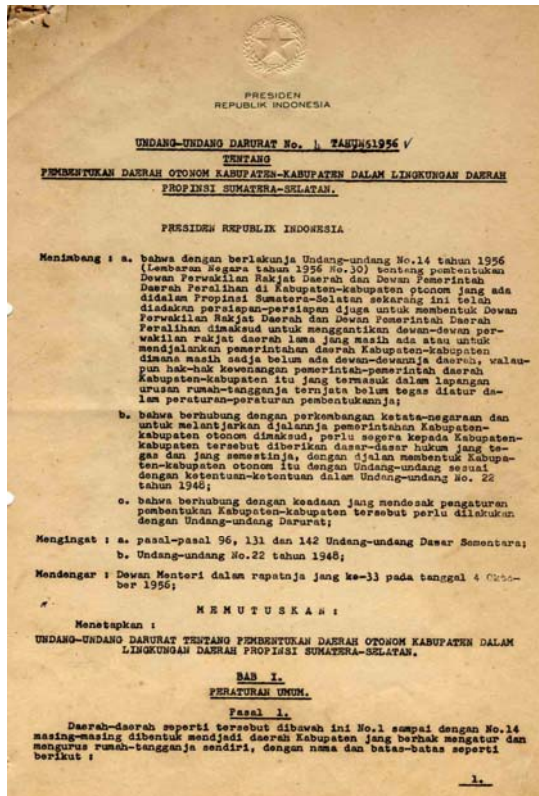





Presiden Soekarno mendengarkan laporan dari *Acting* Panglima Teritorial-II/Sriwijaya Letnan Kolonel Burlian, dalam rangka kunjungan Presiden ke Staf Komando Teritorial-II/Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan.


28 Juli 1956

[ANRI: Kempen 560724 DD 3](#)



Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  
14 November 1956  
ANRI: Sekretaris Kabinet UU Darurat No. 130

  
 PRESIDEN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 - 7 -  
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
 Ditetapkan di Djakarta  
 pada tanggal 14 Nopember 1956.  
 R. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
 PRESIDEN  
 REPUBLIK INDONESIA  
**UNDANG-UNDANG DARURAT No. 5 TAHUN 1956**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI**  
**SUMATERA-SELATAN.**  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan di Kota-kota otonom yang ada didalam Propinsi Sumatera-Selatan sekarang ini telah diadakan persiapan-persiapan juga untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan dimaksud untuk menggantikan dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah lama yang masih ada atau untuk mendjalankan pemerintahan daerah Kota-kota dimana masih saja belum ada dewan-dewanja daerah, walaupun hak-hak kewenangan pemerintah-pemerintah daerah Kota-kota itu yang termasuk dalam lapangan urusan rumah-tangganya ternyata belum tegas diatur dalam peraturan-peraturan pembentukannya;

b. bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan djalanja pemerintahan Kota-kota otonom dimaksud, perlu segera kepada Kota-kota tersebut diberikan dasar-dasar hukum yang tegas dan yang seses-tinja, dengan djalan membentuk Kota-kota otonom itu dengan Undang-undang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.22 tahun 1948;

c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembentukan Kota-kota tersebut sebagai Kota-kota Besar perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat;

Mengingat : a. pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;  
 b. Undang-undang No.22 tahun 1948;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke-33 pada tanggal 4 Oktober 1956;

**MEMUTUSKAN :**

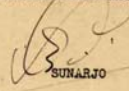
Menetapkan :  
**UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR**  
**DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA-SELATAN.**

**BAB I.**  
**PERATURAN UMUM.**

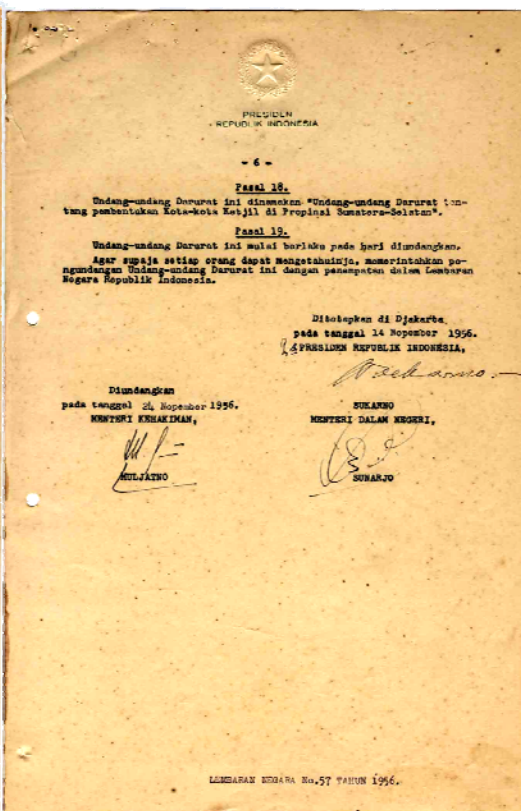
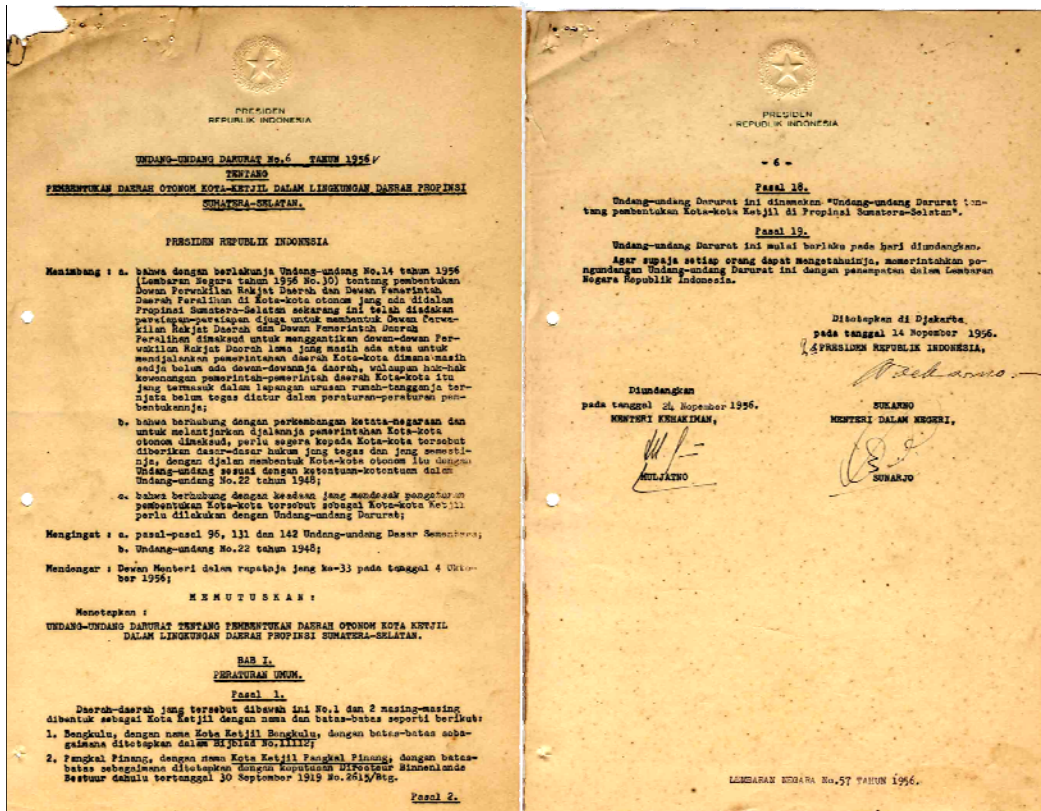
**Pasal 1.**

Daerah-daerah yang tersebut dibawah ini No.1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Besar dengan nama dan batas-batas seperti berikut :

1.

  
 SUKARNO  
 MENTERI DALAM NEGERI,  
  
 SUNARJO  
 TAHUN 1956.

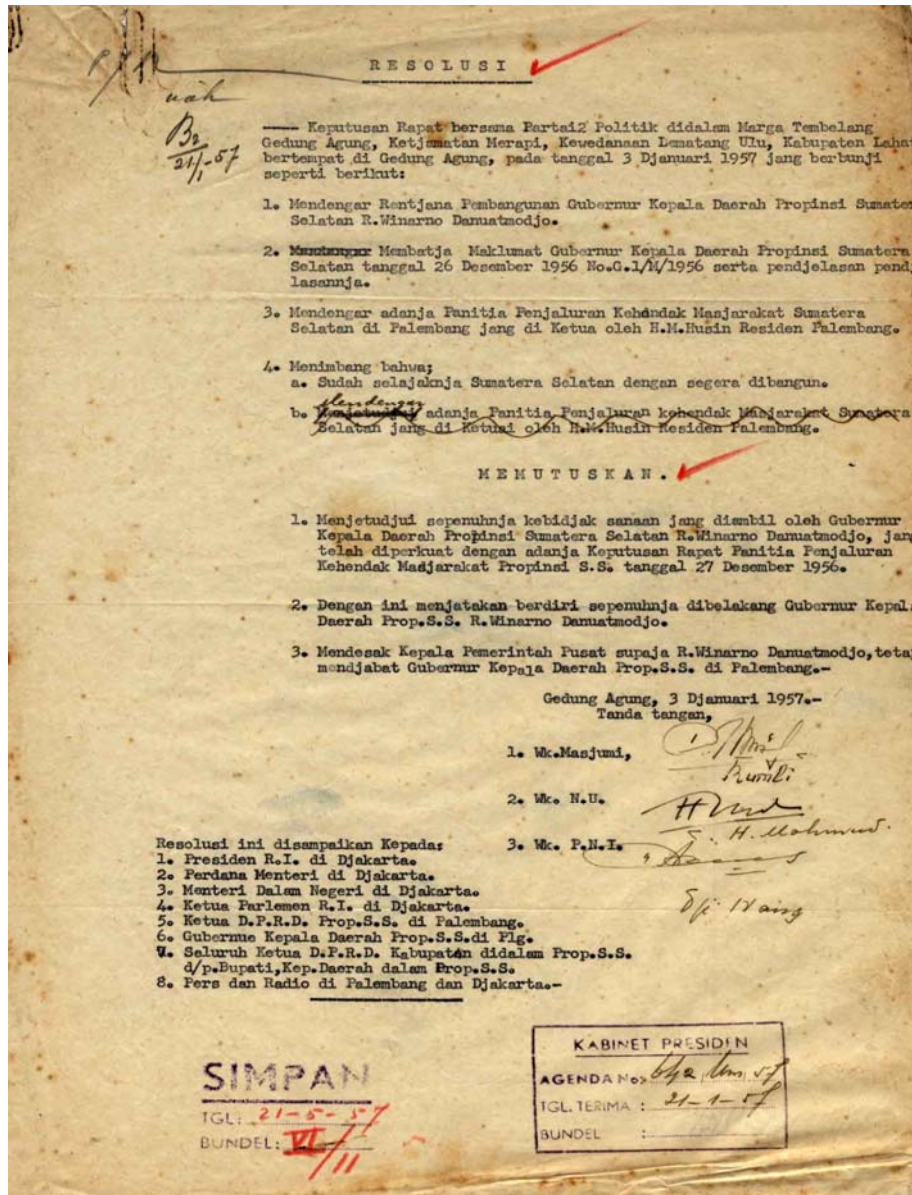
Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  
 14 November 1956  
 ANRI: Sekretaris Kabinet UU Darurat No. 131



Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

14 November 1956

ANRI: Sekretaris Kabinet UU Darurat No. 132



Resolusi Keputusan Rapat Bersama Partai-partai Politik Marga Tembelang Gedung Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tentang dukungan kepada kebijaksanaan Gubernur Sumatera Selatan R. Winarno Danuatmodjo.

3 Januari 1957

ANRI: Kabinet Presiden No. 898.



Upacara pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

5 Juni 1958

ANRI: Kempen Nomor 1



Upacara Timbang terima Jawatan Lalulintas Darat Pusat kepada  
Daerah Otonom Swatantra Tingkat I Sumatera Selatan  
di Palembang.

2 Oktober 1958

[ANRI: Kempen Nomor 581002/1](#)



Pawai dan rapat raksasa mendukung ide kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dilapangan Mohammad Hatta Palembang.  
17 April 1959

[ANRI: Kempen 590417 DD 1](#)

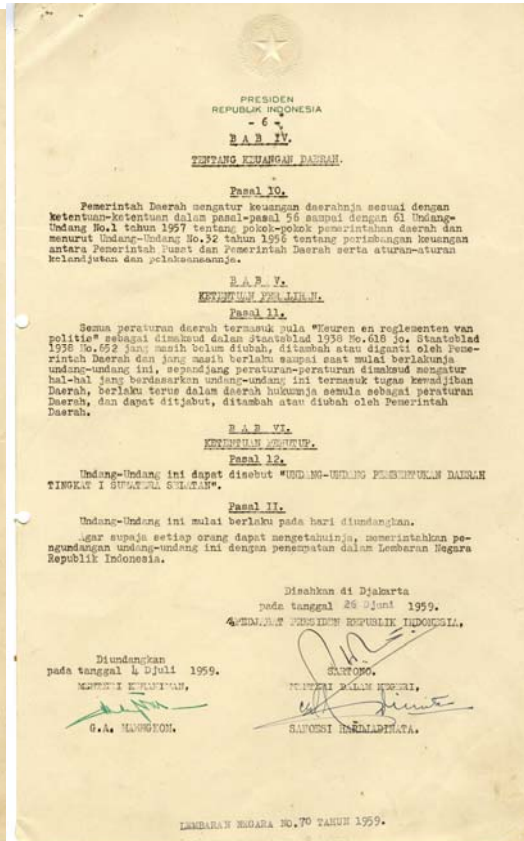
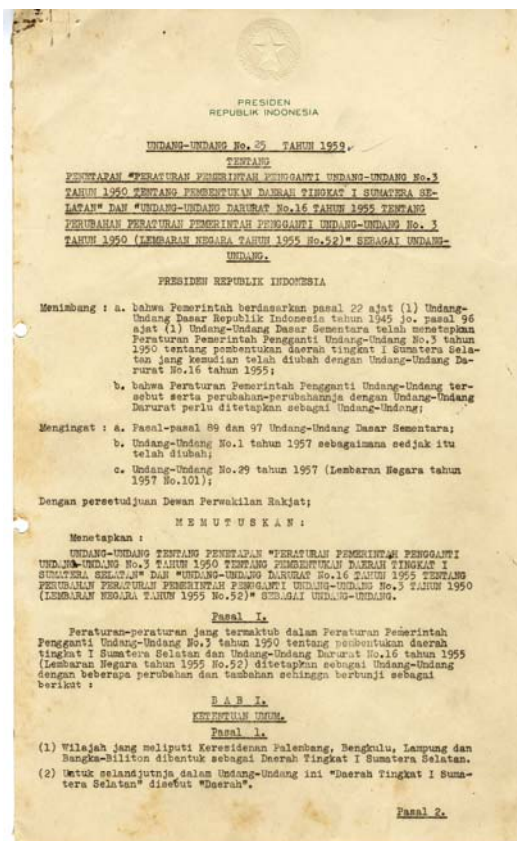




Mayor Jendral Bambang Utoyo mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Panglima Teritorial II/Sriwijaya mendapat Lencana Tentara Pembebasan Republik Rakyat Cina, disematkan oleh Jendral Yang Cheng Wu.

10 Mei 1959

[ANRI: Kempen 590510 DD 4](#)



Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) menjadi Undang-Undang, 26 Juni 1959

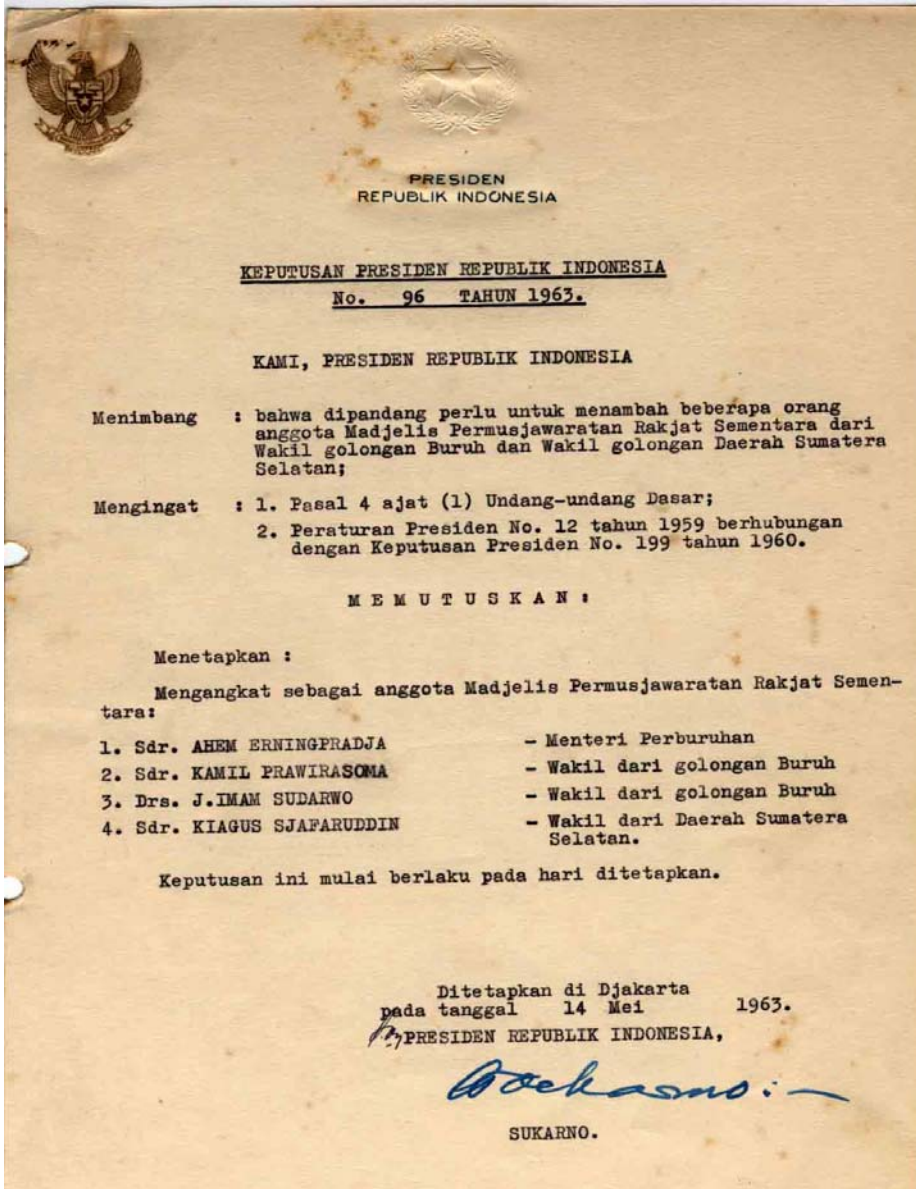
ANRI: Sekretaris Kabinet UU Tahun 1959



Presiden Soekarno disambut oleh Panglima Teritorial II/Sriwijaya Kolonel Harun Sohor di bandar udara Talang Batutu, dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Sumatera Selatan.

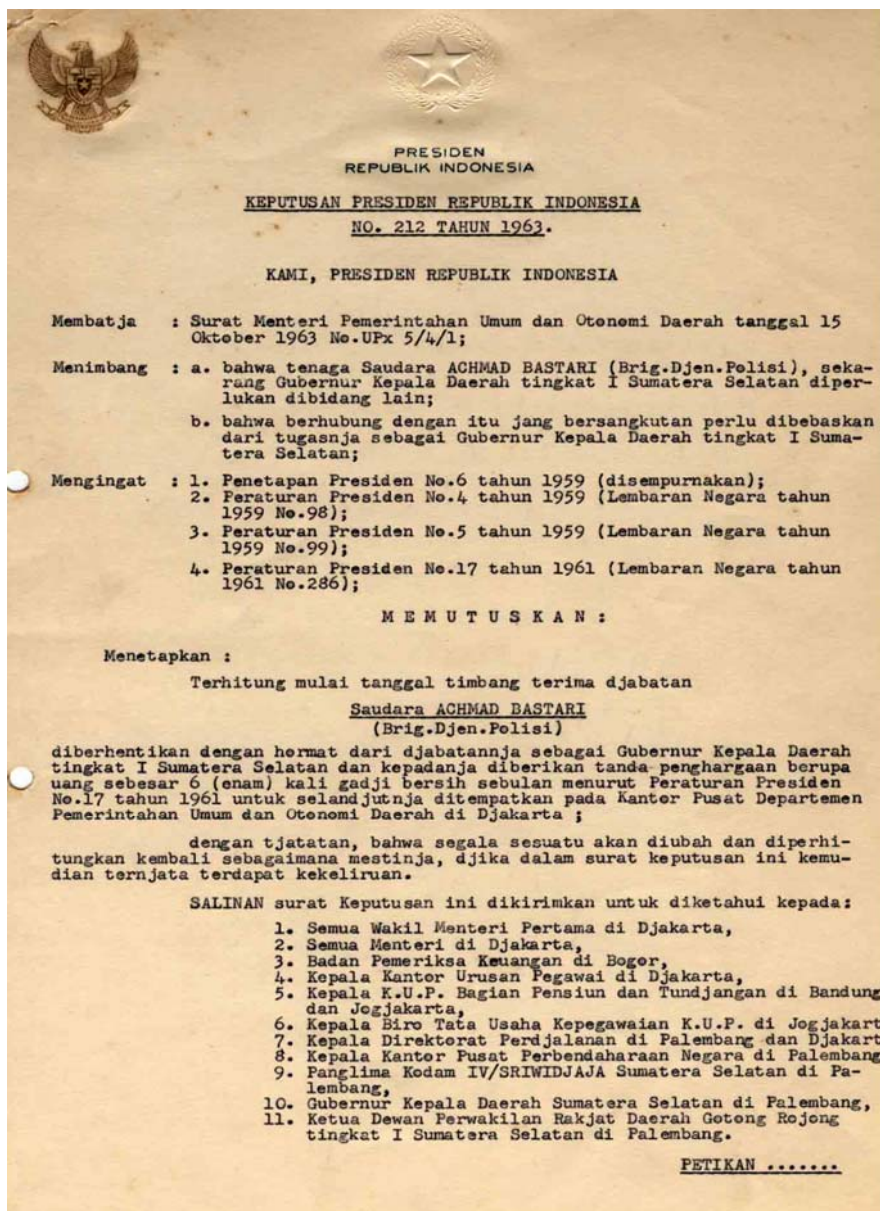
3 November 1960

[ANRI: Kempen 601103 DD 14](#)



Keputusan Presiden RI Nomor 96 tahun 1963 tentang  
Pengangkatan Kiagus Syafaruddin Sebagai Anggota MPRS  
Wakil dari Daerah Sumatera Selatan,  
14 Mei 1963

ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1963



Bagian awal dari Keputusan Presiden RI Nomor 212 tahun 1963 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Brigadir Jenderal Polisi Achmad Bastari Sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 16 Oktober 1963.

ANRI: Sekretaris Kabinet KeppresTahun1963



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 306 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Nopember 1964 No.UFx 12/1/49;
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rejong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 29 September 1964 No.23/ DPRD-GR/64;
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan kelantjaran djalannja pemerintahan perlu segera mengisi lowongan djabatn Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan jang terjadi berhubung dengan pemberhentian pendjabatnja jang lama Saudara Achmad Bastari dengan hormat dari djabatannja sebagai Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan, jang ditetapkan dengan surat Keputusan Kami tanggal 16 Oktober 1963 No.212 tahun 1963;
- b. bahwa Saudara HADJI ABU JAZID BUSTOMI, Brigadir Djenderal T.N.I./Pembantu Menteri Urusan Pengawasan dan Pembinaan pada Departemen Dalam Negeri jang dengan Keputusan Kami tanggal 10 Desember 1963 No.345/M tahun 1963 diangkat sebagai Pendjabat Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I, sehingga jang bersangkutn dapat diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- c. bahwa berhubung dengan perkembangan daerah perlu mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah untuk Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- d. bahwa Saudara MOHD. ALI AMIN S.H., Pegawai Tinggi-ketatapra djaan tingkat I pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah dimaksud;
- e. bahwa berhubung dengan penangkatan tersebut pada sub b dan d diatas, Saudara Hadji Abu Jazid Bustomi tersebut perlu diberhentikan dari djabatannja sebagai Pendjabat Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Pembantu Menteri Urusan Pengawasan dan Pembinaan pada Departemen Dalam Negeri dan Saudara Mohd. Ali Amin S.H. dinon-aktipkan sebagai pegawai Negeri selama menjalankan kewajiban Negara sebagai Wakil Kepala Daerah Tingkat I tersebut;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran Negara tahun 1959 No.129) jo Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 11);
2. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 98);
3. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
4. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

MEMUTUSKAN ....

Bagian awal dari Keputusan Presiden RI Nomor 306 tahun 1964 tentang Pemberhentian H. Abu Jazid Bustomi sebagai penjabat Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan mengangkat H. Abu Jazid Bustomi dan Ali Amin, SH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

27 November 1964

ANRI: Sekkab Keppres Tahun 1964



Parlemen Jepang diketuai Tokuma Utsunomya melakukan kunjungan persahabatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Sumatera Selatan di Palembang.

9 Mei 1965

ANRI: Kempen 65-4071



Rapat Umum dengan slogan "Ganyang Pangkalan Militer Asing"  
di Palembang, Sumatera Selatan.

19 September 1965

[ANRI: Kempen 650919-SS-1](#)



# KEAGAMAAN



Patung-patung peninggalan Kebudayaan Hindu di Bumi Agung  
Pagar Alam, Sumatera Selatan,  
[± 1930]  
[ANRI: KIT 128/2](#)



Klenteng orang Cina Palembang, Sumatera Selatan  
[± 1930]  
ANRI: KIT 791/63



Salah satu gereja di Palembang, Sumatera Selatan,  
[± 1930]  
ANRI: KIT 1099/24



Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15  
oleh Sultan Machmud Badaruddin II,  
25 Agustus 1950  
[ANRI: Kempen 50586](#)



Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15  
oleh Sultan Machmud Badaruddin II,  
19 April 1951  
[ANRI: Kempen 512294](#)



Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, setelah renovasi dengan perluasan masjid di belakang masjid utama.

18 Desember 2008

ANRI: PNSAP Sumsel 1

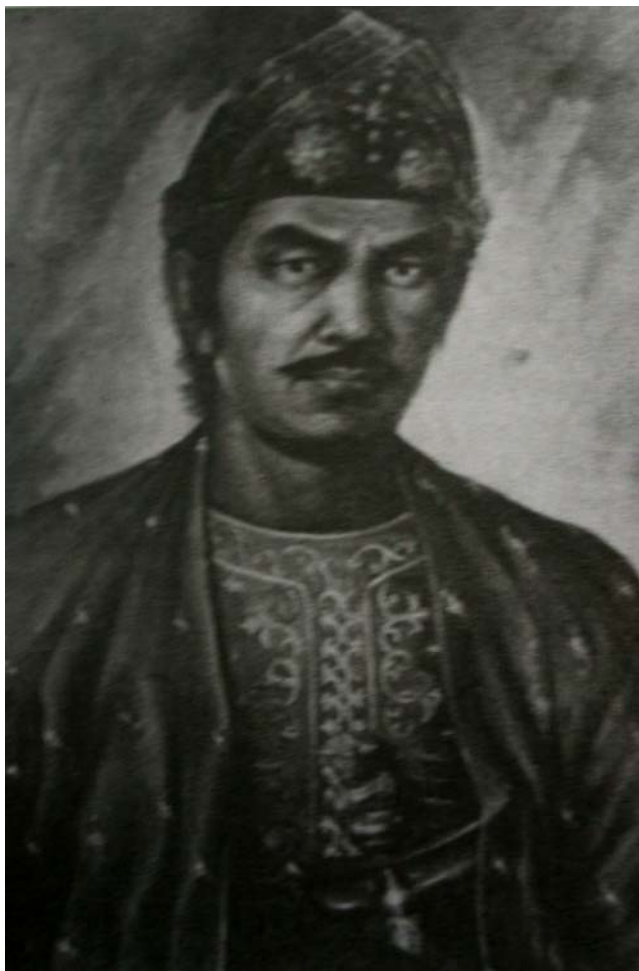


Masjid di tempat penyaringan minyak  
di Sungai Gerong, Sumatera Selatan,  
16 Desember 1953

ANRI: [Kempen K 531216 DD 1](#)



# PENDIDIKAN



Gambar resmi Sultan Palembang Mahmud Badaruddin II, salah satu Pahlawan Nasional yang berasal dari Sumatera Selatan,  
[ANRI: Buku Pahlawan Nasional Indonesia](#)



Amanat tertulis Presiden kepada para pelajar di Prabumulih,  
dalam rangka kunjungan Presiden ke Sumatera Selatan.

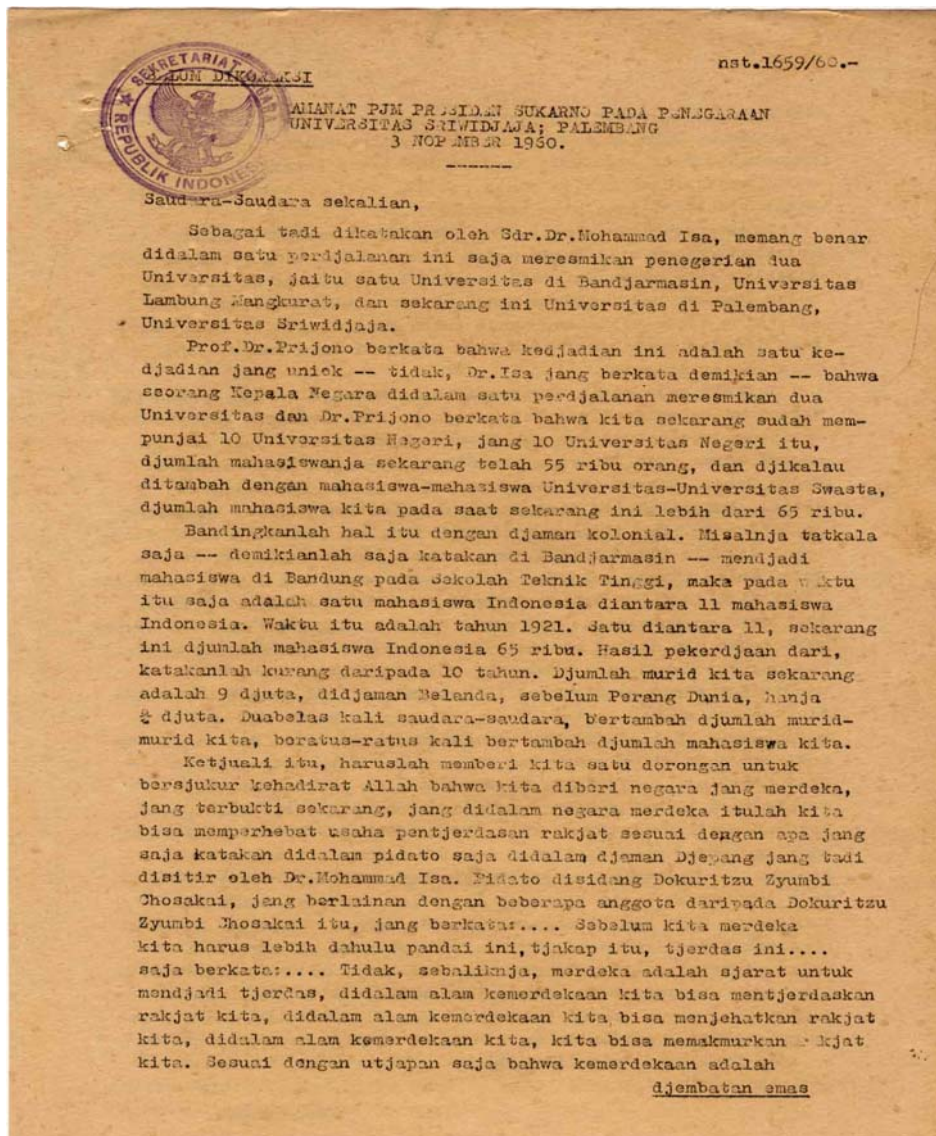
16 Nopember 1952

ANRI: Kempen 521117 DD15



Presiden Soekarno menandatangani piagam peresmian  
Universitas Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan,  
disaksikan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan  
(PPK) Prof. Prijono  
3 Nopember 1960

ANRI: Kempen 601103 DD 35



Bagian awal dari amanat Presiden Soekarno pada peresmian status negeri terhadap Universitas Sriwijaya Palembang, 3 November 1960  
ANRI: Pidato Presiden 236



Gedung Universitas Negeri Sriwijaya di Palembang,  
Sumatera Selatan.

3 Nopember 1960

ANRI: Kempen 601103 DD 40



Peluncuran roket "Pramuka Sriwijaya I" di Km 19,  
Palembang, Sumatera Selatan.

16 Mei 1965

ANRI: Kempen 65-0516-1



Ir. Sadono (memegang *microphone*) adalah perancang roket  
"Pramuka Sriwijaya I" menjelaskan kepada Panglima Kodam IV/  
Sriwijaya Brigadir Jenderal Makmun Murod,

16 Mei 1965

ANRI: Kempen 65-0516-4





Gubernur Sumatera Selatan Brigadir Jenderal TNI HAJ. Bustomi,  
Jaksa Tinggi Sugiarto SH., dan Panglima Daerah Militer IV/  
Sriwijaya Brigadir Jenderal Makmun Murod pada saat  
peluncuran roket "Pramuka Sriwijaya I".

16 Mei 1965

[ANRI: Kempen 65-0516-5](#)

# KEBUDAYAAN dan PARIWISATA



Pakaian adat gadis dari Muara Lakitan, Sumatera Selatan,  
[± 1930]  
ANRI: KIT 399/20



Tari Gending Sriwijaya, menyambut kedatangan Presiden Soekarno  
di Palembang, Sumatera Selatan.

30 November 1950

[ANRI: Kempen 501129](#)



Presiden dengan para penari Gending Sriwijaya, Palembang,  
Sumatera Selatan.  
30 November 1950  
[ANRI: Kempen 501130](#)



Para gadis berpakaian khas adat Palembang yang menari  
Tari Gending Sriwijaya.  
30 November 1950  
[ANRI: Kempen 50597](#)



Tari Menumbuk Padi, Palembang, Sumatera Selatan,  
30 November 1950

ANRI: [Kempen 501167](#)



Gubernur Sumatera Selatan Dr. Mohammad Isa meninjau pameran "Indonesia Maju", di Palembang, Sumatera Selatan. 1951

ANRI: Kempen 515585





Bupati Lahat meninjau pameran "Indonesia Maju",  
di Palembang, Sumatera Selatan.

1951

ANRI: Kempen 515296



Mempelai Wanita, pada Perkawinan adat Sumatera Selatan,  
4 Agustus 1951

ANRI: Kempen K 510804 DD 1



Profil perempuan dengan pakaian khas di Kayu Agung,  
Sumatera Selatan,  
12 Desember 1953

ANRI: Kempen K 531212 DD 1-5



Wakil Presiden Mohammad Hatta menerima persembahan dari perwakilan masyarakat Lubuk Lingau berupa "*Dempa Cantelan*" yang terbuat dari tanduk kerbau,

8 Juli 1954

ANRI: Kempen 540708 DD 1



Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama para Penari  
Gending Sriwijaya, dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden  
ke Sumatera Selatan

12 Juli 1954

ANRI: [Kempen 540712 DD 26](#)



Wakil Presiden Mohammad Hatta melihat – lihat hasil kerajinan rakyat di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Juni 1957  
ANRI: Kempen 570626 DD 3



Pejabat Presiden Sartono mendapat cendera mata  
sebuah tongkat gading dari Masyarakat Sumatera Selatan  
di Palembang,  
28 Mei 1959

ANRI: [Kempen 590528 DD 2](#)



Pejabat Presiden Sartono bersama para penari  
Gending Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan,  
28 Mei 1959

[ANRI: Kempen 590528 DD 24](#)





Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati disambut dengan tarian  
adat, ketika tiba di rumah Gubernur Sumatera Selatan  
di Palembang,  
9 Nopember 1954  
[ANRI: Kempen 541109 DD 9](#)



Presiden Soekarno memukul gong untuk mengiringi tarian menyambut kedatangan Presiden Soekarno di halaman Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, 9 Nopember 1954  
[ANRI: Kempen 541109 DD 13](#)



Benteng Kuto Besak di Palembang, Sumatera Selatan pada malam hari, merupakan salah satu peninggalan jaman kolonial yang saat ini digunakan sebagai asrama tentara anggota Komandao Daerah Militer II/Sriwijaya,  
12 Desember 2008  
[ANRI: PNSAP Sumsel 2](#)



Museum Sultan Mahmud Badaruddin II yang terletak berdekatan  
dengan Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak  
di Palembang, Sumatera Selatan,  
12 Desember 2008  
[ANRI: PNSAP Sumsel 3](#)

# **PEREKONOMIAN dan PERDAGANGAN**



Surat Sultan Ratu Ahmad Nadjamudin dari Palembang kepada Komisararis Jenderal van der Capellen mengenai kesepakatan perdagangan.

7 April 1823 (13 Rajab 1238 H)

ANRI: Surat Emas No. 18 (Palembang 15)



Kampung eksplorasi minyak di Plaju, Palembang,  
Sumatera Selatan.

[±1920]

*ANRI: KIT 471/20*



Kapal-kapal dagang tradisional di Sungai Musi,  
Palembang, Sumatera Selatan.

[± 1930]

*ANRI: KIT 536/43*

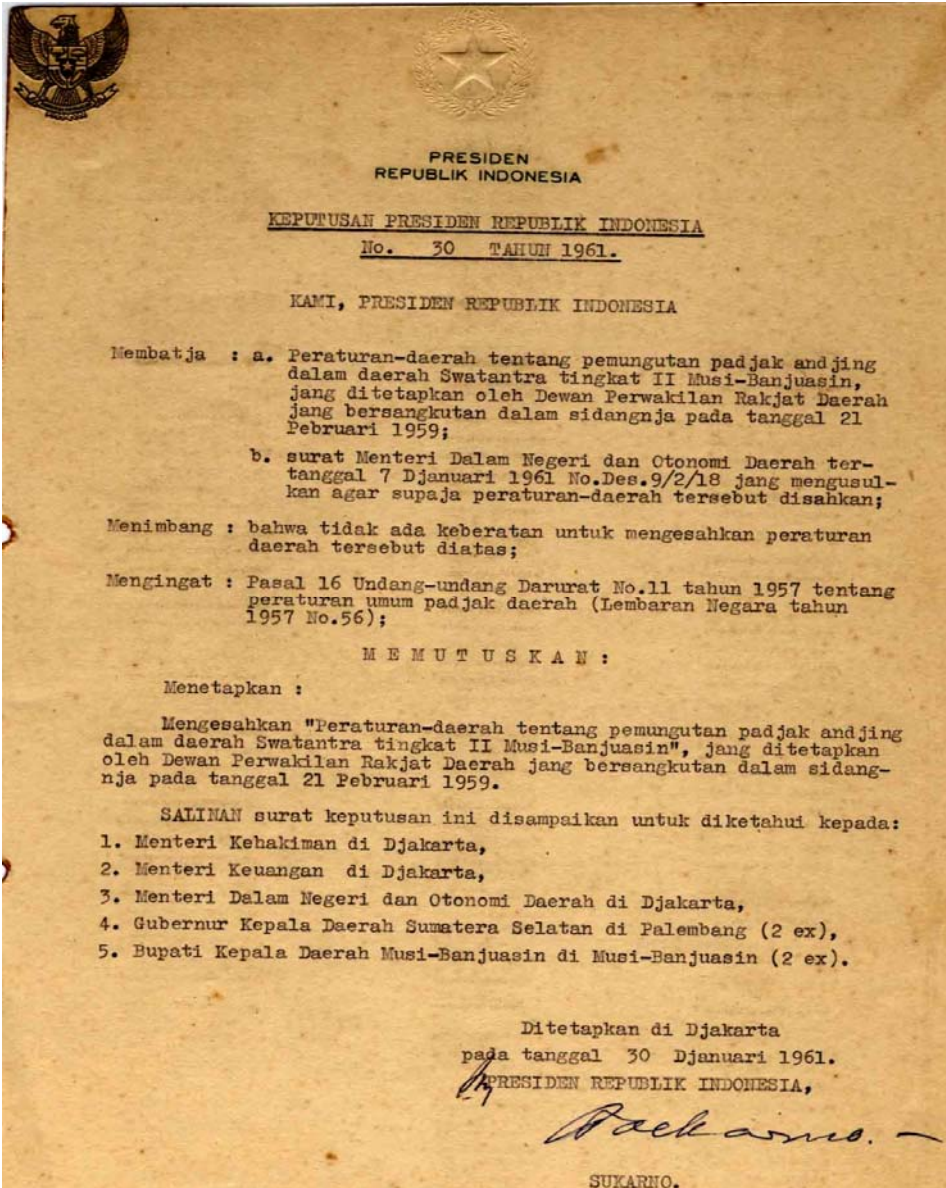




Warung-warung diatas Sungai Musi, Palembang,  
menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

31 Agustus 1950

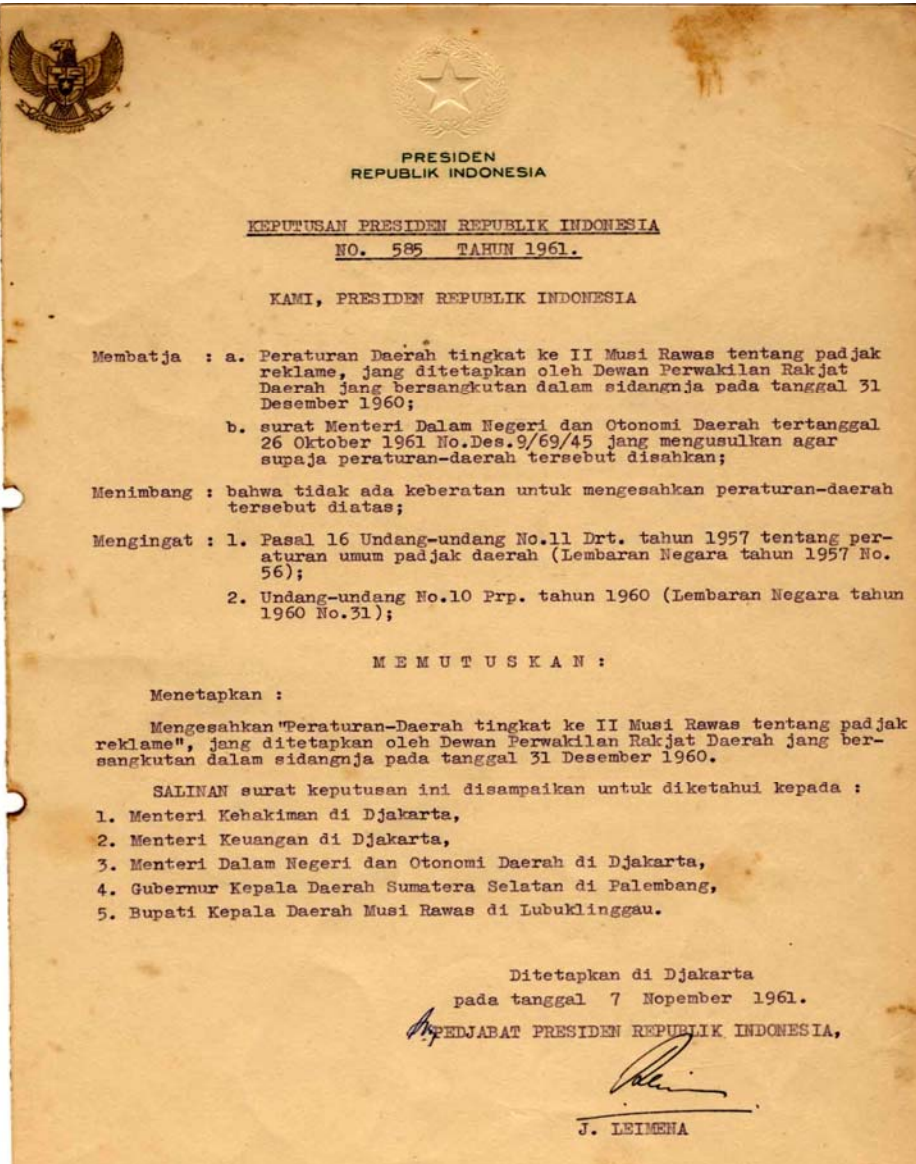
ANRI: Kempen 50620



Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin yang ditetapkan oleh DPRD yang bersangkutan dalam sidangnya tanggal 21 Pebruari 1959.

30 Januari 1961

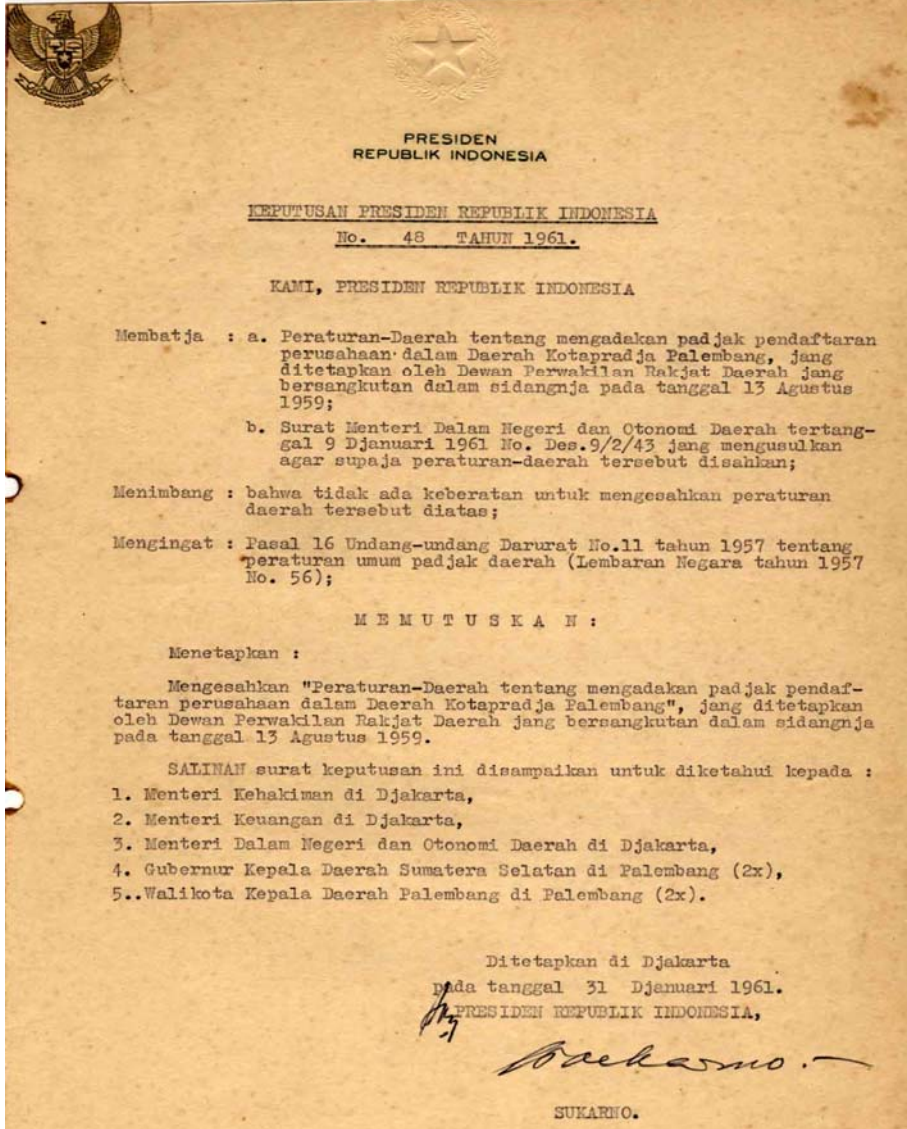
ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961



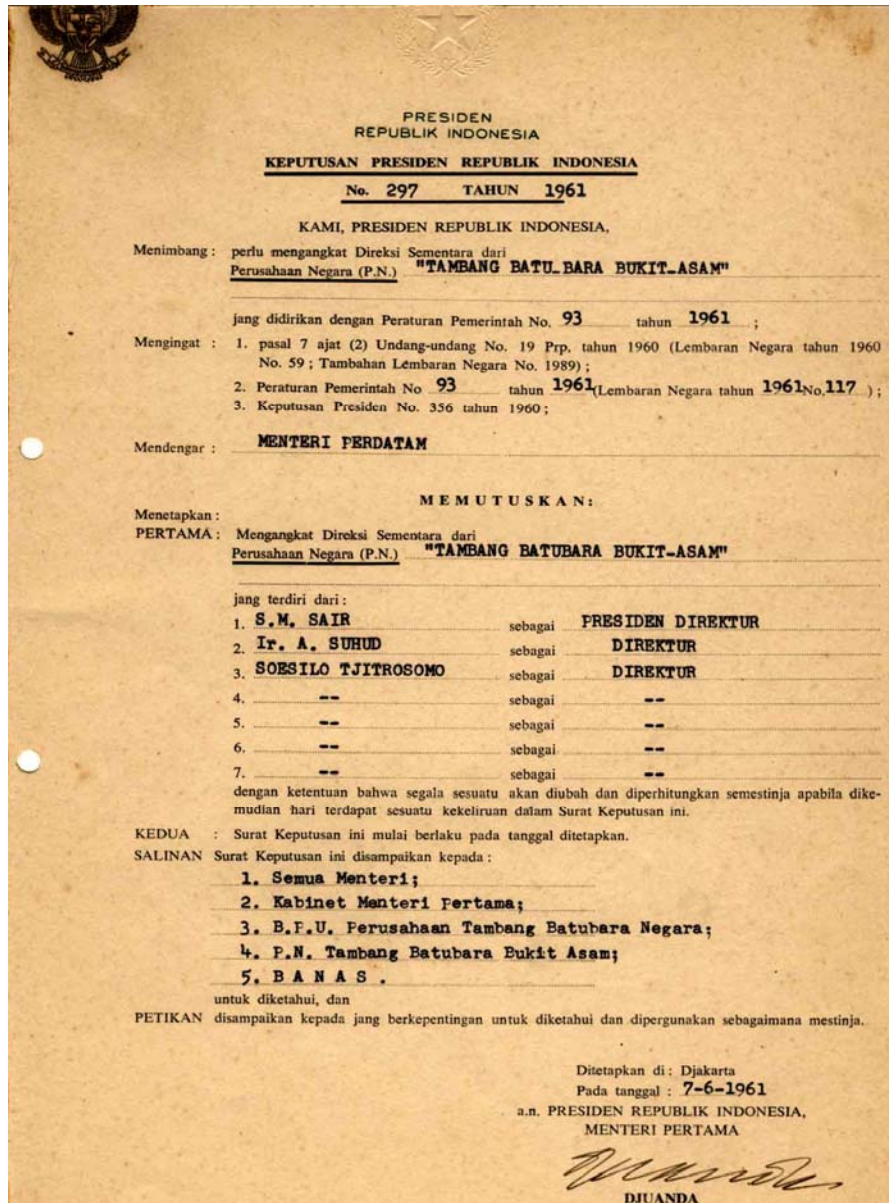
Keputusan Presiden RI Nomor 585 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan-Daerah Tingkat II Musi Rawas mengenai pajak reklame yang ditetapkan oleh DPRD yang bersangkutan dalam sidangnya tanggal 31 Desember 1960.

7 November 1961

ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961

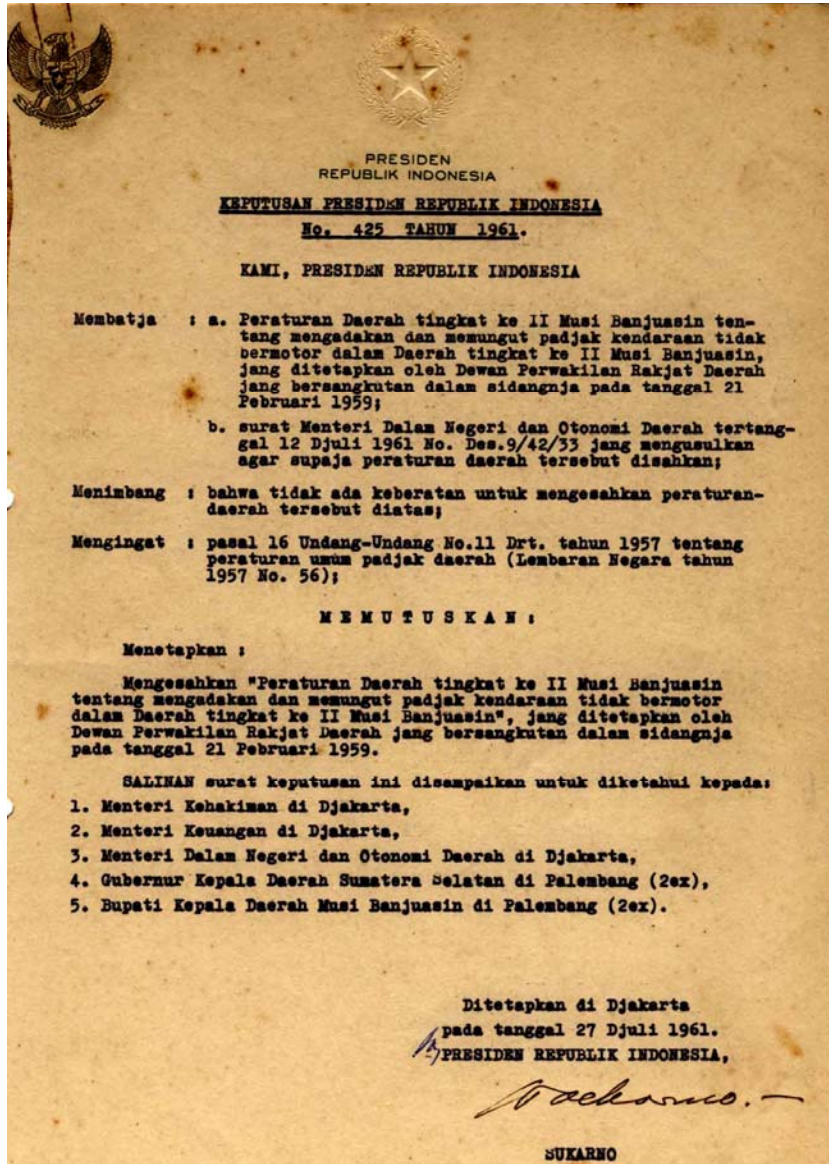


Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam Daerah Kotapraja Palembang yang ditetapkan oleh DPRD yang bersangkitan tanggal 13 Agustus 1959.  
31 Januari 1961  
ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961



Keputusan Presiden RI Nomor 297 Tahun 1961 tentang  
Pengangkatan Direksi Sementara PN Tambang Batubara,  
Bukit Asam, Sumatera Selatan,  
7 Juni 1961

ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961



Keputusan Presiden RI Nomor 425 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan Daerah tingkat ke II Musi Banyuasin tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang ditetapkan oleh DPRD yang bersangkutan.

27 Juli 1961

ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres tahun 1961



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 570 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang pemungutan pajak tontolan umum dalam Daerah tingkat ke II Musi Rawas, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 31 Desember 1960;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 20 September 1961 No. Des.9/60/26 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-Undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);  
2. Undang-Undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tentang pemungutan pajak tontolan umum dalam Daerah tingkat ke II Musi Rawas", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 31 Desember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang ( 2 ex ),
5. Bupati Kepala Daerah Musi Rawas di Lubuklinggau ( 2 ex ).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Oktober 1961.  
REDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

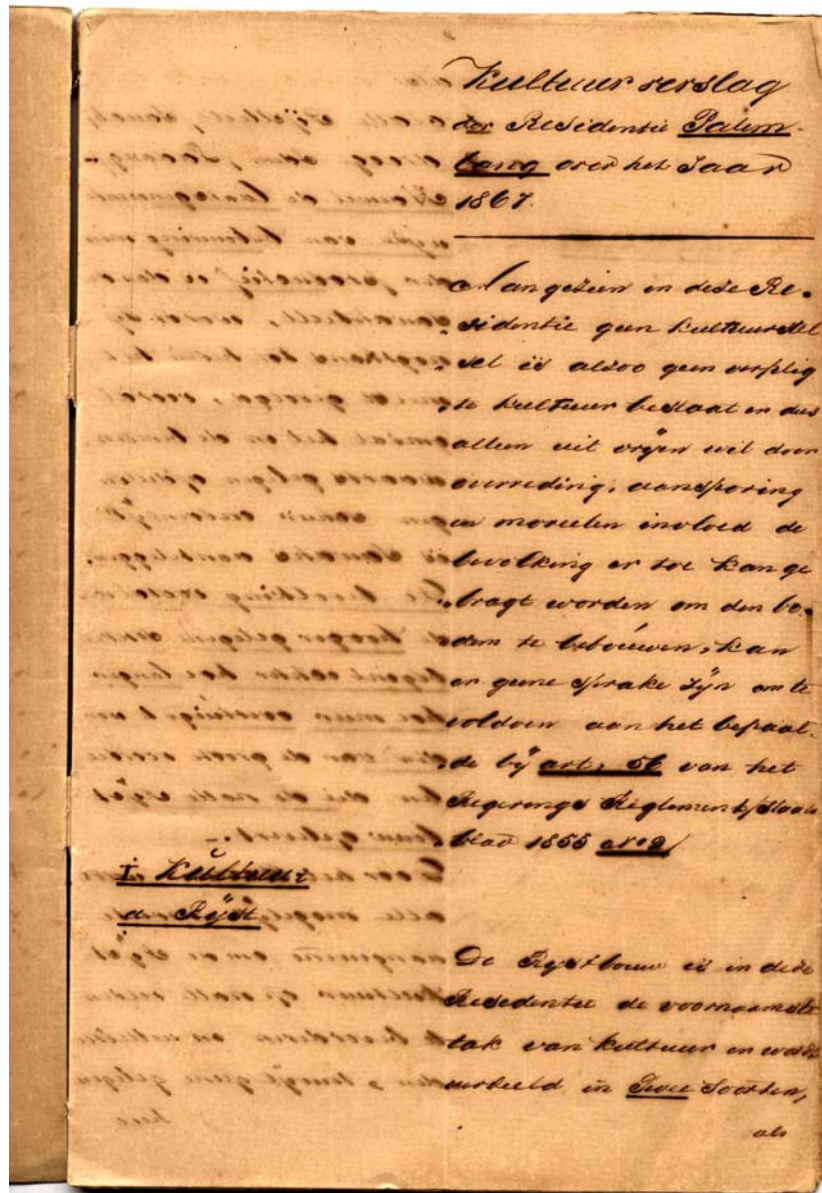
J. LEIMENA.

Keputusan Presiden RI Nomor 570 Tahun 1961 tentang  
Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pemungutan Pajak  
Tontolan Umum dalam Daerah Tingkat II Musi Rawas.  
24 Oktober 1961

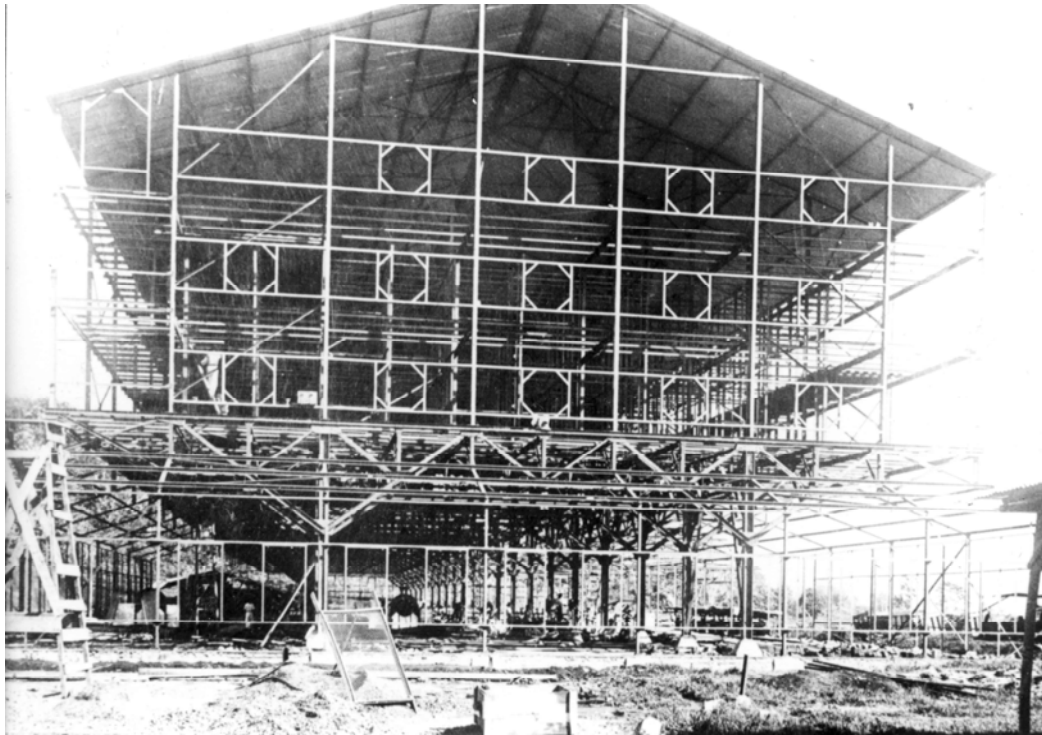
ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961

# **PERTANIAN, PERKEBUNAN dan PETERNAKAN**





Bagian awal laporan Residen Palembang Tahun 1867  
tentang Perkebunan.  
31 Oktober 1868  
ANRI: Palembang 64.9



Pembangunan Pabrik Teh Gunung Dempo, Sumatera Selatan  
[± 1930]  
ANRI: KIT 601/9



Tanaman Lamtoro dan kopi Robusta di Pasemah, Palembang,  
Sumatera Selatan.

[±1930]

ANRI: KIT 609/4

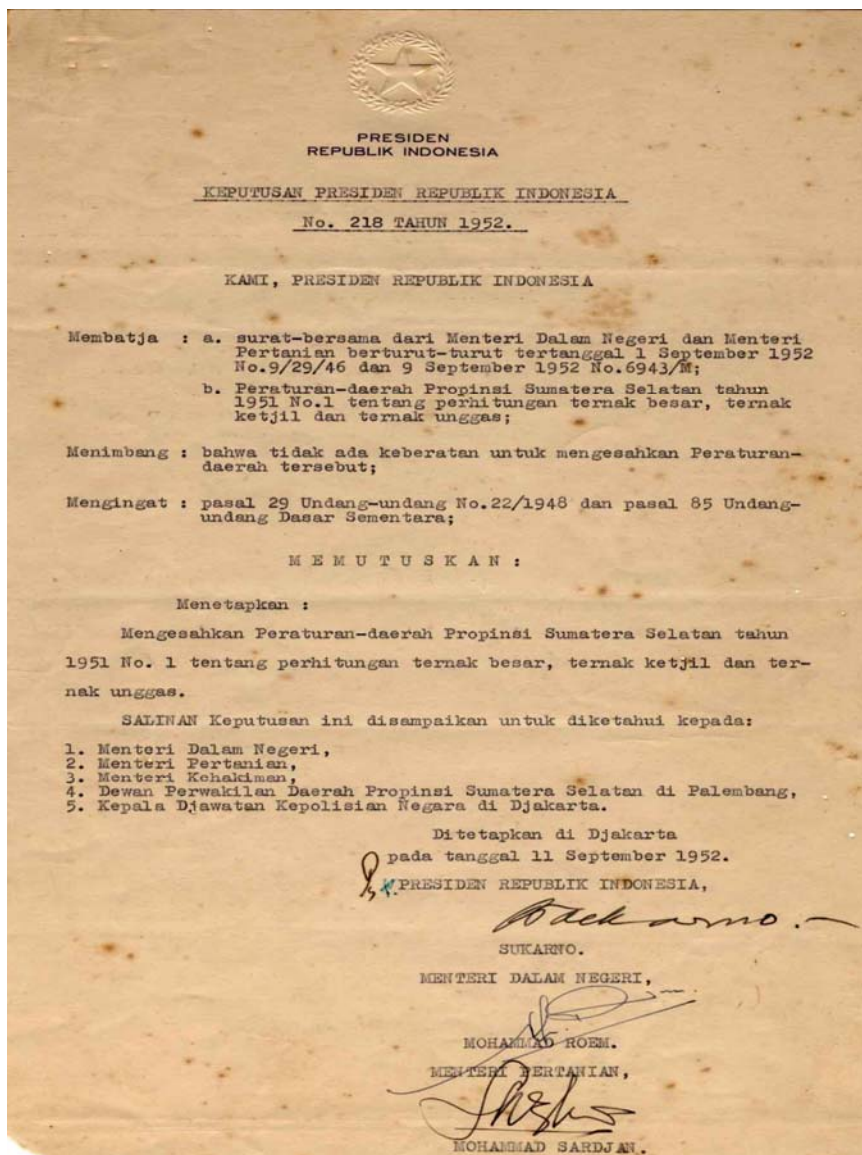


Rotan hasil hutan diangkut dengan kapal motor di Sungai Musi,  
Palembang, Sumatera Selatan,  
19 April 1951  
[ANRI: Kempen 512296](#)



Pembutan sagu aren di Selat Panjang, Sumatera Selatan,  
28 Juli 1951

ANRI: Kempen 516628



Keputusan Presiden RI Nomor 218 Tahun 1952 tentang  
Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor  
1 Tahun 1951 tanggal 29 Desember 1951 tentang Perhitungan  
Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Ternak Unggas,  
11 September 1952  
[ANRI: Sekkab Keppres 630](#)



UNDANGAN PJM PRESIDEN PADA PERESMIAN PEMANTJANGAN DASAR  
PABRIK PUPUK DI PALEMBANG SUMATERA SELATAN PADA TG. 4 NOPEMBER 1960.

Saudara-Saudara sekalian,

Tidak salah saja memerintahkan kepada Menteri Chaerul Saleh untuk memberi penerangan dan keterangan setjukupnja mengenai pabrik Pupuk ini. Sekarang keadaan sudah mendjadi lebih terang dan djelas, baik kepada kita semuanya, maupun kepada pihak Amerika jang responsible pula mengenai execution daripada pabrik Pupuk ini.

Saudara-Saudara, sekarang saja diminta mengadakan sedikit wedjangan, demikian kata seorang announcer tadi.

Di djaman Belanda Saudara-Saudara, ada satu trilogi pembangunan. Pada waktu imperialisme Belanda mau berusaha berkembang biak, terutama sekali dibidang ekonomi di Indonesia, pada waktu itu diadakan oleh satu golongan jang berpengaruh satu trilogi: edukasi, irigasi, migrasi.

Dukasi: berilah pendidikan, peladjaran, sekolah-sekolah lebih banjak kepada bangsa Indonesia.

Dua: irigasi, adakanlah pengairan sebanjak mungkin.

Ketiga: imigrasi, pindahkanlah sebagian daripada rakjat di pulau Djawa itu ke pulau lain.

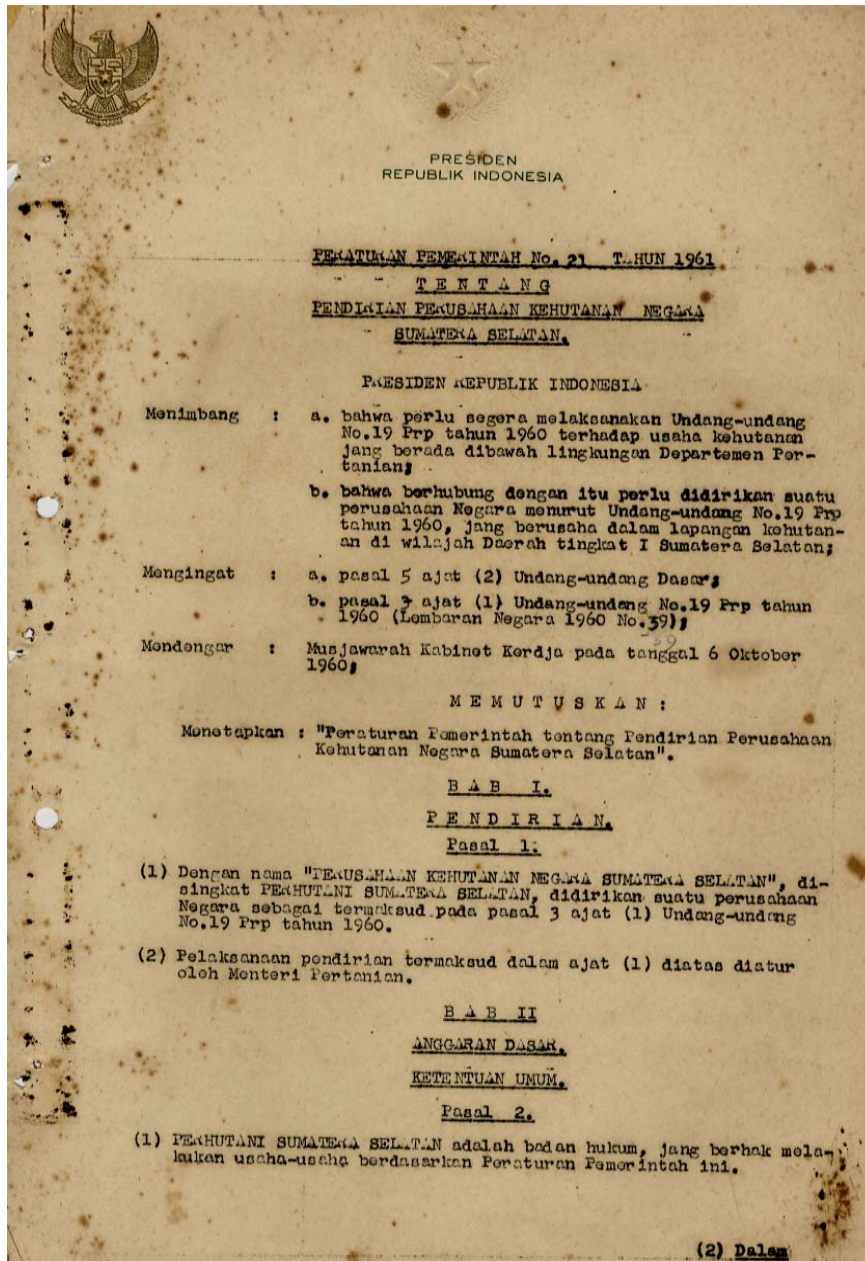
Pernah saja djelaskan bahwa timbulnja haluan baru didalam politik kolonial Belanda, "de nieuwe richting in de koloniale politiek" jang ingeluid oleh Mr. C. Th. van Deventer, pada pokok dan hakekatnja ialah satu pemenuhan daripada kebutuhan-kebutuhan imperialisme, terutama sekali imperialisme ekonomi daripada pihak Belanda. Sembojan ini memang muluk Saudara-Saudara, dan starting point daripada sembojan-sembojan ini ialah kemiskinan jang ternjata mendjalar di tanah Djawa, terutama sekali di Djawa Tengah bagian Utara, jang tiap-tiap tahun Djawa Tengah bagian Utara tetapi djuga Djawa Timur diserang oleh bahaja kelaparan, sehingga perlu diselidiki.

Apa sebabnja ini tiap-tiap tahun bahaja kelaparan mengamuk, ratusan, ribuan, bahkan pernah setengah djuta manusia mati didalam satu bahaja kelaparan, satu famine di Djawa Tengah? Diselidiki dan sudah diselidiki dikasihkan remedi, dikasihkan obat. Obatnja ialah ini, trilogi. Mr. van Deventer jang berkata kepada pihak Belanda bahwa djikalau pihak Belanda memang ingin membajar hutang budi kepada bangsa Indonesia -- dinamakan olehnja hutang budi oleh karena Mr. van Deventer berpendapat bahwa pihak Belanda berhutang budi kepada bangsa Indonesia, pihak Belanda jang mengambil kekajaan daripada Indonesia tiap-tiap tahun sekian, sekian, sekian, sekarang sudah

Bagian awal Pidato Presiden Soekarno pada peresmian pemancangan dasar Pabrik Pupuk di Palembang, Sumatera Selatan.

4 November 1960

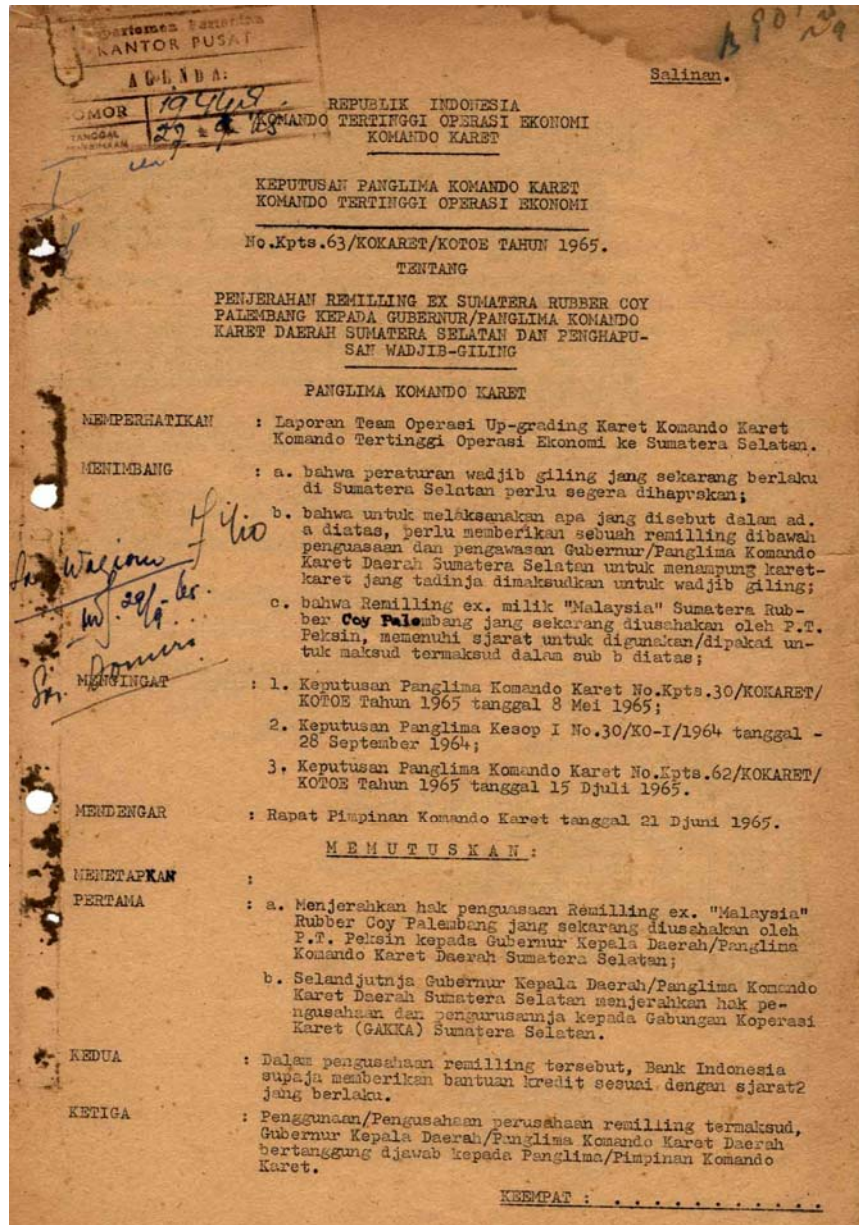
ANRI: Pidato Presiden 237



Bagian awal dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961  
tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara,  
di Sumatera Selatan,  
1961

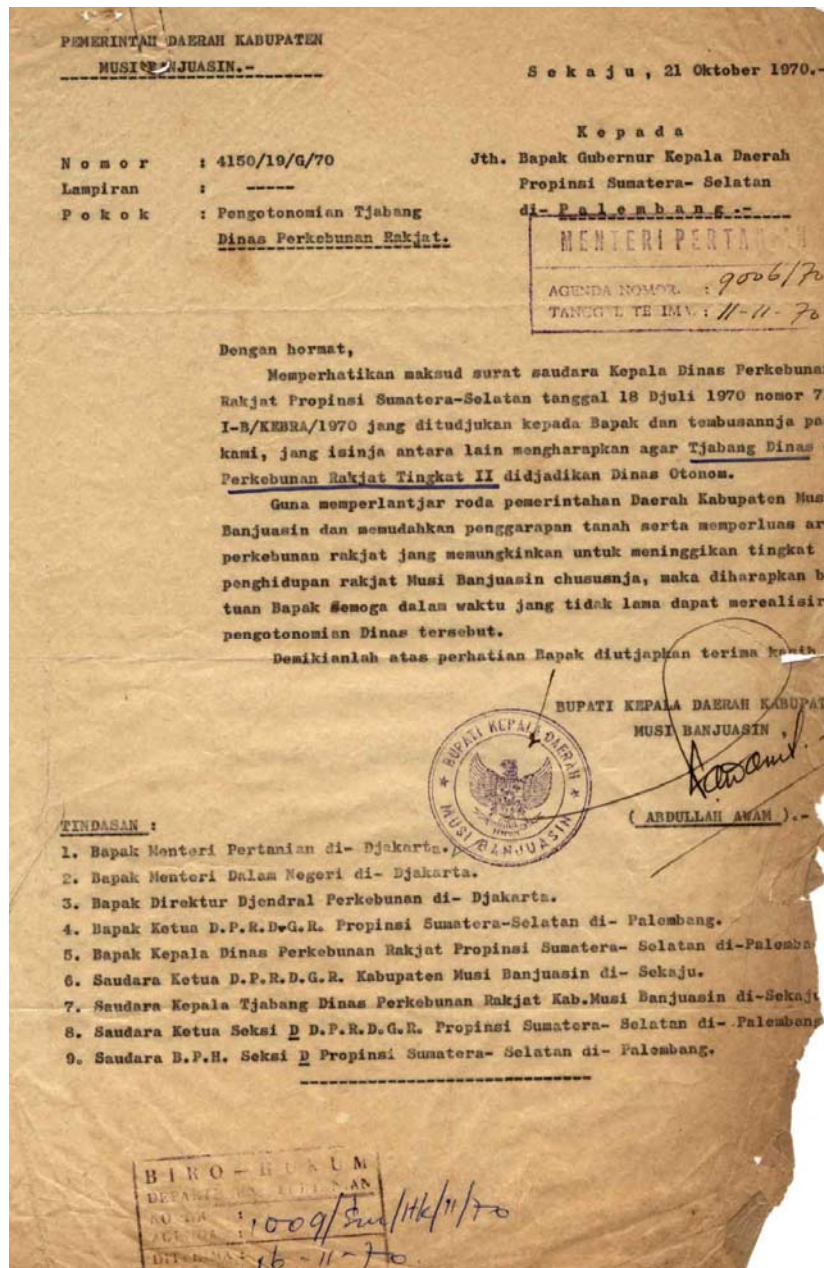
ANRI: Sekretaris Kabinet PP Tahun 1961





Bagian awal dari Keputusan Panglima Komando Karet/Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tentang penyerahan *remilling ex Sumatera Rubber coy* Palembang kepada Gubernur/Panglima Komando Karet Daerah Sumatera Selatan, 15 Juli 1965

ANRI: Kementerian Pertanian 431



Surat dari Bupati Musi Banyuasin kepada Gubernur Sumatera Selatan tentang Permohonan untuk Menjadikan Cabang Dinas Perkebunan Rakyat Tingkat II menjadi Dinas Otonom.

21 Oktober 1970

ANRI: Kementerian Pertanian 452

# INFRASTRUKTUR



Bangunan induk Rumah Sakit di Tambang Bukit Asam,  
Sumatera Selatan.

[±1930]

ANRI: KIT 483/48



Jalan raya utama di Palembang, Sumatera Selatan,  
[±1930]

*ANRI: KIT 760/27*



Jalan Tengkuruk di Palembang, Sumatera Selatan,  
[±1930]  
ANRI: KIT 761/66



Jalan dari Palembang menuju Pagar Alam,  
Sumatera Selatan,  
[±1930]  
ANRI: KIT 511/80



Kantor Gubernur Sumatera Selatan di Palembang,  
25 Agustus 1950.

ANRI: Kempen 50559





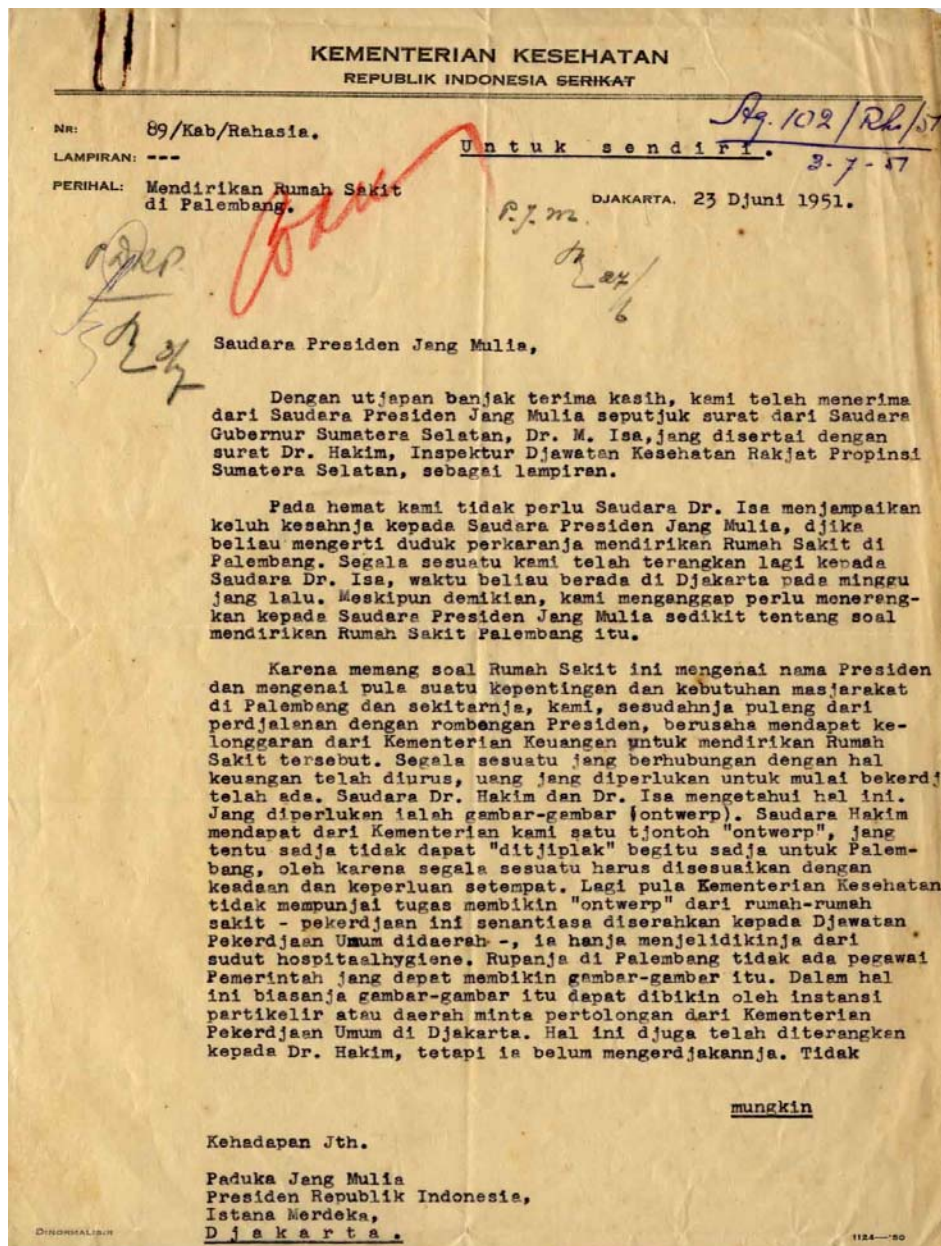
Menara tempat persediaan air minum di Palembang, sekarang  
menjadi Kantor Walikota Palembang.

25 Nopember 1950

[ANRI: Kempen 50585](#)



Rumah-rumah penduduk di tepi Sungai Musi, Palembang.  
19 April 1951  
ANRI: [Kempen 512493](#)



Surat dari Menteri Kesehatan kepada Presiden RI tentang  
pendirian rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan,  
23 Juni 1951

ANRI: Kabinet Presiden 634



Gubernur Sumatra Selatan DR. Mohammad meresmikan  
pembukaan Dam "Tanah Mas"

10 Oktober 1952

ANRI: Kempen 521006/2



Perumahan rakyat di Palembang, rumah-rumah yang telah dibangun untuk disewakan kepada rakyat di Palembang, 15 Desember 1953

ANRI: Kempen 531215 DD 1



Pembangunan salah satu jembatan di atas Sungai Musi,  
Palembang, pembangunan pilar-pilar beton untuk jembatan  
dengan menggunakan perahu derek.

14 Desember 1953

ANRI: Kempen K531214 DD 1-1



Rumah Sakit Umum Palembang, Sumatera Selatan,  
11 Maret 1958

ANRI: [Kempen 580311 DD 3](#)



Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan di Palembang,  
11 Maret 1958  
ANRI: Kempen 580311 DD 1-3





Percobaan kereta api baru antara Kertapati-Prabumulih di Sumatera Selatan yang dihadiri juga oleh Menteri Perhubungan Mr. Soekardan.

1 Oktober 1958

*ANRI: Kempen 581001 DD 14*



Pembangunan Jembatan "Bunga Mas" di Kabupaten Lahat,  
Sumatera Selatan oleh kesatuan Zeni Pionir Angkatan Darat,  
9 Juli 1960

ANRI: Kempen 600709 DD 1

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA UPATJARA PELANTJANGAN TIANG  
PERTAMA PROJEK DJEMBATAN MUSI DI PALEMBANG, 10 APRIL 1962.

Saja diminta memberi do'a restu kepada pembangunan djembatan Musi ini.

Tadi pada waktu saja mengadakan pidato di rapat rakassa telah saja perintahkan agar supaya djembatan ini selesai pada tanggal 10 April 1964. Dan Pak Suprajogi, Menteri Pekerdjaan Umum jang sekarang, tadipn telah memberi beberapa pendjelaskan-pendjelaskan kepada saudara-saudara sekalian.

Kalau saja berdiri diimbar ini atau saudara-saudara pun, siapa-pun jang berdiri diimbar ini dan melihat kebelakang ini, melihat sibuknja lalu lintas di sungai Musi, akan segera mengerti bahwa sungai Musi itu adalah satu urat hidup bagi rakjat Sumatra Selatan. Bahasa asingnja satu "lebensader" daripada rakjat Sumatra Selatan. Dan bukan sedja didjaman purbakala sungai Musi adalah sungai jang amat penting, bahkan menentukan dalam peri-kehidupan rakjat di Sumatra Selatan. Tetapi djuga didjaman atom sekarang ini. Bahwa sungai Musi didjaman purbakala adalah sungai jang menentukan, bisa kita lihat daripada sedjarah bahwa daerah sini Palembang dan sekitarnja sedjak berabad-abad jang lalu, bahkan ribuan tahun jang lalu, telah mendjadi pusat ekonomi, pusat ilmu pengetahuan, pusat keradjaan. Sehingga sungai Musi saudara-saudara menduduki satu tempat jang boleh dikatakan abadi didalam peri-kehidupan rakjat Sumatra Selatan.

Didalam peri-kehidupan bangsa-bangsa sering sungai-sungai menduduki tempat jang demikian itu.

Di India misalnja saudara-saudara mengenal nama sungai Ganga. Orang Inggris menamakan sungai "Ganges", Ganga. Sungai Ganga demikian menentukan peri-kehidupan rakjat India sehingga sungai Ganga itu dikeramatkan, dianggap sebagai sungai jang keramat.

Di Sumatra ada satu sungai jang demikian pentingnja, demikian menentukan peri-kehidupan rakjat, sehingga sungai itu dianggap sebagai sungai Tuhan. Saudara-Saudara barangkali mengenal sungai Batanghari. Hari itu artinja apa saudara-saudara? Didalam istilah kuno hari berarti Tuhan. Matahari itu dianggap matanja Tuhan. Batanghari, sungai dianggap demikian pentingnja, demikian keramatnja, demikian menentukannja kepada peri-kehidupan rakjat, sehingga diberi nama Batangnja Tuhan, sungaiNja Tuhan, Batanghari.

Saja tidak mengetahui apa arti perkataan Musi. Barangkali orang Palembang mengetahui atau barangkali Pak Ir.Prof.Moh.Yamin jang djuga hadir disini mengetahui? Apa arti perkataan Musi? Tetapi aku bisa menduga, bahkan

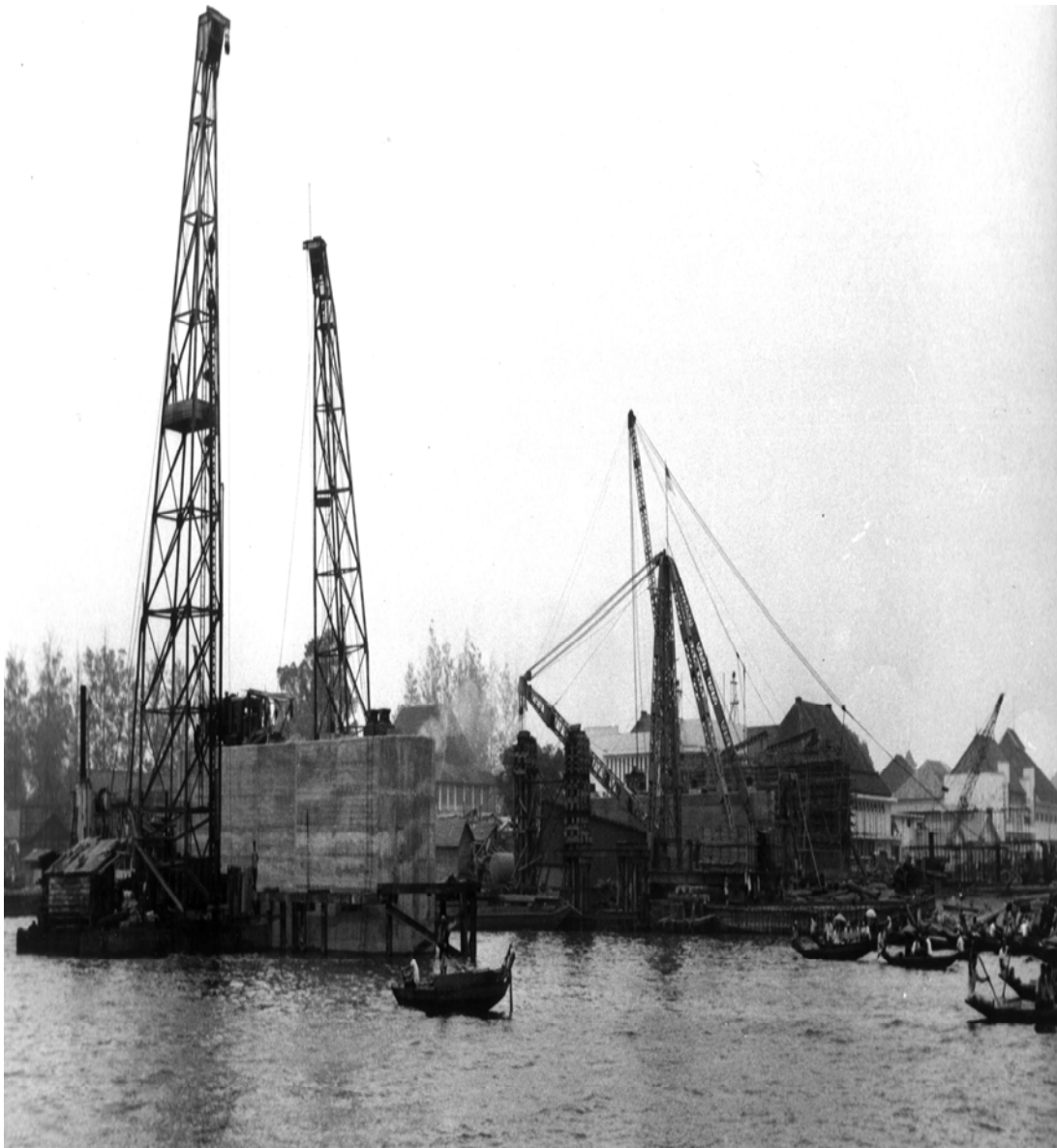
Bagian awal dari Pidato Presiden Soekarno pada Upacara  
Pemancangan Tiang Pertama Proyek Jembatan Musi  
di Palembang (sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera),  
10 April 1962

ANRI: Pidato Presiden No. 383



Presiden Soekarno meresmikan tiang pancang pertama  
Jembatan Sungai Musi di Palembang,  
(sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera),  
10 April 1962

[ANRI: Kempen 620410 DD 10](#)



Pembangunan Jembatan Sungai Musi di Palembang,  
(sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera),  
20 Oktober 1963

[ANRI: Kempen 63-13109](#)



Parlemen Jepang yang diketuai Tokuma Utsunomya meninjau  
Proyek Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang.

9 Mei 1965

ANRI: Kempen 65-4072



Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang,  
Sumatera Selatan,  
9 Mei 1965

ANRI: Kempen 65-4123



Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang,  
Sumatera Selatan.

12 Desember 2008

ANRI: PNSAP Sumsel 4





Kapal Pengangkut Jema'ah haji Indonesia asal Palembang,  
Sumatera Selatan,  
5 Mei 1965  
ANRI: Kempen 65-055/1

# DAFTAR ARSIP

## Citra Sumatera Selatan dalam Arsip

# DAFTAR ARSIP

## CITRA SUMATERA SELATAN DALAM ARSIP

### A. GEOGRAFI

1. Denah Pemerintahan Kota Palembang di pinggir sungai Musi, 1819  
ANRI: De Haan E 38  
Halaman: 25
2. Residensi Palembang, 1922.  
ANRI: Dinas Topografi 1436/81  
Halaman: 26
3. Palembang dengan sungai Musi, Talang Betutu, 1945.  
ANRI: Dinas Topografi 1988/89/94  
Halaman: 27
4. Palembang, Sekayu, Muara Enim, Perbatasan Riau, Jambi dan Bangka, 1941  
ANRI: Dinas Topografi 1407/Top Dienst  
Halaman: 28
5. Sketsa perbatasan Palembang Rejang dan Empat Lawang Bengkulu yang merupakan lampiran dari Resolusi Nomor 8, tanggal 29 Juli 1832.  
ANRI: De Haan E. 33  
Halaman: 29
6. Sketsa Bengkulu dan Palembang, 1930  
ANRI: De Haan L 44.  
Halaman: 30
7. Alang-alang di daratan Tebing Tinggi, Palembang. [±1930]  
ANRI: KIT 974/3  
Halaman: 31

8. Pemandangan kampung ditepi Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan, 18 Desember 1953  
[ANRI: Kempen K 531218 DD 1](#)  
Halaman: 32
9. Pemandangan di sekitar Danau Ranau, Kota Baru Palembang, [± 1930]  
[ANRI: KIT 953/17](#)  
Halaman: 33

## B. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

10. Bagian awal dari kontrak perdagangan antara Raja Palembang Sultan Ratu Abdul Jamal dengan Gubernur Jenderal Rijkloft, 20 April 1678  
[ANRI: Palembang 41/5](#)  
Halaman: 35
11. Bagian akhir dari Pembaharuan kontrak perdagangan tahun 1662, 1678, 1679 dan 1681 antara Raja Palembang Sultan Ratu Abdul Jamal dengan Komisariss Isaac van Thieje, 19 Januari 1691  
[ANRI: Palembang 41/6](#)  
Halaman: 36
12. Bagian awal Perpanjangan kontrak antara Raja Palembang Sultan Ratu dengan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), 6 Agustus 1723  
[ANRI: Palembang 41/7](#)  
Halaman: 37
13. Bagian akhir akte perjanjian antara Jan Isaac van Savenhoven, Komisariss Hindia Belanda di Palembang dengan Raja Palembang Sultan Ratoe Ahmad Najamuddin, 18 Agustus 1823.  
[ANRI: Palembang 15 DV-16](#)  
Halaman: 38

14. Bagian awal dari catatan laporan Residen Palembang tentang keadaan Palembang tahun 1811 sampai dengan 1821,  
[ANRI: Palembang 5/1](#)  
Halaman: 39
15. Sumpah Pelantikan Pangeran Krama Jaya, Perdana Menteri dari Palembang, 5 September 1823.  
[ANRI: Palembang 15 DV II – 18](#)  
Halaman: 40
16. Surat dari Raja Palembang, Sultan Ahmad Najamuddin kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen mengenai keadaan dan kedudukan keluarganya, 26 November 1823 (22 Rabiul Awal 1239 H)  
[ANRI: Surat Emas No. 7 \(Palembang 69\)](#)  
Halaman: 41
17. Surat Sultan Mohamad Badaruddin dari Palembang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai keadaannya yang diasingkan ke Ternate, 23 Desember 1823 (12 Safar 1239 H)  
[ANRI: Surat Emas No.22 \(Palembang 80\)](#)  
Halaman: 42
18. Surat dari Komisi Resolusi 15 Januari 1830 kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang penggabungan Bengkulu dengan Palembang, 15 Maret 1830  
[ANRI: Palembang 70-5](#)  
Halaman: 43
19. Bagian awal dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 5 tanggal 21 Mei 1855 tentang penentuan pemisahan batas wilayah Paksi Ampat antara Palembang dan Bengkulu, 21 Mei 1855  
[ANRI: Besluit No. 5 tanggal 21 Mei 1855](#)  
Halaman: 44

20. Daftar nama peserta rapat Tanjung Jati (Distrik Ranau) yang membahas hasil penelitian dan tugas komisi persiapan penentuan batas wilayah dan berbagai tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Palembang dan Bengkulu, 21 Mei 1855  
[ANRI: Besluit No. 5 tanggal 21 Mei 1855](#)  
[Halaman: 45](#)
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 120 tahun 1950 tentang pengangkatan Dr. M. Isa sebagai Komisaris Pemerintah RIS untuk Negara Sumatera Selatan, 17 Maret 1950  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres RIS No. 107](#)  
[Halaman: 46](#)
22. Bagian awal dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 121 tahun 1950 tentang Instruksi untuk Komisaris Pemerintah di daerah Negara Sumatera Selatan, 17 Maret 1950  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres RIS No. 121](#)  
[Halaman: 47](#)
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 155 Tahun 1950 tentang Pembebasan Tugas Dr Mohammad Isa sebagai Komisaris Pemerintah RIS Negara Sumatera Selatan, 19 April 1950  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres No. 141](#)  
[Halaman: 48](#)
24. Presiden Soekarno ketika tiba di Palembang dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Palembang, Plaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan, 8 September 1950  
[ANRI: Kempen 501085](#)  
[Halaman: 49](#)

25. Presiden Soekarno berjiarah ke makam pahlawan di Palembang, dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Palembang, Plaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan.  
8 September 1950  
[ANRI: Kempen 501081](#)  
[Halaman: 50](#)
26. Keputusan Presiden RI Nomor 63 tahun 1951 tentang pengangkatan Dr. Mohammad Isa sebagai Gubernur/Kepala Daerah Otonom Sumatera Selatan, 25 April 1951  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres No. 289](#)  
[Halaman: 51](#)
27. Kunjungan kerja Presiden Soekarno ke Pagar Alam, Sumatera Selatan. Nampak Presiden Soekarno sedang berbincang dengan seorang penduduk, 14 November 1952  
[ANRI: Kempen 521114 DD 1-4](#)  
[Halaman: 52](#)
28. Masyarakat Pagar Alam, Sumatera Selatan memenuhi rapat raksasa yang dihadiri oleh Presiden Soekarno.  
14 November 1952  
[ANRI: Kempen K. 521114 DD 1-14](#)  
[Halaman: 53](#)
29. Presiden Soekarno menerima sajian kesenian dalam kunjungan di Pagar Alam, Sumatera Selatan,  
16 November 1952  
[ANRI: Kempen 521117 DD 31](#)  
[Halaman: 54](#)
30. Keputusan Presiden RI Nomor 107 tahun 1953 tentang pedoman bekerja untuk Dewan Pemerintah Daerah Sementara Provinsi Sumatera Selatan, 16 Juni 1953  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres No. 790](#)  
[Halaman: 55](#)

31. Wakil Presiden Mohammad Hatta meninggalkan bandar udara Talang Betutu, Palembang, Sumatera Selatan.  
14 Juli 1954  
[ANRI: Kempen 540714 DD22](#)  
[Halaman: 56](#)
  
32. Presiden Soekarno disambut oleh Gubernur Sumatera Selatan, Winarno, Ketua Dewan Pemerintah Daerah (DPD), Ali Gatnier dan Panglima Teritorial II, Kolonel Bambang Utoyo ketika tiba di bandar udara Talang Betutu.  
9 Nopember 1954  
[ANRI: Kempen 541109 DD 2](#)  
[Halaman: 57](#)
  
33. Gubernur Sumatera Selatan Winarno memberikan tanda mata kepada tamu Negara Wakil Perdana Menteri Mesir Gamal Salem, 29 Agustus 1955  
[ANRI: Kempen 550829 DD 5](#)  
[Halaman: 58](#)
  
34. Gubernur Sumatera Selatan Winarno beserta Nyonya dengan Perdana Menteri Inggris, David Marschaal dalam kunjungan misi persahabatan ke Sumatera Selatan,  
13 September 1955  
[ANRI: Kempen 550913 DD 10](#)  
[Halaman: 59](#)
  
35. Bagian awal dari Resolusi Partai Politik Islam Masyumi Daerah Kecamatan Tanjung Tebet Palembang tentang permintaan kepada Pemerintah untuk memperpanjang pendaftaran Pemilihan Umum (pemilu) dan menertibkan kecurangan-kecurangan dalam pemilu tahun 1955.  
29 Oktober 1955  
[ANRI: Kabinet Presiden No. 997](#)  
[Halaman: 60](#)



36. Timbang terima Residen Palembang, kiri Residen Palembang yang baru H.M. Hosen, kanan residen Palembang yang lama Abdul Rozak, 1 Februari 1956  
[ANRI: Kempen 560201/2](#)  
[Halaman: 61](#)
  
37. Presiden Soekarno berbincang di atas kapal waktu menyebrang Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan. 10 April 1956  
[ANRI: Kempen 560410 DD 11](#)  
[Halaman: 62](#)
  
38. Presiden Soekarno tiba di resepsi muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang, disambut oleh barisan pandu, 23 Juli 1956  
[ANRI: Kempen 560723 DD 7](#)  
[Halaman: 63](#)
  
39. Ketua Umum Muhammadiyah Abdul Rasyid St. Mansur berpidato pada Muktamar ke-33 Muhammadiyah tentang perjuangan Muhammadiyah di Palembang, Sumatera Selatan, 23 Juli 1956  
[ANRI: Kempen 560723 DD 17](#)  
[Halaman: 64](#)
  
40. Presiden Soekarno mendengarkan laporan dari *Acting* Panglima Teritorial-II/Sriwijaya Letnan Kolonel Burlian, dalam rangka kunjungan Presiden ke Staf Komando Teritorial-II/Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. 28 Juli 1956  
[ANRI: Kempen 560724 DD 3](#)  
[Halaman: 65](#)

41. Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 14 November 1956  
[ANRI: Sekretaris Kabinet UU Darurat No. 130](#)  
[Halaman: 66](#)
42. Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 14 November 1956  
[ANRI: Sekretaris Kabinet UU Darurat No. 131](#)  
[Halaman: 67](#)
43. Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 14 November 1956  
[ANRI: Sekretaris Kabinet UU Darurat No. 132](#)  
[Halaman: 68](#)
44. Resolusi Keputusan Rapat Bersama Partai-partai Politik Marga Tembelang Gedung Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tentang dukungan kepada kebijaksanaan Gubernur Sumatera Selatan R. Winarno Danuatmodjo, 3 Januari 1957  
[ANRI: Kabinet Presiden No. 898.](#)  
[Halaman: 69](#)
45. Upacara pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 5 Juni 1958  
[ANRI: Kempen Nomor 1](#)  
[Halaman: 70](#)

46. Upacara Timbang terima Jawatan Lalulintas Darat Pusat kepada Daerah Otonom Swatantra Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang, 2 Oktober 1958  
[ANRI: Kempen Nomor 581002/1](#)  
[Halaman: 71](#)
47. Pawai dan rapat raksasa mendukung ide kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dilapangan Mohammad Hatta Palembang, 17 April 1959  
[ANRI: Kempen 590417 DD 1](#)  
[Halaman: 72](#)
48. Mayor Jendral Bambang Utoyo mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Panglima Teritorial II/Sriwijaya mendapat Lencana Tentara Pembebasan Republik Rakyat Cina, disematkan oleh Jendral Yang Cheng Wu, 10 Mei 1959  
[ANRI: Kempen 590510 DD 4](#)  
[Halaman: 73](#)
49. Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) menjadi Undang-Undang, 26 Juni 1959  
[ANRI: Sekretaris Kabinet UU Tahun 1959](#)  
[Halaman: 74](#)
50. Presiden Soekarno disambut oleh Panglima Teritorial II/Sriwijaya Kolonel Harun Sohor di bandar udara Talang Batutu, dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Sumatera Selatan, 3 November 1960  
[ANRI: Kempen 601103 DD 14](#)  
[Halaman: 75](#)

51. Keputusan Presiden RI Nomor 96 tahun 1963 tentang Pengangkatan Kiagus Syafaruddin Sebagai Anggota MPRS Wakil dari Daerah Sumatera Selatan, 14 Mei 1963  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1963](#)  
[Halaman: 76](#)
52. Bagian awal dari Keputusan Presiden RI Nomor 212 tahun 1963 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Brigadir Jenderal Polisi Achmad Bastari Sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 16 Oktober 1963.  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1963](#)  
[Halaman: 77](#)
53. Bagian awal dari Keputusan Presiden RI Nomor 306 tahun 1964 tentang Pemberhentian H. Abu Jazid Bustomi sebagai penjabat Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan mengangkat H. Abu Jazid Bustomi dan Ali Amin, SH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. 27 November 1964  
[ANRI: Sekkab Keppres Tahun 1964](#)  
[Halaman: 78](#)
54. Parlemen Jepang diketuai Tokuma Utsunomya melakukan kunjungan persahabatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Sumatera Selatan di Palembang, 9 Mei 1965  
[ANRI: Kempen 65-4071](#)  
[Halaman: 79](#)
55. Rapat Umum dengan slogan "Ganyang Pangkalan Militer Asing" di Palembang, Sumatera Selatan, 19 September 1965  
[ANRI: Kempen 650919-SS-1](#)  
[Halaman: 80](#)

## C. KEAGAMAAN

56. Patung-patung peninggalan Kebudayaan Hindu di Bumi Agung Pagar Alam, Sumatera Selatan, [± 1930]  
[ANRI: KIT 128/2](#)  
Halaman: 82
57. Klenteng orang Cina Palembang, Sumatera Selatan [± 1930]  
[ANRI: KIT 791/63](#)  
Halaman: 83
58. Salah satu gereja di Palembang, Sumatera Selatan, [± 1930]  
[ANRI: KIT 1099/24](#)  
Halaman: 84
59. Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, 25 Agustus 1950  
[ANRI: Kempen 50586](#)  
Halaman: 85
60. Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, 19 April 1951  
[ANRI: Kempen 512294](#)  
Halaman: 86
61. Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, setelah renovasi dengan perluasan masjid di belakang masjid utama.  
18 Desember 2008  
[ANRI: PNSAP Sumsel 1](#)  
Halaman: 87
62. Masjid di tempat penyaringan minyak di Sungai Gerong, Sumatera Selatan, 16 Desember 1953  
[ANRI: Kempen K 531216 DD 1](#)  
Halaman: 88

## D.PENDIDIKAN

63. Gambar resmi Sultan Palembang Mahmud Badaruddin II, salah satu Pahlawan Nasional yang berasal dari Sumatera Selatan,  
[ANRI: Buku Pahlawan Nasional Indonesia](#)  
[Halaman: 90](#)
64. Amanat tertulis Presiden kepada para pelajar di Prabumulih, dalam rangka kunjungan Presiden ke Sumatera Selatan, 16 Nopember 1952  
[ANRI: Kempen 521117 DD15](#)  
[Halaman: 91](#)
65. Presiden Soekarno menandatangani piagam peresmian Universitas Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, disaksikan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) Prof. Prijono, 3 Nopember 1960  
[ANRI: Kempen 601103 DD 35](#)  
[Halaman: 92](#)
66. Bagian awal dari amanat Presiden Soekarno pada peresmian status negeri terhadap Universitas Sriwijaya Palembang, 3 November 1960  
[ANRI: Pidato Presiden 236](#)  
[Halaman: 93](#)
67. Gedung Universitas Negeri Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, 3 Nopember 1960  
[ANRI: Kempen 601103 DD 40](#)  
[Halaman: 94](#)
68. Peluncuran roket "Pramuka Sriwijaya I" di Km 19, Palembang, Sumatera Selatan, 16 Mei 1965  
[ANRI: Kempen 65-0516-1](#)  
[Halaman: 95](#)

69. Ir. Sadono (memegang *microphone*) adalah perancang roket "Pramuka Sriwijaya I" menjelaskan kepada Panglima Kodam IV/ Sriwijaya Brigadir Jenderal Makmun Murod, 16 Mei 1965  
[ANRI: Kempen 65-0516-4](#)  
[Halaman: 96](#)
70. Gubernur Sumatera Selatan Brigadir Jenderal TNI HAJ. Bustomi, Jaksa Tinggi Sugiarto SH., dan Panglima Daerah Militer IV/ Sriwijaya Brigadir Jenderal Makmun Murod pada saat peluncuran roket "Pramuka Sriwijaya I", 16 Mei 1965  
[ANRI: Kempen 65-0516-5](#)  
[Halaman: 97](#)

## E. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

71. Pakaian adat gadis dari Muara Lakitan, Sumatera Selatan, [± 1930]  
[ANRI: KIT 399/20](#)  
[Halaman: 99](#)
72. Tari Gending Sriwijaya, menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Palembang, Sumatera Selatan, 30 November 1950  
[ANRI: Kempen 501129](#)  
[Halaman: 100](#)
73. Presiden dengan para penari Gending Sriwijaya, Palembang, Sulawesi Selatan, 30 November 1950  
[ANRI: Kempen 501130](#)  
[Halaman: 101](#)
74. Para gadis berpakaian khas adat Palembang yang menari Tari Gending Sriwijaya, 30 November 1950  
[ANRI: Kempen 50597](#)  
[Halaman: 102](#)

75. Tari Menumbuk Padi, Palembang, Sumatera Selatan, 30 November 1950  
[ANRI: Kempen 501167](#)  
[Halaman: 103](#)
76. Gubernur Sumatera Selatan Dr. Mohammad Isa meninjau pameran "Indonesia Maju", di Palembang, Sumatera Selatan, 1951  
[ANRI: Kempen 515585](#)  
[Halaman: 104](#)
77. Bupati Lahat meninjau pameran "Indonesia Maju", di Palembang, Sumatera Selatan, 1951  
[ANRI: Kempen 515296](#)  
[Halaman: 105](#)
78. Mempelai Wanita, pada Perkawinan adat Sumatera Selatan, 4 Agustus 1951  
[ANRI: Kempen K 510804 DD 1](#)  
[Halaman: 106](#)
79. Profil perempuan dengan pakaian khas di Kayu Agung, Sumatera Selatan, 12 Desember 1953  
[ANRI: Kempen K 531212 DD 1-5](#)  
[Halaman: 107](#)
80. Wakil Presiden Mohammad Hatta menerima persembahan dari perwakilan masyarakat Lubuk Lingau berupa "*Dempa Cantelan*" yang terbuat dari tanduk kerbau, 8 Juli 1954  
[ANRI: Kempen 540708 DD 1](#)  
[Halaman: 108](#)
81. Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama para Penari Gending Sriwijaya, dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden ke Sumatera Selatan, 12 Juli 1954  
[ANRI: Kempen 540712 DD 26](#)  
[Halaman: 109](#)



82. Wakil Presiden Mohammad Hatta melihat – lihat hasil kerajinan rakyat di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Juni 1957  
[ANRI: Kempen 570626 DD 3](#)  
[Halaman: 110](#)
83. Pejabat Presiden Sartono mendapat cendera mata sebuah tongkat gading dari Masyarakat Sumatera Selatan di Palembang, 28 Mei 1959  
[ANRI: Kempen 590528 DD 2](#)  
[Halaman: 111](#)
84. Pejabat Presiden Sartono bersama para penari Gending Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, 28 Mei 1959  
[ANRI: Kempen 590528 DD 24](#)  
[Halaman: 112](#)
85. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati disambut dengan tarian adat, ketika tiba di rumah Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, 9 Nopember 1954  
[ANRI: Kempen 541109 DD 9](#)  
[Halaman: 113](#)
86. Presiden Soekarno memukul gong untuk mengiringi tarian menyambut kedatangan Presiden Soekarno di halaman Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, 9 Nopember 1954  
[ANRI: Kempen 541109 DD 13](#)  
[Halaman: 114](#)
87. Benteng Kuto Besak di Palembang, Sumatera Selatan pada malam hari, merupakan salah satu peninggalan jaman kolonial yang saat ini digunakan sebagai asrama tentara anggota Komandao Daerah Militer II/Sriwijaya, 12 Desember 2008  
[ANRI: PNSAP Sumsel 2](#)  
[Halaman: 115](#)

88. Museum Sultan Mahmud Badaruddin II yang terletak berdekatan dengan Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak di Palembang, Sumatera Selatan,  
12 Desember 2008  
[ANRI: PNSAP Sumsel 3](#)  
Halaman: 116

## F. PEREKONOMIAN DAN PERDAGANGAN

89. Surat Sultan Ratu Ahmad Nadjamudin dari Palembang kepada Komisaris Jenderal van der Capellen mengenai kesepakatan perdagangan, 7 April 1823 (13 Rajab 1238 H)  
[ANRI: Surat Emas No. 18 \(Palembang 15\)](#)  
Halaman: 118
90. Kampung eksplorasi minyak di Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, [ $\pm$ 1920]  
[ANRI: KIT 471/20](#)  
Halaman: 119
91. Kapal-kapal dagang tradisional di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, [ $\pm$  1930]  
[ANRI: KIT 536/43](#)  
Halaman: 120
92. Warung-warung diatas Sungai Musi, Palembang, menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, 31 Agustus 1950  
[ANRI: Kempen 50620](#)  
Halaman: 121
93. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin yang ditetapkan oleh DPRD yang bersangkutan dalam sidangnya tanggal 21 Pebruari 1959, 30 Januari 1961  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961](#)  
Halaman: 122

94. Keputusan Presiden RI Nomor 585 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan-Daerah Tingkat II Musi Rawas mengenai pajak reklame yang ditetapkan oleh DPRD yang bersangkutan dalam sidangnya tanggal 31 Desember 1960, 7 November 1961  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961](#)  
[Halaman: 123](#)
95. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam Daerah Kotapraja Palembang yang ditetapkan oleh DPRD yang bersangkutan tanggal 13 Agustus 1959, 31 Januari 1961  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961](#)  
[Halaman: 124](#)
96. Keputusan Presiden RI Nomor 297 Tahun 1961 tentang Pengangkatan Direksi Sementara PN Tambang Batubara, Bukit Asam, Sumatera Selatan, 7 Juni 1961  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961](#)  
[Halaman: 125](#)
97. Keputusan Presiden RI Nomor 425 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan Daerah tingkat ke II Musi Banyuasin tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang ditetapkan oleh DPRD yang bersangkutan. 27 Juli 1961  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres tahun 1961](#)  
[Halaman: 126](#)
98. Keputusan Presiden RI Nomor 570 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pemungutan Pajak Tontonan Umum dalam Daerah Tingkat II Musi Rawas. 24 Oktober 1961  
[ANRI: Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961](#)  
[Halaman: 127](#)

## G.PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

99. Bagian awal laporan Residen Palembang tentang Perkebunan, 1867, 31 Oktober 1868  
ANRI: Palembang 64.9  
Halaman: 129
100. Pembangunan Pabrik Teh Gunung Dempo, Sumatera Selatan, [± 1930]  
ANRI: KIT 601/9  
Halaman: 130
101. Tanaman Lamtoro dan kopi Robusta di Pasemah, Palembang, Sumatera Selatan, [±1930]  
ANRI: KIT 609/4  
Halaman: 131
102. Rotan hasil hutan diangkut dengan kapal motor di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, 19 April 1951  
ANRI: Kempen 512296  
Halaman: 132
103. Pembutan sagu aren di Selat Panjang, Sumatera Selatan, 28 Juli 1951  
ANRI: Kempen 516628  
Halaman: 133
104. Keputusan Presiden RI Nomor 218 Tahun 1952 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1951 tanggal 29 Desember 1951 tentang Perhitungan Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Ternak Unggas, 11 September 1952  
ANRI: Sekkab Keppres 630  
Halaman: 134

105. Bagian awal Pidato Presiden Soekarno pada peresmian pemancangan dasar Pabrik Pupuk di Palembang, Sumatera Selatan, 4 November 1960  
[ANRI: Pidato Presiden 237](#)  
Halaman: 135
106. Bagian awal dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara, di Sumatera Selatan, 1961  
[ANRI: Sekretaris Kabinet PP Tahun 1961](#)  
Halaman: 136
107. Bagian awal dari Keputusan Panglima Komando Karet/Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tentang penyerahan *remilling ex Sumatera Rubber coy* Palembang kepada Gubernur/Panglima Komando Karet Daerah Sumatera Selatan, 15 Juli 1965  
[ANRI: Kementerian Pertanian 431](#)  
Halaman: 137
108. Surat dari Bupati Musi Banyuasin kepada Gubernur Sumatera Selatan tentang Permohonan untuk Menjadikan Cabang Dinas Perkebunan Rakyat Tingkat II menjadi Dinas Otonom, 21 Oktober 1970  
[ANRI: Kementerian Pertanian 452](#)  
Halaman: 138

## H. INFRASTRUKTUR

109. Bangunan induk Rumah Sakit di Tambang Bukit Asam, Sumatera Selatan, [ $\pm$ 1930]  
[ANRI: KIT 483/48](#)  
Halaman: 140

110. Jalan raya utama di Palembang, Sumatera Selatan, [±1930]  
[ANRI: KIT 760/27](#)  
[Halaman: 141](#)
111. Jalan Tengkuruk di Palembang, Sumatera Selatan, [±1930]  
[ANRI: KIT 761/66](#)  
[Halaman: 142](#)
112. Jalan dari Palembang menuju Pagar Alam, Sumatera Selatan, [±1930]  
[ANRI: KIT 511/80](#)  
[Halaman: 143](#)
113. Kantor Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, 25 Agustus 1950.  
[ANRI: Kempen 50559](#)  
[Halaman: 144](#)
114. Menara tempat persediaan air minum di Palembang, sekarang menjadi Kantor Walikota Palembang. 25 Nopember 1950  
[ANRI: Kempen 50585](#)  
[Halaman: 145](#)
115. Rumah-rumah penduduk di tepi Sungai Musi, Palembang. 19 April 1951  
[ANRI: Kempen 512493](#)  
[Halaman: 146](#)
116. Surat dari Menteri Kesehatan kepada Presiden RI tentang pendirian rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan, 23 Juni 1951  
[ANRI: Kabinet Presiden 634](#)  
[Halaman: 147](#)

117. Gubernur Sumatra Selatan DR. Mohammad Isa meresmikan pembukaan Dam "Tanah Mas"  
10 Oktober 1952  
[ANRI: Kempen 521006/2](#)  
[Halaman: 148](#)
118. Perumahan rakyat di Palembang, rumah-rumah yang telah dibangun untuk disewakan kepada rakyat di Palembang,  
15 Desember 1953  
[ANRI: Kempen 531215 DD 1](#)  
[Halaman: 149](#)
119. Pembangunan salah satu jembatan di atas Sungai Musi, Palembang, pembangunan pilar-pilar beton untuk jembatan dengan menggunakan perahu derek.  
14 Desember 1953  
[ANRI: Kempen K531214 DD 1-1](#)  
[Halaman: 150](#)
120. Rumah Sakit Umum Palembang, Sumatera Selatan,  
11 Maret 1958  
[ANRI: Kempen 580311 DD 3](#)  
[Halaman: 151](#)
121. Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, 11 Maret 1958  
[ANRI: Kempen 580311 DD 1-3](#)  
[Halaman: 152](#)
122. Percobaan kereta api baru antara Kertapati-Prabumulih di Sumatera Selatan yang dihadiri juga oleh Menteri Perhubungan Mr. Soekardan, 1 Oktober 1958  
[ANRI: Kempen 581001 DD 14](#)  
[Halaman: 153](#)

123. Pembangunan Jembatan "Bunga Mas" di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan oleh kesatuan Zeni Pionir Angkatan Darat, 9 Juli 1960  
[ANRI: Kempen 600709 DD 1](#)  
[Halaman: 154](#)
  
124. Bagian awal dari Pidato Presiden Soekarno pada Upacara Pemancangan Tiang Pertama Proyek Jembatan Musi di Palembang (sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera), 10 April 1962  
[ANRI: Pidato Presiden No. 383](#)  
[Halaman: 155](#)
  
125. Presiden Soekarno meresmikan tiang pancang pertama Jembatan Sungai Musi di Palembang, (sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera), 10 April 1962  
[ANRI: Kempen 620410 DD 10](#)  
[Halaman: 156](#)
  
126. Pembangunan Jembatan Sungai Musi di Palembang, (sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera), 20 Oktober 1963  
[ANRI: Kempen 63-13109](#)  
[Halaman: 157](#)
  
127. Parlemen Jepang yang diketuai Tokuma Utsunomya meninjau Proyek Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang, 9 Mei 1965  
[ANRI: Kempen 65-4072](#)  
[Halaman: 158](#)
  
128. Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, 9 Mei 1965  
[ANRI: Kempen 65-4123](#)  
[Halaman: 159](#)



129. Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, 12 Desember 2008  
ANRI: PNSAP Sumsel 4  
Halaman: 160
130. Kapal Pengangkut Jema'ah haji Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan, 5 Mei 1965  
ANRI: Kempen 65-055/1  
Halaman: 161

# PENUTUP

## PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Sumatera Selatan Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menyebarkannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.